

Buku Ajar
SOSIOLOGI PERTANIAN

Dr. Ir. Suswadi, M.Si

Ziyad
Books

Buku Ajar 

SOSIOLOGI PERTANIAN



Sosiologi Pertanian

Penulis dan Penyusun
Dr. Ir. Suswadi, M.Si

Foto dan Gambar
Muladiyanto

Layout
Muladiyanto

ISBN : 978-602-317-618-2

Diterbitkan oleh

Ziyad
Books

Jln. Banyuanyar Selatan No. 4
RT. 2/XII Banyuanyar - Surakarta
Telp.: 0271-727027
Fax: 0271-734645

KATA PENGANTAR

Sosiologi pertanian merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang membahas tentang dunia pertanian. Sosiologi pertanian mempelajari tentang kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Diantaranya adalah kehidupan keluarga petani, perkembangan pertanian, kehidupan antara sesama petani dalam bentuk hubungan sosial dan pola bertani yang diterapkan. Sosiologi pertanian terkadang sering disamakan dengan sosiologi pedesaan, padahal keduanya sangat berbeda. Perbedaan sosiologi pertanian dan sosiologi pedesaan sangat terlihat jelas yang mana sosiologi pedesaan membahas tentang segala bentuk hubungan sosial masyarakat desa namun sosiologi pertanian hanya memfokuskan pada orang yang berprofesi sebagai petani. Manfaat dan tujuan mempelajari sosiologi pertanian tentunya yang paling utama adalah mempelajari mengenai hubungan sosial atau aktifitas sosial para petani.

Sosiologi Pertanian merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang Masyarakat Pertanian yaitu interaksi yang terjadi dan mempengaruhi kehidupan Masyarakat Pertanian, baik interaksi yang terjadi secara internal, yaitu dari dalam masyarakat, maupun interaksi dari luar atau akibat kontak hubungan secara eksternal dengan pihak luar, akibat hubungan kerja agraris, atau akibat adanya suatu aturan atau kebijakan pemerintah.

Tujuan mempelajari sosiologi pertanian adalah untuk mengenal perilaku Masyarakat Pertanian dan seluruh Perilaku yang berhubungan dengan kehidupan Masyarakat Pertanian, misalnya pola hidup, kelembagaan, hubungan kerja agraris, dan pembangunan

pertanian. Dengan mempelajari Sosiologi Pertanian, diharapkan yang mempelajarinya akan mengetahui dan memahami: (1) pola umum kehidupan masyarakat pertanian; (2) prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum yang berlaku dalam masyarakat pertanian; (3) sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat pertanian; dan (4) sistem dan hubungan peran dalam pembangunan pertanian.

Mempelajari Sosiologi Pertanian sangat bermanfaat, dengan mempelajari Sosiologi Pertanian diharapkan akan mampu mendeskripsikan kehidupan masyarakat pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kehidupan Masyarakat Pertanian. Penelusuran yang baik terhadap kondisi Masyarakat yang dibekali dengan pengetahuan dasar tentang Sosiologi Pertanian, akan sangat mendukung perolehan data masyarakat yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan pertanian. Pembangunan Pertanian hanya akan disebut berhasil apabila kondisi kehidupan Masyarakat Pertanian baik, produktif, dan sejahtera hidupnya. Penelitian yang terkait dengan Sosiologi Pertanian sangat penting untuk secara berkala dilaksanakan, dalam penelitian jenis ini dilakukan penyelidikan sosiologis yang bermanfaat untuk perencanaan sosial, ekonomi, dan lingkungan pertanian, terutama untuk memecahkan dengan baik masalah-masalah yang terjadi pada Masyarakat Pertanian. Untuk itu, sangat dianjurkan seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian dan actor yang berperan dalam Pembangunan Masyarakat Pertanian, mempelajari dengan baik kehidupan Masyarakat Pertanian dengan belajar Sosiologi Pertanian.

Puji syukur kami panjatkan pada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan penyusunan buku sosiologi pertanian. Penyusunan buku sosiologi pertanian ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Sosiologi Pertanian di Fakultas Pertanian Univesitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kami menyadari

bahwa buku yang kami selesaikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Seperti halnya pepatah “tak ada gading yang tak retak”, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua kalangan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penyusunan buku kami selanjutnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Serta kami berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Aamiin....

Surakarta, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	11
A. Pengertian Sosiologi	11
B. Pengertian Sosiologi Pertanian	17
C. Ruang Linskup Sosiologi Pertanian	18
BAB 2 DESA DAN MASYARAKAT AGRARIS	20
A. Pengertian Desa.....	20
B. Karakterisasi.....	22
C. Otonomi Desa.....	35
D. Demokratisasi Pemerintahan Desa.....	36
E. Masyarakat	38
F. Peasant dan Subsistensi.....	40
BAB 3 PENGERTIAN DAN FUNGSI KEBUDAYAAN ...	44
A. Pengertian Kebudayaan.....	44
B. Kebudayaan Sebagai Pedoman Hidup	47
C. Unsur dan Wujud Kebudayaan.....	49
D. Perubahan Kebudayaan	51
E. Kebudayaan dan Sikap Mental.....	55
F. Nilai-nilai Lokal dan Modernitas	57
BAB 4 MORAL EKONOMI PETANI	62
A. Deskripsi.....	62
B. Pasar Kapitalistik di Asia Tenggara mengacaukan “Moral Ekonomi”	64

	C. Ekonomi Moral dengan Ciri Khas “Desa” dan “Ikatan Patron-Klien”	65
	D. Kondisi yang Membentuk Etika Subsistensi.....	67
	E. Moral ekonomi pedagang.....	68
BAB 5	PROSES DAN INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA	73
	A. Pengertian	73
	B. Proses dan Interaksi Sosial Masyarakat di Pedesaan	74
	C. Proses dan Interaksi Sosial Masyarakat di Pedesaan Indonesia	86
BAB 6	LEMBAGA KEMASYARAKATAN.....	90
	A. Pengertian tentang lembaga kemasyarakatan.....	90
	B. Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan pedesaan.....	98
	C. Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan.....	100
BAB 7	PERUBAHAN SOSIO KULTURAL DAN MODERNISASI	108
	A. Pengertian.....	108
	B. Disorganisasi Sosial	111
	C. Pengaruh Terhadap Keamanan.....	117
	D. Tanda-tanda Perubahan	120
	E. Tendensi Ke Arah Terorganisasi Kembali	124
	F. MODERNISASI.....	126
	G. GLOBALISASI.....	127
	H. Inovasi-Difusi.....	130
BAB 8	KELOMPOK DAN ORGANISASI	131
	A. Konsep kelompok dan organisasi.....	131
	B. Perkembangan kelompok lokal	138

	C. Organisasi tani.....	139
	D. Organisator (Community organizer/CO).....	142
	E. Dinamika Kelompok	143
BAB 9	SISTEM STATUS DAN PELAPISAN SOSIAL.....	153
	A. Pengertian Status dan Peran	153
	B. Pengertian Pelapisan Sosial.....	157
	C. Pelapisan Sosial Masyarakat Desa	160
BAB 10	KEPEMIMPINAN, KEKUASAAN DAN WEWENANG.....	169
	A. Pengertian Kepemimpinan	169
	B. Tujuh Hal Mendasar yang Perlu dikuasai untuk Kepemimpinan	170
	C. Pengertian Kekuasaan	172
	D. Pengertian Wewenang	177
BAB 11	KEBIJAKAN TERHADAP PEREMPUAN, GENDER DAN PEMBANGUNAN.....	184
	A. Pengertian gender.....	184
	B. Dampak Pembangunan Pertanian dan Kaum Perempuan.....	187
	C. Peranan Ganda Perempuan dalam Pembangunan...	189
	D. Pendekatan Kebijakan Terhadap Perempuan, Gender dalam Pembangunan.....	190
	E. Pengintegrasian Gender Dalam Pembangunan....	192
	DAFTAR PUSTAKA.....	199

A. Pengertian Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses social, termasuk didalamnya perubahan-perubahan social. Definisi struktur social adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur social yang pokok yaitu kaidah-kaidah social (norma-norma social), lembaga-lembaga social, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan social. Proses social adalah pengaruh timbale balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh timbale balik antara segi kehidupan bersama.

Sebagai subyek sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Pengertian masyarakat (society) adalah sejumlah orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, secara sadar merupakan kesatuan, dan membentuk system hidup bersama. Hidup bersama ini kemudian menimbulkan kebudayaan termasuk system hidup itu sendiri.

Dalam kenyataannya ilmu yang mempelajari tentang masyarakat amat banyak, dan masing-masing telah memiliki kaidah ilmu pengetahuan tersendiri yang mana, hal itu tentu berimplikasi pada pembatasan kajian sosiologi. Tentu kita perlu unluk mengetahui apa perbedaan antara ilmu sosiologi dengan ilmu kemasyarakatan lainnya

agar tidak terjadi turnpang tindih pengertian antara keduanya. Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Itu secara bersama-sama mempelajari kehidupan bersama itu dapat dilihat dari beberapa segi atau aspek, ada segi *kehidupan ekonomi* (yang mengenai produksi, pembagian dan penggunaan barang-barang serta jasa-jasa), segi *kehidupan politik* (yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat), *segi kehidupan hukum* (yang meliputi norma-norma yang mengatur cara hidup bersama di dalam masyarakat), *segi keagamaan* dan segi-segi kehidupan lainnya. Setiap segi kehidupan bersama itu merupakan lingkup atau lapangan kerja dari suatu Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan tertentu.

Segi ekonomi dipelajari oleh ilmu ekonomi, segi ilmu politik dipelajari oleh ilmu politik dan segi kehidupan hukum dipelajari oleh ilmu hukum. Dari semua segi kehidupan bersama itu memiliki unsur-unsur yang sama. Yaitu yang disebut unsur-unsur sosial atau unsur-unsur kemasyarakatan. Unsur-unsur sosial inilah yang menjadi ruang lingkup sosiologi.

Sosiologi sebagai ilmu sosial yang mengkaji masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat merupakan *pure since* dan bukan *applied since*. Sosiologi tidak mengajarkan sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk melakukan perubahan masyarakat secara langsung dan hanya memberikan kecenderungan-kecenderungan perilaku manusia. Selain itu sosiologi dalam perkembangannya telah menjadi ilmu yang cukup mapan dengan berbagai pendekatan kajian dan metode yang telah berkembang pesat hingga saat ini.

Harry M. Jonson dalam Soedjono Soekanto (1999) mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang telah berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya adalah :

1. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekuatif.
2. Sosiologi bersifat teoritis yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu bemsaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dalam unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
3. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada daiam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
4. Sosiologi juga bersifat non-etis artinya yang dibicarakan bukan buruk atau baiknya sebuah kenyataan akan tetapi lebih pada penjelasan fakta tersebut secara analitis.

Dari perkembangan teori sosiologi kita akan mengenal beberapa perspektifdan aliran sosiologi. Hal itu mengacu pada pandangan mereka yang memang berbeda dalam memahami masyarakat. Teori itu sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka lahir tak lepas dari lahirnya ilmu terdahulu yang lebih mapan. Pada saat ilmu biologi mengalami kemajuan yang pesat maka ilmu sosiologi terpengaruh, juga pada saat dunia mengalami peperangan maka perspektif ilmu sosiologipun akan terbawa oleh pengaruh yang dominan saat itu. Meski demikian sosiologi pada dasarnya adalah ilmu yang mengungkapkan realita masyarakat dan apa hubungan antar realita tersebut.

Perspektif pertama sosioiogi yang banyak kita kenal adalah strukturalis fungsional dengan beberapa tokohnya seperti Emiile

Durkheim dan Talcott Parsons. Masyarakat menurut pandangan strukturalis fungsional akan selalu menyesuaikan diri dengan jalan melakukan pembaharuan secara sistemik dengan prasyarat fungsional yaitu *konsensus normatif* dan *sistem pengawasan* sosial dalam arti masyarakat mampu memelihara stabilitas dan keseimbangan sistemiknya di tengah lingkungan yang selalu berubah. *Ekuilibrimum* dan kecenderungan untuk memelihara integrasi adalah komponen utama dari teori fungsional struktural.

Menurut struktural fungsional perbedaan internal yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan mekanisme integrasi dalam masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak mengguncang keutuhan pola-pola struktur yang esensial. Adaptasi-adaptasi akan selalu dilakukan oleh perbedaan yang ada sehingga menjamin perubahan yang terkendali.

Masyarakat akan selalu berada pada keseimbangan harmonis dan tertib, kebaikan dalam masyarakat akan dirasakan baik pula oleh individu. Berdasarkan asumsi ini strategi yang mendasari kajian masyarakatnya mendorong partisipasi yang penuh seluruh masyarakat dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam pembangunan. Selain itu pendekatan ini menganggap pembangunan akan dapat dilakukan dengan optimal apabila partisipasi masyarakat dilakukan dengan seadil-adilnya atau demokratis.

Informasi-informasi pembangunan akan dibawa oleh agen pembaharu yang biasanya adalah (orang dari luar sistem) sehingga permasalahan yang ada di masyarakat dapat dipecahkan tanpa terkungkung sistem sosial yang melingkupinya. Dalam pembangunan pertanian Indonesia fungsi ini dikerjakan oleh para penyuluh pertanian, kontak tani serta mantri-mantri pertanian yang tersebar hampir di seluruh/pelosok desa. Hanya saja mengingat

begitu kompleksnya permasalahan pembangunan teori inipun tidak mampu untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul kemudian.

Perspektif kedua dari sosiologi adalah perspektif konflik yang mana selain tersusun atas kepentingan-kepentingan dalam masyarakat terlihat adanya ketidak-merataan distribusi kekuasaan pada masing-masing kelompok kepentingan. Kelompok dengan kekuasaan yang banyak akan cenderung untuk melakukan mobilitas kekuasaan hingga mengakibatkan pemusatan kekuasaan pada segelintir orang atau keiompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu kekuasaan sangat diperlukan untuk melakukan pemerataan terhadap kecenderungan tersebut. Perspektif ini memberikan ruang yang besar sekali bagi kondisi ketidak-seimbangan sistem sosial.

Dalam pembangunan pertanian sebagai misal, teori konflik dicirikan dengan adanya dorongan pengorganisasian yang intens bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses sumberdaya ekonomi dengan baik untuk dapat melakukan perubahan sehingga dapat menikmati sumberdaya itu. Strategi ini lebih menekankan pada perubahan mendasarpada struktur sosial masyarakat melalui distribusi kekuasaan, distribusi sumber-sumber daya, dan dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat.

Konsekuensi yang timbul kemudian peranan agen pembaharu merupakan pembela masyarakat untuk menunjukkan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dan mendorong kristalisasi permasalahan dalam masyarakat hingga kemudian kaum miskin dapat bangkit untuk melakukan perubahan mendasar pada struktur sosial melalui aksi-aksi revolusioner.

Secara umum pandangan teori ini dalam memandang bahwa kehidupan sosial pada dasarnya merupakan ajang konflik atau pertentangan antara dan di dalam golongan masyarakat, sumberdaya

ekonomi dan kekuasaan politik merupakan sesuai yang penting sehingga berbagai kelompok berusaha merebutnya. Selain itu masyarakat akan terbagi menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok ter subordinasi, kelompok determinan mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam sistem sosial, sehingga pertentangan tersebut melahirkan kekuatan yang akan menjadi sumber perubahan. Dari kondisi ini perubahan merupakan sebuah keniscayaan karena konflik akan selalu ada dalam masyarakat.

Meski ruang lingkup dan bahasan dalam sosiologi pada dasarnya sama akan tetapi tidak dapat dipungkiri ada berbagai pandangan yang berbeda pada setiap ilmuwan dalam menjelaskan realita masyarakat. Masyarakat ada yang dipandang sebagai kesatuan sistem yang fungsional bagaikan tubuh manusia yang seimbang melahirkan teori fungsionalisme, tetapi kenyataannya dalam masyarakat juga terjadi pertentangan kelas melahirkan teori konflik. Sementara yang memandang bahwa manusia adalah bagian utama dari semua realitas melahirkan teori humanisme sebagai jawaban atas kebuntuan berbagai pandangan sosiologi terdahulu. Banyak tokoh sosiologi yang mendukung perkembangan teori tersebut mulai dari August Comte, Talcot Pearson, Max Weber, Ferdinand Tönnies, Jürgen Habermas dengan mashab kritisnya, Karl Marx, dan beberapa ahli sosiologi yang lahir kemudian. Sosiologi sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan sosial dalam perkembangannya banyak melahirkan berbagai teori sosiologi dan berbagai cabang sosiologi. Obyek kajian yang berbeda selanjutnya menjadi cabang baru seperti sosiologi industri, sosiologi politik, sosiologi agama dan berbagai cabang sosiologi lainnya. Perkembangan ini juga termasuk sosiologi pertanian sebagai cabang sosiologi yang khusus mengkaji masalah tentang masyarakat pertanian dan dinamikanya.

B. Pengertian Sosiologi Pertanian

Pada berbagai literatur disebutkan masyarakat pertanian dengan istilah *rural community* sementara masyarakat perkotaan dengan *urban commumty*. Perbedaan tersebut didasari oleh perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Keduanya antara masyarakat kota dan desa memiliki perbedaan ciri-ciri yang cukup mencolok mulai dari struktur hingga norma dan tata nilainya. Meski demikian perbedaan yang tegas antara pertanian dan perkotaan sangatlah sulit untuk dilakukan karena perbedaannya bersifat gradual. Pada masyarakat perkotaan seringkali kita masih melihat pengaruh desa yang cukup kuat, demikian sebaliknya jarang sekali kita temukan sebuah desa yang benar-benar terlepas dari pengaruh kota, (Soekanto, 1997).

Lebih lanjut diungkapkan bahwa masyarakat pertanian akan memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat urban (kota). Kehidupan ini juga akan dipahami berbeda antara orang kota dan desa misalnya makanan, pakaian, dan minuman akan dipandang sebagai barang yang berfungsi untuk keperluan pokok bagi masyarakat desa dan dipahami agak berbeda bagi orang kota. Seringkali makanan, pakaian, dan minuman lebih kental dengan gaya hidup dari pada fungsi pokoknya bagi masyarakat kota. Mengingat adanya perbedaan yang cukup banyak tersebut maka bahasan sosiologi pertanian menjadi dikhususkan dalam kajian sosiologi. Beberapa ciri dari masyarakat pertanian dan perkotaan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Pandangan, gaya hidup, dan masih banyak lagi termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya. Mengenai ciri-ciri masyarakat kota menurut Soedjono Soekanto (1997) terdiri dari kehidupan keagamaan, individualisme, pembagian kerja, macam pekerjaan, jalan pikiran, jalan kehidupan, serta perubahan-perubahan sosialnya.

Pada sisi lain orang kota pada umumnya mempunyai individualitas yang tinggi dibandingkan dengan orang desa. Di desa orang akan lebih mementingkan kelompok atau kekeluargaan. Pada kehidupan kota kehidupan keluarga sukar untuk disatukan, karena perbedaan kepentingan politik, perbedaan agama, pekerjaan dan lain sebagainya. Di kota para individu kurang berani menghadapi sendiri orang lain masyarakat apalagi menganalisisnya dengan jelas karena memang masyarakat adalah kenyataan yang mmit dan unik. Sosiologi pertanian adalah sosiologi yang membahas tentang struktur dan proses-proses sosial yang terjadi di pertanian. Hal tersebut sangat berbeda dengan sosiologi pertanian yang membahas masyarakat pertanian tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Pemisahan itu dilakukan mengingat pertanian sebagai sebuah komunitas dalam suatu wilayah telah banyak mengalami perkembangan dimana sektor pertanian telah banyak mengalami perubahan peran.

Sosiologi pertanian menekankan perhatian pada masyarakat pertanian dan segala dinamikannya. Struktur sosial yang ada, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu sosiologi pertanian juga menjelaskan tranformasi tata nilai dan norma serta adat masyarakat pertanian pembahasan tidak hanya pada petani namun lebih luas pada komunitas dalam suatu kawasan pertanian.

C. Ruang Linskup Sosiologi Pertanian

Sebagaimana sosiologi umum bahasan dasar sosiologi pertanian tidak mungkin lepas dari beberapa kategori atau bahasan umum dalam sosiologi. Yang membedakan hanyalah pada obyek pembahasan dimana sosiologi umum pada masyarakat secara umum, maka sosiologi pertanian pada masyarakat pertanian dengan berbagai karakteristiknya yang berbeda dengan komunitas yang lain. Oleh

karena itu ruang lingkup sosiologi pertanian ada pada komunitas obyek studi desa yang dipotret dinamika dan hubungannya dengan komunitas lain dan geografi lain.

Sosiologi pertanian sebagaimana ilmu kemasyarakatan lain mempelajari tentang :

1. Desa dan Masyarakat Agraris
2. Pengertian dan Fungsi Kebudayaan
3. Moral dan Ekonomi Petani
4. Interaksi Sosial
5. Lembaga Kemasyarakatan
6. Perubahan Sosial dan Modernisasi
7. Kelompok dan Organisasi
8. Pelapisan Sosial
9. Kepemimpinan, Kekuasaan, Wewenang
10. Gender

DESA DAN MASYARAKAT AGRARIS

A. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat Indonesia yang asli dan mandiri. Dalam pandangan politik desa adalah sebuah masyarakat demokrasi, yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat.

Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional dengan ciri-ciri masyarakat/rembug desa, misalnya proses pemilihan Kepala Desa, BPD oleh rakyat dari calon-calon yang diajukan sendiri oleh rakyat.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman. Sebagian dari mana hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan mana pedukuhan, ampean, kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar (Inayatullah, 1977). Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Melihat dari definisi itu maka kita dapat menemui banyak istilah di negara kita tentang masyarakat

tersebut seperti dusun bagi masyarakat Sumatera Selatan, dari bagi Maluku, *kuta* untuk Batak, nagari di Minang atau *wanua* di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Sedangkan dalam pandangan ekonomi, desa adalah sebuah unit ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, dengan sistem kepemilikan tanah komunal, lembaga lumpung desa yang juga merupakan lembaga perkrediatan pertanian, masyarakat bekerja secara gotong royong dan pembagian rejeki secara adil dalam unit ekonomi keluarga.

Menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Ketentuan mengenai desa dalam UU No. 22 tahun 1999 memberikan otonomi kepada masyarakat desa untuk membentuk, menghapus, menggabungkan serta menentukan hak dan kewenangannya berdasar pada asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat. Selain itu menurut UU No. 22 tahun 1999, desa dipandang sebagai komunitas hukum, sedangkan mengenai istilah desa dan berbagai kelembagaan di desa dapat disesuaikan dengan menggunakan istilah lokal, secara konseptual juga memberikan kewenangan pada masyarakat desa untuk memilih kepada desa, parlemen desa dan pemimpin kelembagaan lokal di desa, termasuk di dalamnya memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan desa, iruan desa, gotong royong, pungutan desa dan usaha yang dikelola desa.

Desa sebagai lembaga terkecil dalam struktur negara memiliki sistem yang utuh mulai dari ekonomi, sosial budaya dan politik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ikatan dan interaksi satu dengan yang lain cukup kuat (kekerabatan), taat pad anorma, aturan dan produk hukum yang disepakati bersama dengan cara berembug atau musyawarah baik dalam konteks budaya politik dan ekonomi.

Sedangkan masyarakat adalah sebuah sistem sosial yang komprehensif artinya di dalam masyarakat desa terdapat semua bentuk pengorganisasian atau lembaga-lembaga yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pada konteks ideal dan realitasnya, desa akan mampu mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakatnya, karena desa dari waktu ke waktu selalu berkembang mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakatnya, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ada.

B. Karakterisasi

Karakterisasi desa adalah sesuatu yang melekat pada unsur-unsur desa, yang memberikan kekhususan dan perbedaannya, sehingga merupakan ciri yang melekat pada istilah yang disebut dengan desa. Karakterisasi ini dapat ditinjau dari segala aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (sosial). Karakterisasi tersebut antara lain :

1) Pekerjaan (*Occupation*)

Pada umumnya, pekerjaan di desa masih banyak tergantung kepada alam. Di samping itu, pekerjaannya juga tidak banyak bervariasi. Dapat dikatakan sebahagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan di bidang pertanian (usaha tani, peternakan, perikanan).

Pekerjaan di desa utamanya yang ada kaitan tentang tanaman dan hewan. Dan di desa, masyarakat bekerja di tempat terbuka dan terik matahari, serta pekerjaannya sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam

2) Ukuran masyarakat (*Size of community*)

Batasan-batasan atau kondisi-kondisi yang menentukan bentuk pertanian dalam mencari penghidupan merupakan sifat-sifat dasar dari kehidupan pedesaan. Seperti misalnya, sifat pekerjaan pertanian yang menuntut adanya tanah tertentu bagi per orangnya- tingginya rasio tanah dan manusia, merupakan suatu kenyataan yang membuat besarnya komunitas hampir tidak mungkin. Hal ini menyebabkan rendahnya kepadatan penduduk per kilo meter persegi.

3) Kepadatan penduduk (*Density of population*)

Kepadatan penduduk tentu saja juga didasarkan pada jumlah penduduk yang ada atau ditampung di wilayah yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah per kilometer persegi. Kalau kita amati di daerah pedesaan, tempat tinggal penduduk biasanya terkonsentrasi pada satu kelompok perumahan-perumahan yang dikelilingi oleh tanah-tanah pertanian. Sehingga kepadatan penduduk di pedesaan dibandingkan dengan seluruh luas tanah yang ada, tentu saja terhitung rendah. Akibat rendahnya kepadatan penduduk bagi pedesaan membawa beberapa dampak atau pengaruh tertentu, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan.

Pengaruh yang menguntungkan, antara lain :

- Adanya udara yang segar
- Kondisi yang tenang (tidak ribut)

- Hubungan sosial yang intim
- Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kelompok sosial yang menyebabkan orang tidak terisolasi secara psikologis

Sedangkan yang kurang menguntungkan, antara lain :

- Lingkungan pandangan yang konstan
- Gosip-gosip ketetangaan
- Jalan-jalan yang kurang baik
- Alat-alat komunikasi yang kurang memadai
- Tidak adanya sekolah yang memadai

4) Lingkungan (*environment*)

Konsep tentang lingkungan itu sendiri, sesungguhnya sangatlah luas. Terlebih dahulu harus diketahui dan dianalisis unsur-unsur pokoknya, sebelum ia dapat memberikan makna yang khusus dalam tinjauan (analisa) sosiologis. Pendapat Bernard yang dikutip oleh Lynn Smith (1951 : 47) mencoba untuk menganalisis dan mengklasifikasi lingkungan ini. Menurutnya, terdapat empat kelas pokok lingkungan, yakni : (1) Lingkungan fisik atau inorganik; (2) Lingkungan biologis atau organik; (3) Lingkungan sosial; dan (4) Campuran atau institusionalisasi yang berasal dari lingkungan kontrol.

Menurut Bernard, lingkungan fisik adalah termasuk semua sumber-sumber kosmis dan fisiografis, tanah, iklim, sumber-sumber inorganik, kekuatan-kekuatan alam seperti angin dan pasang surut, pembakaran, radiasi dan grafitasi. Lingkungan ini bagi masyarakat desa sangat berpengaruh dan berkenaan secara langsung dengan diri mereka. Kemudian, dalam lingkungan biologis atau organik adalah mikro

organisme, serangga, parasit, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari tiga bagian, antara lain : fisio-sosial, bio-sosial dan psikososial.

Fisiososial digunakan untuk menunjukkan porsi-porsi dari kebudayaan material yang penampilannya objektifnya terkonstruksi di luar materi-materi inorganik, antara lain : alat-alat, senjata, mesin-mesin, jalan, dan sebagainya. Bio-sosial selanjutnya terdiri dari human dan non-human. Yang termasuk non-human bio-sosial adalah tanaman-tanaman dan hewan-hewan dan seluruh material-material yang digunakan oleh manusia yang berasal dari sumber-sumber organik. Sedangkan human bio-sosial adalah kehidupan manusia dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Psiko-sosial adalah lingkungan sosial yang ditandai oleh “tingkah laku dalam” (*Inner Behavioral*) seperti ; ide-ide, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Sedangkan penampilan luar (*outward expressions*) dari kategori ini adalah : adat istiadat (*customs*), kebiasaan-kebiasaan (*folkways*) dan simbol-simbol eksternal seperti bahasa.

Campuran atau institusionalisasi yang berasal dari lingkungan kontrol terdiri atas unsur-unsur gabungan tiga yang lainnya, yaitu yang membatasi sistem-sistem pekerjaan. Hal ini merupakan lingkungan yang sesungguhnya beroperasi dalam organisasi sosial. Sistem-sistem ini pada umumnya dapat terjadi dalam karakter yang diperlihatkan oleh sistem-sistem seperti ekonomi, politik, ras, pendidikan dan sebagainya.

Dengan memiliki ciri pekerjaan pertanian, petani hidup di tengah-tengah suatu lingkungan yang secara radikal berbeda dari apa yang ada di kota. Di pedesaan, kepentingan

terutama harus dikaitkan dengan kenyataan bahwa secara praktis semua aspek kehidupan pedesaan ditentukan secara langsung oleh lingkungan fisik. Aktivitas-aktivitas pertanian mengharuskannya bekerja di luar rumah. Ini berarti bahwa para petani secara langsung terpengaruh oleh cuaca. Petani harus berjemur di terik matahari, mereka dapat menikmati hirupan udara segar di pedesaan. Dengan demikian masyarakat pedesaan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan organik daripada masyarakat kota.

5) Diferensiasi sosial

Diferensiasi sosial sangat dipengaruhi oleh banyaknya kelompok sosial yang ada. Pada masyarakat pedesaan, jumlah kelompok sosial ini tidak sebanyak dan sekompleks masyarakat perkotaan. Daerah pedesaan pada dasarnya adalah homogen, dan hampir semua penduduknya mempunyai keseragaman dalam bidang pekerjaan, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor generasi yang turun-temurun tinggal di desa tersebut, sehingga warisan sosial dan budaya (*social and cultural heritage*) menjadi semacam *transfer of culture* saja. Bahkan di beberapa desa pada suku-suku tertentu, terlihat adanya kelompok masyarakat yang mempunyai garis keturunan yang sama, dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama, yaitu orang yang pertama kali membuka desa tersebut. Garis keturunan yang sama ini paling mudah dilihat pada masyarakat suku Batak, yang biasanya dalam satu desa terdapat kerabat-kerabat yang berasal dari satu nenek moyang. Keturunan ini ditandai dengan marga yang dimiliki oleh penduduk desa tersebut. Satu desa biasanya hampir mayoritas mempunyai marga yang sama. Dalam masyarakat suku Batak Karo, pendiri kampung (*huta*)

ini disebut *merga taneh* (Payung Bangun, 1981 : 101) yang biasanya mempunyai tanah lebih luas dari penduduk lainnya.

Selain karena homogenitas masyarakat desa, diferensiasi sosial pada masyarakat pedesaan juga dikarenakan oleh perbedaan struktur sosial, yang sesungguhnya terlihat tidak begitu jelas. Masyarakat pedesaan dapat dikatakan menjadi tersegmentasi dan ia tidak berfungsi sebagai suatu unit yang integral. Paling-paling masyarakat desa hanya merupakan sekelompok dari keluarga-keluarga kecil, ketetanggaaan dan komunitas dari suatu unit yang relatif bebas dan tidak berkaitan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diferensiasi sosial pada masyarakat desa tidak begitu besar, karena kecilnya heterogenitas sehingga hubungan antara individu atau keluarga sangat dekat. Orang-orang dapat melakukan kontak satu sama lain. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa penduduk pedesaan mempunyai ikatan yang erat, karena struktur masyarakatnya yang sedemikian rupa sehingga membuat perbedaan-perbedaan di antara mereka tidak begitu besar. Satu hal yang paling penting bahwa mereka tidak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

6) Stratifikasi sosial (*Social stratification*)

Prinsip-prinsip kelas yang terdapat di daerah pedesaan sangat berbeda dengan di perkotaan. Terdapat empat perbedaan pokok di antara piramida sosial yang ada di pedesaan dengan di perkotaan, yaitu :

- (1) Jumlah kelas-kelas sosial di pedesaan lebih sedikit daripada di perkotaan, walaupun sesungguhnya masyarakat pedesaan sangat jauh dari pembagian kelas ini.

- (2) Perbedaan antara kelas yang satu dengan yang lainnya di pedesaan tidaklah begitu besar, sedangkan di daerah perkotaan hal ini cukup menyolok.
- (3) Jarak kelas sosial di pedesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan.
- (4) Prinsip kasta di perkotaan tidaklah sekaku seperti yang ada di pedesaan.

ad.1. Kebutuhan-kebutuhan suatu kelembagaan yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa pada umumnya dapat dikatakan seragam. Karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat pedesaan lebih banyak mengarah kepada pemenuhan kebutuhan primer, maka kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier tidak banyak menjadi pemikiran bagi mereka. Selain jumlah penduduknya relatif kecil, kondisi dan pekerjaan mereka sehari-hari sudah banyak menyita waktu. Waktu luang yang mereka miliki dapat dikatakan hampir tidak ada. Pola-pola rekreasi yang ada di pedesaan hampir tidak ada, apalagi pemikiran untuk mendirikan organisasi sebagai penyaluran bakat dan minat yang mereka miliki, baik secara profesional maupun hanya sekedar untuk bersenang-senang.

ad.2 Kalau kita amati, sesungguhnya piramida yang ada di pedesaan lebih banyak terisi oleh pembentukan kelas akibat perbedaan status sosial dibandingkan perbedaan-perbedaan lainnya, seperti kelas ekonomi dan pendidikan. Kelas-kelas atas dari piramida sosial di pedesaan biasanya dipegang oleh pimpinan-pimpinan yang karismatis, seperti lurah atau kepala desa, juga

pimpinan-pimpinan informal seperti ulama, dan mereka yang dianggap mempunyai kekuatan-kekuatan gaib.

- ad.3 Jarak sosial di pedesaan relatif sangat kecil, terutama dalam kelas ekonomi. Kehidupan masyarakat pedesaan relatif seragam dalam bidang ini. Di sini tidak ada orang yang terlalu kaya atau terlalu miskin. Demikian pula pada aspek-aspek kehidupan lainnya, relatif semuanya serba seragam, dan ditunjang oleh sistem dan pola hubungan yang erat, sehingga tidak kelihatan jarak sosial yang terlalu menyolok.
- ad.4 Walaupun perbedaan kelas di pedesaan ini tidak terasa dan tidak sekompleks seperti di perkotaan, tetapi ciri Closed Sosia Stratification lebih terasa di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh sistem nilai dan norma tertentu yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa. Penciptaan status di pedesaan lebih sering bersifat turun-temurun (ascribed status). Elastisitas perpindahan (mobilitas) status kelihatannya lebih sering terjadi di perkotaan. Hal ini disebabkan karena kriteria untuk mencapai status tersebut sudah jelas, dan sering didasarkan atas keterampilan dan kemampuan individual.

7) Mobilitas sosial

Masyarakat pedesaan dapat diibaratkan seperti “air tenang dalam sebuah sumber”, sedangkan masyarakat perkotaan seperti “air mendidih dalam ketel” (Smith, T. Lynn, 1951 : 51). Di pedesaan, anggota-anggotanya lebih kuat berkaitan dengan status sosial mereka, sedangkan di perkotaan mereka lebih sering dan lebih mudah berubah dari satu status ke status lainnya.

Banyaknya variasi dalam profesi mempermudah penduduk kota untuk berpindah status dari satu ke status yang lain. Di pedesaan perpindahan status sangat jarang terlihat. Di samping tidak adanya variasi lapangan kerja atau tingkatan status yang akan mereka capai, sikap dan keinginan mereka untuk pindah profesi kelihatannya sangat kecil. Mobilitas yang terjadi di pedesaan lebih sering berbentuk mobilitas horizontal dalam arti lain, mobilitas yang tidak memberikan peningkatan dalam strata sosial yang ada.

8) Interaksi social

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karenanya tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama (Soekanto, 1982 : 192). Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar bagi terjadinya proses-proses sosial. Interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok manusia, dan antara perorangan dengan kelompok. Sedangkan syarat untuk terjadinya interaksi sosial (Soekanto, 1982 : 195) adalah : (1) adanya kontak sosial, dan (2) adanya komunikasi. Dalam melakukan interaksi sosial tersebut, hasil yang terjadi dapat berupa proses yang integratif (penyatuan) dan proses disintegratif (pemisahan). Proses integratif terjadi apabila adanya penyesuaian antara pihak-pihak yang berinteraksi, sedangkan proses disintegrasi terjadi apabila tidak ada persesuaian.

Proses interaksi yang terjadi pada masyarakat kota dan masyarakat desa pada dasarnya berbeda. Perbedaan ini tentu saja disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi

sikap dan tingkah laku interaksi sosial dari kedua kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Perbedaan sistem interaksi sosial di perkotaan dan di pedesaan disebutkan oleh Sorokin dan Zimmerman (Smith, T. Lynn, 1951 : 56) sebagai berikut :

- a. Area kontak bagi masyarakat pedesaan lebih sempit dan lebih terbatas daripada masyarakat perkotaan. Orang-orang dan lembaga-lembaga di mana para petani melakukan kontak lokasinya relatif kecil, sedangkan di perkotaan jelas lebih besar.
- b. Totalitas kontak yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan lebih bersifat langsung (face to face), sedangkan masyarakat perkotaan lebih mempunyai hubungan tidak langsung. Hal ini dapat dilihat pada kebiasaan bahwa setiap orang di pedesaan mengenal orang lain secara baik, tanpa harus mencatat siapa nama, alamat, pekerjaan, tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan orang yang bersangkutan. Sedangkan di perkotaan adalah sebaliknya.
- c. Kontak di pedesaan lebih bersifat personal, sedangkan di perkotaan lebih bersifat impersonal.
- d. Kontak sosial yang dilakukan oleh orang-orang di pedesaan sebagian besar lebih bersifat permanen, erat, dan bertahan lama. Sedangkan kontak sosial di perkotaan lebih bersifat sambil lalu (casual), dangkal atau tidak mendalam (superficial), dan tidak bertahan lama.
- e. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, maka interaksi sosial masyarakat pedesaan kurang terdiferensiasi dan kompleks, kurang plastis (lentur),

kurang terstandarisasi, dan kurang termekanisasi di bandingkan dengan masyarakat perkotaan.

9) Solidaritas social

Pada dasarnya, pembentukan kesatuan pada masyarakat pedesaan dan perkotaan terlihat adanya perbedaan. Dengan menggunakan perbandingan yang dibuat oleh Emile Durkheim, kita dapat melihat perbedaan antara solidarita yang terjadi di perkotaan dan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan, kesatuan (unity) didasarkan atas persamaan-persamaan, yaitu kesatuan yang dihasilkan dari sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama (common traits), tujuan-tujuan yang sama, dan pengalaman-pengalaman yang relatif sama. Pada dasarnya hal ini dilandasi oleh hubungan yang bersifat informal dan tidak terikat kontrak (non contractual relationships). Sedangkan solidaritas pada masyarakat perkotaan merupakan tipe kesatuan yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan, ketidaksamaan yang timbul karena pembagian pekerjaan, spesialisasi, dan saling ketergantungan satu sama lain. Pembagian ini oleh Durkheim (Daldjoeni, 1978 : 41) diistilahkan dengan solidaritas mekanis untuk masyarakat pedesaan, dan solidaritas organis untuk masyarakat perkotaan. Adapun derajat solidaritas tersebut oleh Sorokin, yang dikutip oleh Astrid S. Susanto, ditentukan oleh serangkaian faktor-faktor. Apabila faktor yang mengikat hanya satu, maka ia disebut Elementary Groups, sedangkan apabila faktor yang mengikat lebih dari satu, maka kelompoknya disebut Cumulative Groups. Oleh karena itu, intensitas solidaritas ditentukan oleh (1) sifat tujuan pengelompokkan, dan (2) jumlah unsur-unsur yang menjadi sebab pengikatan (Soesanto, 1977 : 135).

Kadar solidaritas ditentukan oleh jumlah faktor yang terkumpul, yang menjadi landasan terciptanya integrasi. Semakin banyak faktor yang terkumpul semakin tinggi solidaritas kelompok. Unsur-unsur tersebut dapat berupa :

- a) Marga
 - b) Pernikahan
 - c) Persamaan agama, magi, ataupun upacara-upacara keagamaan
 - d) Persamaan bahasa dan adat
 - e) Kesamaan tanah
 - f) Wilayah
 - g) Tanggung jawab atas pekerjaan yang sama
 - h) Tanggung jawab dalam mempertahankan ketertiban
 - i) Ekonomi
 - j) Atasan yang sama
 - k) Ikatan kepada lembaga yang sama
 - l) Pertahanan bersama
 - m) Bantuan bersama kerjasama
 - n) Pengalaman, tindakan, dan kehidupan bersama (Soesantoro, 1977 : 135)
- 10) Kontrol sosial (Social Control)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hidup bermasyarakat terdapat pranata-pranata sosial berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma tersebut biasanya sudah disepakati bersama, meskipun tidak tertulis. Untuk menjalankan ketertiban terhadap norma-norma tadi tentunya terdapat sanksi-sanksi sosial

yang dikenakan bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Sanksi sosial ini lebih banyak bersifat pengucilan pergaulan.

Kontrol sosial itu sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendisiplinkan para anggota kelompok dan menghindarkan atau membatasi adanya penyelewengan-penyelewengan dari norma-norma kelompok (Polak, 1979 : 146). Kontrol sosial ini semakin kuat dalam masyarakat yang mempunyai hubungan primer, langsung atau face to face. Dalam kelompok semacam ini setiap individu amat mementingkan pendapat para anggota yang lain, sehingga ketergantungan setiap anggota terhadap kelompok begitu besar.

Dengan melihat fungsi dan operasionalisasi kontrol sosial ini, dapatlah dikatakan bahwa pada masyarakat pedesaan kontrol sosial ini masih sangat besar, sesuai dengan ciri-ciri dan persyaratan untuk efektifnya kontrol sosial tersebut, yaitu hubungan yang erat satu sama lain dan bersifat personal. Di pedesaan, orang akan bertindak sesuai dengan keinginan orang banyak, sehingga dirasakan sangat tidak pantas apabila tindakan seseorang hanya dipertimbangkan atas keuntungan pribadi yang akan diperolehnya. Kuatnya kontrol sosial ini menurut Dwight Sanderson (1942 : 639) disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu ialah :

- a. Stabilitas dan solidaritas yang kuat di kalangan keluarga petani, dan adanya kenyataan bahwa para anggotanya hampir semua mempunyai usaha yang sama.
- b. Besarnya kekuatan kelompok kekerabatan, seperti yang kita pahami bahwa kebanyakan petani tidak akan bergerak jauh dan mereka lebih dipengaruhi oleh ikatan desa mereka.

- c. Besarnya stabilitas hubungan-hubungan komunitas karena memiliki tempat tinggal yang lebih permanen.
- d. Saling mengenal di antara sesama penduduk.

C. Otonomi Desa

Otonomi daerah merupakan bentuk perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Saat ini desentralisasi tidak hanya menjadi wacana di kalangan akedemi dan praktisi, tetapi saat ini sudah diketahui oleh sebagian warga masyarakat Indonesia.

Otonomi daerah tidak hanya dipahami sebatas pemisahan secara fisik operasi sebuah organisasi terhadap kantor-kantor yang dimiliki di tingkat lokal, akan tetapi desentralisasi lebih dikaitkan dengan delegasi atau devolusi dari sejumlah besar otoritas pembuatan keputusan kepada pemerintah yang paling bawah.

Pelaksanaan desentralisasi telah memberi ruang dan peluang bagi hidup dan dianutnya kembali norma-norma adat. Desentralisasi juga telah membuka kemungkinan untuk menggali kembali kearifan-kearifan lokal yang selama ini ditindas dan dinafikkan keberadaannya. Langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan mengaktifkan kembali peran lembaga adat dan penertiban peraturan yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Landasan pemikiran pengaturan desa menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah ; keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Maksudnya keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Kemudian berbicara mengenai otonomi desa yang juga merupakan bagian atau konsekuensi dari sistem pemerintahan yang

desentralisasi, tidak akan pernah bisa dipisahkan dari pemahaman mengenai konsep desa dalam pemahaman yang menyeluruh.

Dasar desentralisasi desa adalah asal-usul dan kondisi budaya masyarakat, sehingga otonomi desa dapat diartikan sebagai penyerahan kembali kewenangan mengurus desa kepada masyarakatnya atau lebih dikenal dengan istilah otonomi asli.

Sedangkan otonomi desa adalah kewenangan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa diri berdasarkan aspirasi masyarakat desa (demokratisasi) dan hal asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat.

Pemahaman mengenai otonomi desa ini menyangkut masalah etika dalam kaitannya dengan hubungan politik di desa, prinsip kesetaraan dan perilaku yang dilandaskan pada peraturan yang disepakati bersama.

Untuk itu tindakan yang bisa didorong untuk membangun demokrasi adalah adanya keteladanan dari pemimpin, kepastian hukum dan pendidikan demokrasi sejak dini secara formal atau informal dan pentingnya pendidikan dalam keluarga.

D. Demokratisasi Pemerintahan Desa

Demokratisasi mengandung makna adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi diterapkan dalam konteks desa berarti adanya keterlibatan dari masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan di desanya. Sedangkan makna dari aspirasi masyarakat bisa dipahami aspirasi yang langsung muncul dari masyarakat dan atau proses penyerapan aspirasi dengan keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, elit yang bisa mewakili aspirasi masyarakat dalam lembaga perwakilan yang

berwenang membuat kebijakan publik. Setiap anggota masyarakat di tingkat lokal sebenarnya punya semangat demokrasi, meskipun tidak selalu dinamakan demokrasi. Banyak nilai-nilai demokrasi yang berkembang di desa, secara umum prinsip demokrasi desa meliputi :

- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Pengakuan kemajemukan (gender, etnis, religi adat dan hak ulayat)
- Semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
- Semangat transparansi dan akuntabilitas
- Kebiasaan musyawarah mufakat

Dengan persepsi yang sama bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang menjangkau keterlibatan seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat. Untuk mewujudkannya maka keterlibatan aktor-aktor di tingkat lokal merupakan syarat mutlak. Sedangkan aktor-aktor yang harus dilibatkan dalam proses demokrasi di desa antara lain adalah : kepala desa, tokoh adat, pengusaha lokal. Politisi di tingkat lokal, tokoh masyarakat, termasuk masyarakat adat, kelompok perempuan, kelompok profesi (petani, buruh pedagang dsb) yang ada di desa tersebut.

Yang perlu dipertegas bahwa demokrasi yang dikembangkan oleh masyarakat desa harus didasarkan pada karakter dan hukum adat dalam masyarakat tersebut, karena substansi dari otonomi desa adalah keberagaan atau dengan kata lain, adanya jaminan terhadap pluralitas setiap kelompok masyarakat dan adanya kewenangan desa untuk menangani urusan yang secara asli menjadi kewenangannya. Dalam merumuskan otonomi desa harus melibatkan masyarakat, dengan mengakui adanya nilai dan kearifan lokal, lembaga yang ada di desa, mekanisme dan hukum asli desa atau adat.

E. Masyarakat

Definisi masyarakat menurut Selo Soemardjan: Orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.

Unsur-unsur mengenai masyarakat :

1. Masyarakat yang hidup bersama
2. Bersama untuk waktu yang cukup lama
3. Sadar merupakan suatu kesatuan
4. Merupakan suatu sistem hidup bersamadengan segala konsekwensinya

Karakteristik Masyarakat Desa

Karakteristik kehidupan masyarakat desa terutama nampak dengan adanya tata masyarakat dan ekonomi pertanian yang membedakan dengan tata masyarakat kota. Secara umum dapat dikemukakan bahwa perbedaan utama antara kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat desa adalah dalam tuntutan kebutuhan dalam usaha-usaha memenuhi kebutuhan hidup.

Pada umumnya keluarga petani dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam melengkapi keperluan hidupnya. Mereka memproduksi pangannya sendiri, sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang esensiil lainnya seperti sandang, peralatan dan lain-lain. Di daerah pedesaan kegiatan masyarakat sangat didominir oleh kegiatan pertanian atau perikanan. Dengan kata lain susunan masyarakatnya merupakan satuan yang bersifat lebih homogen dibanding dengan masyarakat di daerah perkotaan yang bersifat heterogen.

Pada umumnya keadaan masyarakat di desa bila dilihat dari segi sosial mempunyai sifat yang statis. Apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara ,musyawarah, karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama anggota warga desa sehingga seseorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat ia hidup serta rela berkorban demi masyarakatnya, saling menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam masyarakat terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama. Adapun yang dijadikan ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut.

- a. Setiap warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-batas wilayahnya.
- b. System kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau *Paguyuban*).
- c. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Adapun pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sampingan sebagai pengisi waktu luang.
- d. Masyarakatnya homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa:

1. Adaptasi yang kuat terhadap lingkungan alamnya.
2. Rendahnya tingkat inovasi masyarakat.
3. Kepribadian masyarakat dengan filsafat hidup organis.
4. Pola kebiasaan hidup yang lamban.
5. Tebalnya kepercayaan terhadap takhayul.
6. Kebudayaan material yang bersahaja.
7. Rendahnya kesadaran akan waktu.
8. Bersifat praktis.
9. Standar moral yang kaku.

Pola Pertanian dan Bertani

Pola pertanian dipengaruhi oleh bentuk desa antara lain:

1. Pra-desa, pemukiman sementara (berpindah).
2. Swadaya (sedenter), sudah ada keluarga tertentu yang menetap, tetapi: Masih tradisional, Teknologi pertanian rendah, Pendidikan belum berkembang
3. Swakarya, tatanan kehidupan sudah mulai mengalami perubahan.
4. Swasembada, merupakan pola desa yang paling baik, masyarakatnya sudah maju.

Salah satu pola pertanian adalah pola pertanian daerah rawa dengan sifat:

- Perkampungan berpusat ditepi sungai.
- Sumber kehidupan utama perikanan.
- Bentuk perkampungan.
- Tipe sawah pasang surut.

F. Peasant dan Subsistensi

Peasant diidentikan dengan petani kecil.

Definisi :

1. Eric R. Wolf: peasant adalah petani yang mengerjakan tanah pertanian secara efektif bukan sebagai bisnis.
2. Raymond Firth : Peasant adalah petani yang mengusahakan usahatani dengan skala kecil, teknologi sederhana, subsisten dan nafkah hidup utamanya dari mengolah tanah.

Ciri-ciri umum peasant :

1. Petani produsen subsisten.
2. Cenderung pedesaan dan tradisional.
3. Jarang yang kebutuhannya sendiri sepenuhnya tercukupi.

Subsistensi :

1. Cara hidup yang minimalis (utk tk. Hidup).
2. Usaha yang dilakukan cenderung untuk sekedar hidup (utk. produksi).
3. Derajat komersialisasi rendah.
4. Semua produksi yang dihasilkan utk. dikonsumsi
5. Tidak ada pengguna, penghasil dan pelayanan dari luar.

Studi tentang peasan masih menarik karena ;

1. Jumlah peasan didunia masih sangat banyak dibandingkan dengan petani modern (agricultural entrepreneur).
2. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.
3. Revolusi dan ketidakstabilan yang berpangkal pada peranan/ pengaruh peasan.

Peasan dapat dilihat dari sudut pandang :

1. Fenomena kultural : peasan sebagai way of life.
2. Fenomena struktural :
 - Sempitnya pemilikan & penguasaan lahan
 - Tingkat kemiskinan & kebodohan yg tinggi.
 - Struktur politik dan ekonomi yang kurang mendukung sektor pertanian.

Penyebab rendahnya tingkat inovasi peasant :

1. Kurang berani mengambil resiko.
2. Penerapan teknologinya kurang tepat guna.
3. Rendahnya pengetahuan teknis dan sumberdaya.

Ciri-ciri peasantry menurut Everett M. Rogers :

1. Tidak mudah percaya satu dg yang lain.
2. Terbatasnya pandangan segala sesuatu didunia mengenai fisik dan non fisik.

3. Sikapnya kontroversial tetapi juga tergantung terhadap pemerintah.
4. Familiisme : ikatan keluarga yang erat.
5. Rendahnya inovasi.
6. Fatalisme : rendahnya kemampuan perorangan untuk mengendalikan masa depan
7. Tingkat aspirasi rendah.
8. Kurang terbiasa menanggukuhkan kepuasan
9. Pandangan yang sempit terhadap dunia.
10. Empati yang rendah.

Ciri no.1 untuk Indonesia tidak berlaku, karena kuatnya sifat gotong royong.

Peasan dan pola budaya masyarakat desa di Indonesia

Petani Indonesia terbagi menjadi :

1. Petani Jawa, merupakan petani sawah dan banyak memenuhi kriteria peasan.
2. Petani Luar Jawa, merupakan petani ladang dan perkebunan.

Petani perkebunan terdiri dari ;

1. Petani tradisional, perkebunan rakyat.
2. Petani modern, orientasi usaha pada keuntungan, pekerja bukan peasan tetapi buruh.

Petani sawah di Jawa pedalaman peasantrynya lebih kelihatan karena:

1. Tanahnya subur.
2. Eksistensi kraton sebagai pusat kekuasaan yang kuat, sehingga kadang2 menciptakan sistem feodalisme.
3. Eksisnya budaya subsistensi.
4. Hubungan yang intensif antara peasan dan kekuatan supra desa.

Dualisme ekonomi Indonesia menurut Boeke :

Pertanian Indonesia dibagi menjadi dua :

1. Perkebunan, yang merupakan jalur kapitalisme dan modern.
2. Petani sawah, ciri2 peasan melekat, tidak mengalami perkembangan, dan jumlah penduduk bertambah pesat.

Aspek kultural :

1. Peasan dominan di Jawa.
2. Cultural focus dengan agama/kepercayaan sebagai elemen pokok.
3. Adat istiadat atau tradisi diidentikkan dengan budaya bagi masyarakat kelompok kecil.

Pola budaya desa (Wartheim)

1. Sebagian besar Jateng dan Jatim, pola desanya adalah petani dengan lahan sawah. Petani disini mempunyai sifat tertutup, statis dan kurang berorientasi pada keuntungan.
2. Sepanjang pantai, daerah berkembang dan kota pelabuhan. Penduduk daerah pantai lebih terbuka dan cenderung berkembang.
3. Daerah pedalaman dengan pertanian ladang, masyarakatnya kurang dapatmengadopsi program dengan baik.

Pola kebudayaan masyarakat desa berdasar faktor integrasi :

1. Ikatan darah, sifat-sifatnya :
 - Adat-istiadat/tradisi jelas dan kuat.
 - Sistem kekerabatan yang jelas.
 - Masyarakat desanya disebut masyarakat seturunan.
2. Ikatan daerah, sifat-sifatnya :
 - Adat-istiadat kurang kuat.
 - Tidak terjalin hubungan kekerabatan.
 - Lebih banyak terdapat di Jawa.

PENGERTIAN DAN FUNGSI KEBUDAYAAN

A. Pengertian Kebudayaan

Dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan merupakan hal yang sangat diperlukan. Setiap masyarakat betapa pun sederhananya masyarakat tersebut pasti memiliki kebudayaan. Kebudayaan bagi masyarakat pendukungnya merupakan pedoman dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki kebudayaan. Apakah sesungguhnya kebudayaan itu? Dalam menjelaskan pengertian kebudayaan, para ahli memberikan bermacam-macam rumusan definisi. Menurut Koentjaraningrat (1996 : 72) kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.

Pengertian kebudayaan yang berbeda adalah dari Goodenough. Menurut Goodenough (dalam Keesing, 1989) kebudayaan sering diartikan dalam dua arah pengertian yang berbeda, yaitu pola untuk perilaku dan pola dari perilaku. Oleh karena itu kebudayaan sering diartikan dalam dua pengertian yang berbeda : pertama, pola kehidupan suatu masyarakat yang mencakup kegiatan dan pengaturan material dan sosial yang berulang secara teratur yang merupakan kekhususan suatu kelompok manusia tertentu; kedua, kebudayaan merupakan sistem pengetahuan dan kepercayaan yang

disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan, dan memilih di antara alternatif yang ada

Dalam kajian ahli-ahli antropologi, sebagaimana dinyatakan oleh Carol R. Ember dan Melvin Ember (dalam Ihromi, T.O, 1986), kebudayaan mempunyai beberapa ciri, di antaranya adalah kebudayaan merupakan hasil proses belajar. Hal ini berarti kebudayaan bukan hasil transmisi biologis. Perilaku budaya menunjukkan ada perbedaan antara manusia dan binatang. Perilaku binatang semuanya digerakkan oleh naluri atau insting, tetapi perilaku manusia digerakkan oleh pikiran. Walaupun ada sebagian perilaku yang tidak dihasilkan oleh pikiran tetapi perilaku tersebut mempengaruhi kebudayaan. Sebagai contoh kebutuhan makanan bukan kebudayaan tetapi bagaimana cara manusia mendapatkan makanan dan apa yang akan dimakan ada hubungannya dengan dan mempengaruhi kebudayaan. Hal itu melahirkan cara masyarakat mendapatkan makan mengalami perkembangan dan kemajuan sehingga pola makan manusia menjadi beragam.

Hal itu berbeda dari binatang yang perilaku makan lebih digerakkan oleh insting. Perilaku tersebut bersifat mengikuti apa yang diwariskan oleh pendahulunya. Oleh karena itu binatang yang sejenis memiliki cara makan yang sama dengan binatang yang lainnya.

Lebih lanjut Carol R. Ember dan Melvin Ember mengemukakan bahwa kebudayaan mengandung sistem simbol. Melalui sistem simbol maka kebudayaan manusia menjadi berkembang. Hal itu erat kaitannya dengan sifat manusia yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa simbolis. Bahasa simbolis memungkinkan manusia dapat mewariskan dan mengembangkan kebudayaan.

Tanpa berkembangnya bahasa yang simbolis manusia sulit dapat mewariskan kebudayaan. Melalui kemampuan menggunakan bahasa simbolis maka manusia menjadi sangat praktis dalam memberikan pengetahuan kepada orang lain. Sebagai contoh orang tua dalam upaya menggambarkan harimau kepada anaknya tidak harus mendatangkan binatang tersebut, melainkan cukup dengan foto, gambar atau simbol-simbol lainnya.

Selanjutnya kebudayaan juga dicirikan oleh pemilihan bersama oleh sebagian atau semua warga masyarakat. Ciri tentang cara hidup yang hanya milik perorangan tidak termasuk kebudayaan. Oleh karena itu seseorang seringkali memiliki ciri bersama tertentu dengan orang lain yang masih satu bangsa atau bahkan berbeda. Ciri bersama itu dapat berupa kebiasaan masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Ciri tersebut terlihat dalam interaksi dengan masyarakat lain. Sebagai contoh orang Jawa dalam pandangan masyarakat lain dianggap memiliki ciri yang sama tertentu dalam kebiasaan menyelenggarakan selamatan-selamatan terkait dengan upacara lingkaran daur hidup, memiliki ciri dalam memberi nama biasanya banyak yang menggunakan lambang bunyi “o” seperti nama Setyo Yuwono, Irianto, Mardiyanto dan lain-lain.

Dengan demikian kebudayaan adalah pola berpikir dan pola-pola berkelakuan yang dimiliki suatu masyarakat dan diperoleh melalui belajar. Berdasarkan pengertian tersebut kebudayaan tidak digunakan untuk menunjuk pada perilaku berdasarkan variasi perorangan secara terpisah-pisah. Namun, kebudayaan dapat diartikan sebagai pola umum perilaku dari variasi-variasi perorangan. Jika terdapat berbagai variasi pola perilaku perorangan yang terdapat dalam masyarakat, maka yang diartikan kebudayaan

adalah variasi-variasi perorangan yang telah diterima oleh sebagian besar warga masyarakat.

B. Kebudayaan Sebagai Pedoman Hidup

Penjelasan tentang kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup antara lain dikemukakan oleh Harsya W. Bachtiar. Kebudayaan mengandung antara lain nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan sumber aturan dan merupakan pedoman hidup bagi suatu masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya sehingga kehidupan masyarakat menjadi teratur. Oleh karena itu dalam suatu kebudayaan yang sama terdapat banyak pemikiran, sikap, dan tindakan yang sama diperlihatkan oleh warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Sebagai contoh apa yang sering kita lakukan ternyata juga sering dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. Jika kita bertamu ke rumah seseorang kita akan mengetuk pintu atau membunyikan bel rumah, maka hal itu juga sering dilakukan oleh orang lain ketika mereka bertamu. Ketika ada seorang Jawa bertemu dengan orang yang lebih tua, ia menunjukkan sikap hormat dengan menggunakan bahasa kromo inggil (bahasa Jawa halus), maka hal itu juga dilakukan oleh orang Jawa lainnya. Harsya mengatakan bahwa pemikiran yang kita wujudkan kebanyakan bukan merupakan pemikiran khusus kita sendiri. Kebanyakan pemikiran kita sendiri atas unsur-unsur budaya yang kita peroleh dari pengalaman hidup kita di tengah masyarakat dan melalui pendidikan. Banyak unsur-unsur kebudayaan telah menjadi pengatur pemikiran kita, sikap kita dan tindakan-tindakan kita (Bachtiar, Prisma, 1979).

Dalam kaitan ini Harsya Bachtiar juga menjelaskan bahwa dalam jangka waktu yang amat panjang masing-masing sukubangsa mengembangkan kebudayaan tersendiri yang diperoleh dari pengalaman hidup nenek moyang mereka dan diwariskan generasi

berikutnya secara turun temurun sehingga membentuk kebudayaan suku bangsa yang ada saat ini. Kebudayaan suku bangsa mencakup berbagai unsur kehidupan, seperti bahasa, organisasi sosial, kepercayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, peralatan hidup, dan mata pencaharian.

Selanjutnya tiap-tiap warga masyarakat mewariskan kebudayaannya kepada generasi penerus mereka melalui proses-proses internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi. Pewarisan kebudayaan menyebabkan suatu kebudayaan menjadi bersifat lestari dalam masyarakat. Pewarisan kebudayaan oleh suatu generasi kepada generasi penerusnya dalam masyarakat dimaksudkan agar kehidupan mereka terselenggara dengan teratur dan berkelanjutan. Dengan pewarisan kebudayaan tersebut maka suatu kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bersama oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai pedoman hidup, kebudayaan berfungsi menjadi acuan warga masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakannya. Oleh karena mereka mengacu pada pedoman bersama maka warga dari masyarakat yang sama dapat memahami arah pikiran, sikap dan tindakan serta mengenali makna dari hasil-hasil karya dari warga yang menjadi pendukung kebudayaan yang sama. Terbentuknya pemahaman di antara warga dalam mengembangkan interaksi sosial menjadikan kehidupan suatu masyarakat dapat terselenggara.

Pemahaman bahwa kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup bagi pendukungnya mengandung arti pula bahwa tindakan warga masyarakat tertentu harus dilihat dalam kerangka kebudayaannya. Hal itu memunculkan pemikiran ahli-ahli antropologi berpendapat bahwa kebudayaan itu memiliki sifat relatif atau ada kenisbian kebudayaan.

Suatu tindakan warga masyarakat dari pendukung kebudayaan tertentu dipandang oleh pendukung kebudayaan yang lain secara berbeda. Upacara slametan bagi masyarakat berkebudayaan Jawa merupakan hal yang dipandang sangat penting, tetapi bagi masyarakat Amerika mungkin tidak punya arti penting bahkan mungkin dinilai pemborosan.

C. Unsur dan Wujud Kebudayaan

Pengertian kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan sosial mencakupi hampir seluruh aktivitas manusia. Sebab, hanya sedikit saja aktivitas manusia yang tidak didasarkan pada pemikiran yaitu beberapa reflek yang berdasarkan naluri. Padahal perbuatan makan yang termasuk memenuhi kebutuhan naluri juga telah disertai dengan perilaku kebudayaan.

Oleh karena konsep kebudayaan memiliki pengertian yang luas maka kebudayaan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur kebudayaan yang pertama disebut sebagai unsur kebudayaan universal. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur kebudayaan yang sudah pasti dapat ditemukan di seluruh masyarakat di dunia baik yang bersifat sederhana maupun kompleks.

Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup dan sistem teknologi. Ketujuh unsur tersebut masing-masing dapat dipecah ke dalam sub unsur-unsurnya.

Sistem religi merupakan sistem keyakinan dan ritus-ritus yang terwujud dalam kehidupan masyarakat. Sistem keyakinan tersebut tidak dilihat dari segi ajaran suatu agama sebagaimana terdapat dalam kitab suci melainkan sebagaimana dipahami dan dilaksanakan oleh pengamat agama.

Sistem kemasyarakatan mencakup sistem yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam satu sistem tertentu. Hubungan-hubungan sosial menyangkut hubungan yang terdapat organisasi-organisasi primer maupun sekunder. Organisasi primer adalah organisasi kekerabatan dan organisasi sekunder adalah dalam kelompok, perkumpulan dan lembaga-lembaga sosial.

Sistem pengetahuan merupakan pengetahuan yang dimiliki manusia dalam suatu masyarakat. Sistem pengetahuan meliputi pengetahuan non ilmiah maupun pengetahuan yang bersifat ilmiah. Pengetahuan suatu masyarakat termasuk pula yang diwarisi dari generasi terdahulu maupun yang diperoleh dari belajar di lembaga-lembaga pendidikan.

Bahasa atau sistem komunikasi yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi di antara mereka dalam suatu masyarakat. Bahasa mencakup bahasa yang bersifat tulisan maupun lisan serta isyarat.

Sistem kesenian merupakan unsur kebudayaan yang menyangkut aspek seni atau keindahan dalam kehidupan suatu masyarakat. Seni mencakup seni lukis, seni suara, seni pahat, seni gerak, seni patung dan sebagainya.

Sistem pencaharian hidup disebut juga sistem ekonomi. Sistem ini merupakan unsur kebudayaan yang berkaitan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka yang menyangkut kebutuhan barang-barang. Sistem mata pencaharian hidup mencakup pada masyarakat tradisional maupun dalam masyarakat modern.

Unsur kebudayaan sistem teknologi merupakan unsur kebudayaan yang berkaitan dengan peralatan hidup. Sistem peralatan hidup yang dimaksud mulai dari tempat tinggal, alat pengangkutan, alat mempertahankan diri, alat-alat untuk menempatkan sesuatu dan lain-lain.

Kebudayaan juga memiliki wujud yang paling sedikit ada tiga wujud, yaitu wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan-peraturan; wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan yang pertama bersifat abstrak. Kebudayaan ideal sering disebut adat atau tata kelakuan. Kebudayaan ideal berfungsi mengatur, mengendalikan dan memberi arah pada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Adat dapat digolongkan dari yang paling abstrak sampai yang paling kongkrit, yaitu sistem nilai budaya, norma-norma dan sistem hukum, dan peraturan-peraturan yang bersifat khusus mengenai berbagai aktivitas manusia sehari-hari.

D. Perubahan Kebudayaan

Kebudayaan dalam perkembangannya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dan tiap kebudayaan berbeda-beda kuat lemahnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Ada faktor tertentu yang sangat kuat mempengaruhi kebudayaan tertentu tetapi di tempat lain faktor tersebut tidak membawa pengaruh dan mungkin ada yang di daerah lain faktor tersebut berpengaruh kuat tetapi tidak berpengaruh di daerah lain lagi.

Di Jawa, Sumatera dan Madura, Agama Islam berpengaruh pada kebudayaan-kebudayaan sebagian besar masyarakat, tetapi tidak banyak pengaruhnya pada masyarakat di Bali. Sebaliknya agama Hindhu di Bali sangat kuat pengaruhnya pada kebudayaan sebagian besar masyarakat Bali tetapi kurang terasa pengaruhnya di Sumatera dan sebagainya.

Di daerah pantai, kebudayaan masyarakat dipengaruhi oleh mata pencaharian mereka yang pada umumnya terkait dengan kegiatan nelayan. Di tempat lainnya, di bukit, kebudayaan masyarakat oleh mata pencaharian bertani cocok tanam sayuran.

Di beberapa tempat seperti di sekitar daerah pesisir masyarakat sering berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain sehingga menimbulkan kontak kebudayaan tertentu dengan kebudayaan lain. Hal-hal seperti itu menyebabkan kebudayaan dalam perkembangannya mengalami perubahan dan menjadi beraneka ragam kebudayaan.

Penjelasan tentang perubahan kebudayaan diantaranya dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1986). Dalam penjelasannya Parsudi Suparlan mengemukakan bahwa perubahan kebudayaan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besar faktor tersebut dapat digolongkan menjadi faktor dari dalam dan faktor dari luar. Perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh faktor dari dalam misalnya karena pertumbuhan penduduk, sumber-sumber pencaharian dan peniruan oleh suatu generasi terhadap generasi sebelumnya yang disertai dengan penyempurnaan-penyempurnaan.

Faktor perubahan yang berasal dari luar adalah yang disebabkan oleh proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan (diffusi). Perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar seringkali menimbulkan gejala kebudayaan lainnya dalam bentuk akulturasi dan inovasi dan biasanya berlangsung lebih cepat. Perubahan yang disebabkan oleh faktor dari luar juga sering bersifat lebih menyeluruh.

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah gejala perubahan kebudayaan dalam bentuk akulturasi dan inovasi. Dalam menjelaskan konsep perubahan kebudayaan Koentjaraningrat menunjukkan tentang konsep-konsep perubahan kebudayaan yang terkait dengan

jalannya akulturasi, di antaranya dari pemikiran R. Linton tentang bagian kebudayaan yang sukar dan yang mudah merubah.

Keontjaraningrat (1990) menjelaskan bahwa menurut Linton kebudayaan dapat dibedakan menjadi bagian inti (*covert culture*) dan bagian perwujudan luarnya (*overt culture*). Bagian yang termasuk inti kebudayaan adalah : (1) sistem nilai budaya, (2) keyakinan-keyakinan agama, (3) adat kebiasaan yang dipelajari sejak dini, (4) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjarig luas dalam masyarakat. Adapun bagian lahir kebudayaan adalah kebudayaan yang bersifat fisik.

Bagian inti kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang sukar berubah, sedangkan bagian luar kebudayaan adalah bagian yang tergolong mudah berubah. Hal itu dapat dilihat dari berbagai contoh yang terdapat dalam masyarakat. Perubahan yang terkait dengan kebudayaan fisik, seperti bentuk bangunan rumah, mode pakaian, perabotan rumah dan lain-lain akan cepat berubah dibandingkan dengan nilai-nilai budaya dan keyakinan-keyakinan suatu masyarakat. Di berbagai masyarakat, gejala penerimaan unsur-unsur kebudayaan fisik dalam waktu singkat dapat berlangsung dalam waktu yang singkat.

Sebaliknya gejala kebudayaan yang bersifat nonfisik seperti nilai budaya akan mengalami perubahan dalam waktu yang relatif sama. Nilai budaya yang memandang pentingnya tradisi ritus-ritus “selamatan” pada masyarakat pedesaan di Jawa cenderung akan terus bertahan meskipun telah berganti-ganti generasi. Demikian pula nilai budaya yang memandang pentingnya tradisi nyumbang dalam masyarakat akan terus bertahan dan lestari di tengah masyarakat.

Foster juga menjelaskan pola akulturasi yang terjadi pada masyarakat petani bila suatu kebudayaan mendapatkan pengaruh

unsur kebudayaan asing, sebagai berikut: hampir semua proses akulturasi mulai dalam golongan atasan di perkotaan lalu menyebar ke golongan yang lebih rendah di pedesaan, perubahan ekonomi hampir selalu menimbulkan perubahan dalam asas-asas kehidupan kekerabatan, pola ekonomi ekspor dan uang selalu merusak sendi-sendi ekonomi gotong royong dan karena itu berkembang sistem pengerahan tenaga kerja yang baru, ekonomi uang juga mengubah kebiasaan makan dengan segala akibatnya baik gizi, kesehatan maupun dampak sosialnya, proses akulturasi yang cepat menyebabkan perubahan dalam berbagai unsur dan sektor secara tidak seragam sehingga menimbulkan keretakan pada masyarakat, dan nasionalisme dianggap sebagai salah satu tahap dalam proses akulturasi.

Gejala perubahan kebudayaan melalui inovasi dijelaskan antara lain oleh Hommer Barnett. Menurut L. Bee (1974), ia dianggap sebagai sarjana yang sistematis dalam menjelaskan tentang proses-proses inovasi. Penjelasan Barnett diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana unsur-unsur asing dapat tergabung ke dalam sistem sosial yang ada. Dalam penjelasannya Barnett sampai pada simpulan: unsur-unsur asing masuk ke dalam suatu sistem sosial budaya adalah apabila unsur-unsur kebudayaan yang mencakup bentuk, fungsi, dan prinsip-prinsip pelaksanaannya dapat dimodifikasi oleh masyarakat penerima; kedua, proses modifikasi dan penggabungan adalah berdasarkan proses mental yang terjadi dalam pikiran perseorangan. Dengan demikian perubahan pokok dalam perubahan kebudayaan, bagi Barnett adalah perubahan dalam pikiran.

Barnett juga menjelaskan bahwa proses inovasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu analisis, identifikasi dan substitusi. Proses tersebut menurut Barnett berlangsung cepat, kompleks dan seringkali

terjadi di bawah alam sadar. Barnett juga menunjukkan selain itu proses ini berjalan di dalam kepala setiap individu dan unit dasarnya ide-ide atau konfigurasi mental, bukan hal-hal yang material.

Pemikiran lain dari Barnett adalah masalah penerimaan inovasi yaitu dimana unsur-unsur yang masuk akan dimodifikasikan oleh penerima. Barnett mendeskripsikan unsur-unsur apa yang penting dalam proses modifikasi dari perspektif individu maupun dari inovator. Dalam penjelasannya itu Barnett mengemukakan : pertama, inovasi harus mempunyai arti penting; kedua, inovasi harus memberikan keuntungan baik bagi penerima inovasi maupun bagi inovator. Apabila kedua kondisi itu tidak ada maka menurut Barnett, inovasi akan ditolak.

E. Kebudayaan dan Sikap Mental

Kaitan antara kebudayaan dan mentalitas dapat dilihat pada kasus masyarakat Indonesia dilihat dari sudut pandang pembangunan. Kaitan antara kebudayaan dan mentalitas pada masyarakat Indonesia dilihat dari sudut pandang pembangunan dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1985 : 37-48) sebagai berikut :

Dilihat dalam kaitannya dengan pembangunan terdapat mentalitas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan pembangunan. Mentalitas bangsa Indonesia yang dimaksud adalah konsepsi-konsepsi dan pandangan-pandangan terhadap lingkungan yang sudah lama mengendap karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya dari generasi terdahulu. Mentalitas tersebut dalam hal ini dilihat kaitannya dengan sistem nilai budaya sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pikir Kluckhohn, tentang orientasi nilai budaya yang pada hakekatnya mencakup lima hakekat hidup.

Pertama, mentalitas bangsa Indonesia (khususnya Jawa) dilihat kaitannya dengan nilai budaya tentang hakekat hidup dan karya

manusia. Dilihat dari sisi ini petani dan priyayi keduanya memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah keduanya tidak memiliki orientasi berprestasi.

Dilihat dari kaitannya dengan persepsi manusia mengenai waktu, petani dan priyayi juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah mereka tidak memiliki orientasi ke masa depan yang kuat. Orientasi kehidupan petani didominasi ke arah masa kini dan priyayi didominasi oleh orientasi ke masa lampau.

Dilihat kaitannya dengan masalah hakekat hubungan dengan alam, petani menunjukkan cara hidup yang tidak tunduk dan tidak pula menguasai alam, tetapi selaras dengan alam. Golongan priyayi lebih banyak menggantungkan pada nasib. Kedua orientasi tersebut dipandang kurang memberikan daya dukung pada pembangunan.

Dilihat kaitannya dengan masalah hakekat hubungan manusia dengan sesamanya, pada petani menunjukkan sikap yang cenderung pada konformitas dan gotong royong. Orientasi hidup seperti itu memiliki nilai yang tinggi, tetapi kelemahannya kurang memberikan kesempatan individu untuk lebih berkembang dibandingkan yang lain.

Di kalangan priyayi, kelemahannya terdapat orientasi hidup yang mementingkan pada hubungan dengan atasan. Segi negatif orientasi hidup yang mengarah pada atasan atau senior adalah hasrat untuk mandiri akan dimatikan dan disiplin murni sering tidak berkembang karena orang bersifat taat hanya apabila dilihat atasan.

Selain kelemahan yang didapat dari generasi terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula beberapa kelemahan mentalitas yang timbul sesudah revolusi? Kelemahan tersebut adalah : sifat suka meremehkan mutu, suka menebas, tak percaya kepada diri sendiri, tak disiplin murni dan tidak bertanggungjawab.

Sifat suka meremehkan mutu menurut Koentjaraningrat timbul akibat dari cara hidup bangsa Indonesia yang tidak memiliki jiwa bersaing. Di berbagai kebudayaan suku-suku di Indonesia jiwa persaingan sekalipun ada tergolong lemah.

Sifat suka menerabas juga merupakan kelemahan dilihat dari pembangunan. Sifat suka menerabas sebenarnya sama dengan jalan paling gampang, atau jalan pintas untuk mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan-perbuatan apa saja termasuk yang dianggap kotor.

Sifat tidak percaya pada kemampuan sendiri sebagai sifat yang menghambat kemajuan. Sifat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti terlihat dari gejala orang lebih suka mendengarkan hal-hal yang disampaikan pihak asing atau luar daripada yang disampaikan oleh pihak sendiri atau dari orang Indonesia. Sifat tak percaya pada diri sendiri dianggap lebih parah pada golongan masyarakat pegawai daripada golongan masyarakat petani.

Sifat-sifat disiplin murni adalah sifat yang takut pada atasan. Meskipun sifat ini telah ada sebelum revolusi tetapi sifat ini semakin berkembang pada saat setelah Indonesia mengalami revolusi. Jika pengawasan kurang maka disiplin juga kurang dan jika pengawasan ketat disiplin juga meningkat.

Sifat tidak bertanggungjawab mungkin dikarenakan orang Indonesia menghadapi kesulitan yang berat. Untuk itu mereka sering membagi pekerjaan dan kewajiban. Sikap tidak bertanggungjawab sering terlihat dari sikap positif dihadapan umum tetapi sering di belakang mereka bersikap negatif.

F. Nilai-nilai Lokal dan Modernitas

Sejumlah nilai dapat dikatakan lokal, apabila tingkat keberkaluannya hanya meliputi sekelompok masyarakat tertentu.

Namun belum tentu nilai-nilai itu tidak relevan dengan sejumlah nilai yang berlaku di luarnya. Para pendahulu kita telah menggunakan kecerdasannya untuk melahirkan budaya dan nilai-nilai itu. Karenanya banyak di antara nilai-nilai yang disebut lokal sebenarnya relevan dengan nilai di level regional, nasional dan global.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada masyarakat dan pemerintah di daerah untuk membangun dirinya agar lebih baik, nilai-nilai lokal ini sangat bermanfaat untuk menggali dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

Kecenderungan sejumlah nilai yang berlaku di lingkup masyarakat tertentu adalah (1) bertahan dan mampu mengantisipasi pengaruh luar, (2) netral terhadap pengaruh luar, dan (3) menerima pengaruh luar dengan nilainya, kecenderungan ini sangat tergantung pada unsur manusianya. Namun demikian, memang tidak pernah ada sejumlah nilai dalam suatu kebudayaan masyarakat tertentu yang tidak mengalami percampuran, baik melalui asimilasi maupun akulturasi dan sebagainya.

Sebagai contoh, sejumlah nilai yang dianggap “tradisional” yang kampung Naga Tasikmalaya. Misalnya saja (1) dalam hal pertanian, mereka menanam bibit pare gede, dilarang menggunakan pupuk kimia, melainkan harus menggunakan opupuk organic, (2) bentuk rumah panggung, bubungan panjang, bahan kayu, bambu, ijuk, tepus, posisinya memanjang timur-barat, menghadap ke utara atau selatan, setiap ruangan memiliki fungsi etika, nilai magis, lahan perumahan milik adat, terdapat sektor bersih dan kotor, (3) pakaian adat harian terdiri dari kain pelekat, celana komprang, baju kampret, totopong. Pada saat upacara pakai jubah putih, kain pelekat, totopong, (4) organisasi kemasyarakatan terdiri dan pemangku adat, musyawarah kampung, *seuweu* putu naga atau Sa Naga, sarana

komunikasi dan solidaritas, (5) sistem kepercayaan terdiri dari sesuatu yang ditaburkan dan menggunakan pedoman hidup tradisi leluhur dan upacara adat.

Masyarakat kampung Naga telah mampu mengantisipasi masa depan sebagai akibat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, penggunaan sumber daya yang berlebihan, dan dampak polusi yang merugikan kehidupan manusia. Mereka telah mampu mengaplikasikan nilai-nilai lokalnya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga memenuhi pendekatan pembangunan modern yang meliputi pendekatan ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

Dari sisi ekonomi mereka tidak pernah kekurangan pangan, dari sisi sosial budaya mereka kukuh dengan adat dan budayanya, dan dari sisi ekologi mereka sangat memperhatikan lingkungan hidup serta pendaur ulangan polusi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dengan demikian dalam hal aplikasi nilai-nilai lokal dalam proses pembangunan, nampaknya kehidupan masyarakat Naga dapat dijadikan contoh.

Di luar masyarakat Naga, kita pun tahu banyak nilai-nilai lokal yang bermanfaat bagi pembangunan dalam proses modernisasi. Misalnya nilai keramat, tabu, rendah hati, kerja keras, gotong royong, dan lain-lain. Nilai-nilai ini harus dipertahankan dan disosialisasikan, baik secara formal maupun informal dan nonformal. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Manusia tidak dapat hidup hanya dengan mengedepankan logikanya saja, akan tetapi harus dibarengi dengan etika, estetika dan metafisika. Dalam tataran ini manusia berusaha membina hubungan baiknya dengan sesama manusia, dengan alam lingkungannya, dan dengan Yang maha Kuasa. Manusia tidak dapat hidup hanya berada pada tataran praxis, akan tetapi memerlukan simbol, konsep, prinsip, generalisasi

dan konstruktif. Ini berarti bahwa betapa pentingnya nilai-nilai dalam budayanya dipelihara dan dijunjung tinggi, terutama yang bersifat adaptif dan futuristik.

Dalam proses pembangunan bangsa yang sedang mengalami berbagai krisis seperti sekarang ini, mungkin nilai-nilai kerja keras, kreativitas, dan kemandirian perlu dikedepankan. Sebaliknya nilai-nilai “*ngedul*”, boros, dan ketergantungan pada orang lain harus dibuang jauh-jauh. Daerah Tasikmalaya adalah daerah yang kaya akan sumber daya, baik alam maupun manusia. Tidak sepatutnya kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan menimpa masyarakat ini. Solusinya tiada lain kita harus mampu merevolusi sikap mental dan menggugah sistem nilai positif agar terbebas dari kesengsaraan.

Ketergantungan terhadap orang lain, terhadap tokoh maupun pemimpin, bukanlah solusi untuk ke luar dari kesengsaraan, kita harus bangkit, disiplin, kerja keras, berusaha dan berdoa dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT.

Banyak pengalaman yang telah dicontohkan oleh bangsa lain yang miskin sumber daya alam, misalnya Jepang. Negara ini hancur di bom atom tahun 1945. Mereka tidak punya apa-apa kecuali semangat membangun. Negara kita merdeka tahun 1945, tetapi bila dibandingkan dengan Jepang yang sama-sama bangkit sejak 1945, kita ketinggalan, mungkin nilai-nilai budaya yang bersumber dari agama Islam yang kita anut sekarang ini harus sebatas simbol, sebatas lambang, tidak digali dan diaplikasikan secara optimal. Kita ini bagaikan buih di lautan, kelihatannya besar, potensi dan kuat, padahal sebenarnya lemah dan tidak punya kemampuan untuk melawan segala kemiskinan dan kebodohan.

Sebagai contoh kebudayaan yang mempunyai nilai positif dalam pembangunan pertanian, di Indonesia Bagian Timur, secara

tradisi masyarakat lio menghargai peran perempuan dalam rumah tangga sebagai penyimpan hasil panen dan penjaga lumbung (lesu usu wuni kai kebo bela) pengelola harta (towa kopa suga wuga), dan pengelola dapur (tau jila lika banga waja).

Penjaga lumbung (kebo) diartikan sebagai penjaga kehidupan keluarga atau bendahara, sehingga ungkapan adapt bahwa masyarakat Lio yang tidak memiliki kehidupan seringkali disampaikan oleh mosalaki (pemimpin adat Lio). Semua hasil panen ini disimpan untuk konsumsi keluarga, kegiatan adat, dan sosial, maupun benih. Semuanya di atur perempuan. Mereka dituntut untuk mengaturnya dengan bijaksana agar bisa memenuhi semua kebutuhan. Utamanya dalam penyediaan benih dan pelestarian benih kaum perempuan mempunyai tanggung jawab dalam system penyimpanan. (Beribe, 2007. Majalah salam no 20)

MORAL EKONOMI PETANI

A. Deskripsi

Moral ekonomi menjadi topik perbincangan yang semakin menarik akhir-akhir ini seiring dengan semakin deras arus globalisasi. Dalam kajian sosiologi, Moral Ekonomi adalah suatu analisa tentang apa yang menyebabkan seseorang berperilaku, bertindak dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dinyatakan sebagai gejala sosial yang berkemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. James C. Scott mengajukan sebuah analisa tentang kehidupan petani sedangkan H.D. Evers mengemukakan teori tentang moral ekonomi pedagang.

Terdapat dua alasan mendasar yang menyebabkan isu moral ekonomi menjadi pusat perhatian banyak kalangan.

1. Berkaitan dengan semakin intensifnya praktik *fair trade* yang menurut komitmen moral tinggi, baik di kalangan produsen maupun kalangan konsumen.
2. Praktik kehidupan sehari-hari, tidak terbatas di dunia bisnis, semakin menjauhkan sisi-sisi moralitas dalam kalkulasi ekonomi.

Perspektif ini memegang teguh prinsip ekonomi yang melandasi setiap tindakan ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan biaya yang serendah-rendahnya. Persoalan yang menyentuh moral berkaitan dengan

tindakan ekonomi yang di ambil menjadi biaya eksternal. Komitmen moral konsumen adalah dalam penggunaan hak-hak konsumen jika terdapat pelanggaran hukum maupun moral yang berkaitan dengan produksi barang.[4]

J.C. Scott menyatakan moral ekonomi sebagai pengertian petani tentang keadilan ekonomi dan defenisi kerja mereka tentang eksploitasi pandangan mereka tentang pungutan-pungutan terhadap hasil produksi mereka mana yang dapat ditolerir mana yang tidak dapat. Dalam mendefinisikan moral ekonomi, petani akan memperhatikan etika subsistensi dan norma resiprositas yang berlaku dalam masyarakat mereka. Etika subsistensi merupakan perspektif dari mana petani yang tipikal memandang tuntutan-tuntutan yang tidak dapat di letakkan atas sumber daya yang dimilikinya dari pihak sesama warga desa,tuan tanah atau pejabat.

- Etika subsistensi tersebut, menurut James Scott (1976), muncul dari kekhawatiran akan mengalami kekurangan pangan dan merupakan konsekuensi dari suatu kehidupan yang begitu dekat dengan garis batas dari krisis subsistensi. Oleh karena itu kebanyakan rumah tangga petani hidup begitu dekat dengan batas-batas substensi dan menjadi sasaran-sasaran permainan alam serta tuntutan dari pihak luar maka mereka meletakkan landasan etika subsistensi atas dasar pertimbangan prinsip *safety first* (dahulukan selamat).
- Norma resiprositas merupakan rumus moral sentral bagi perilaku antarindividu: antara petani dengan sesama warga desa, antara petani dengan tuan tanah, antara petani dengan negara.prinsip moral ini berdasarkan gagasan bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantu atau paling tidak jangan merugikan. Prinsip moral ini mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi

si penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas satu hadiah atau jasa dengan nilai yang setidaknya-tidaknya membanding di kemudian hari. Ini berarti bahwa kewajiban untuk membalas budi merupakan satu prinsip moral yang paling utama yang berlaku bagi hubungan baik antara pihak-pihak sederajat. James Scott (1976) telah meletakkan dasar stratifikasi sosial masyarakat petani atas tingkat keamanan subsistensi mereka, bukan pada penghasilan mereka. Keamanan subsistensi mereka dijamin oleh tuan tanah yang menjadi patron mereka, sedangkan lapisan terbawahnya adalah buruh. kewajiban timbal balik untuk membalas satu hadiah atau jasa dengan nilai

James C. Scott menambahkan bahwa para petani adalah manusia yang terikat sangat statis dan aktivitas ekonominya. Mereka dalam aktivitasnya sangat tergantung pada norma-norma yang ada. Penekanan utama adalah pada moral ekonomi petani yang dikemukakan oleh James C. Scott yang menekankan bahwa petani cenderung menghindari resiko dan rasionalitas.

B. Pasar Kapitalistik di Asia Tenggara mengacaukan “Moral Ekonomi”

Dalam Moral Ekonomi Petani: Pergerakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, Scott mengemukakan pertama kali teorinya tentang bagaimana “etika subsistensi” (etika untuk bertahan hidup dalam kondisi minimal) melandasi segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial mereka di pedesaan, termasuk pembangkangan mereka terhadap inovasi yang datang dari penguasa mereka. Itulah yang disebut sebagai “moral ekonomi”, yang membimbing mereka sebagai warga desa dalam mengelola kelanjutan kehidupan kolektif dan hubungan sosial resiprokal saat menghadapi tekanan-tekanan

struktural dari hubungan kekuasaan baru yang mencengkam. Tekanan struktural dari pasar kapitalistik, pengorganisasian negara kolonial dan paskakolonial, dan proses modernisasi di Asia Tenggara mengacaukan “moral ekonomi” itu dan menyebabkan kaum tani berontak.

C. Ekonomi Moral dengan Ciri Khas “Desa” dan “Ikatan Patron-Klien”

Pendekatan ekonomi-moral menunjuk “desa” dan “ikatan patron-klien” sebagai dua institusi kunci yang berperan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anggota komunitas. Fungsi operasional desa adalah menjamin suatu ‘pendapatan minimum’, dan meratakan kesempatan serta resiko hiduparganya dengan jalan memaksimumkan keamanan dan meminimalkan resikoarganya. Dalam fungsinya itu desa menerapkan aturan dan prosedur bagi terciptanya sebuah kondisi di mana warga desa yang miskin (siapa mendapatkan apa) akan tetap memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan subsisten minimum dengan cara menciptakan mekanisme kedermawanan dan bantuan dari warga desa yang kaya (siapa memberi apa). Desa akan memberikan jaminan kebutuhan subsisten minimum kepada seluruh warga desa sejauh sumber-sumber kehidupan yang dimiliki desa memungkinkan untuk melakukan itu. Institusi yang menjadi pasangan desa adalah ikatan patron-klien. Institusi ini tercipta dalam kondisi sosial-ekonomi yang timpang: ada sebagian orang yang menguasai sumber-sumber kehidupan, sementara yang lainnya tidak. Ikatan patron-klien bersifat rangkap, yang meliputi hubungan timbal-balik antara dua orang yang dijalin secara khusus (pribadi) atas dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima (Legg, 1983:10). Dalam ikatan ini pihak patron memiliki kewajiban untuk memberi perhatian kepada kliennya layaknya

seorang bapak kepada anaknya. Dia juga harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan kliennya. Sebaliknya, pihak klien memiliki kewajiban untuk menunjukkan perhatian dan kesetiaan kepada patronnya layaknya seorang anak kepada bapaknya.

Langgeng tidaknya sebuah ikatan patron-klien bergantung pada keselarasan antara patron dan kliennya dalam menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak dengan terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima. Desa dan ikatan patron-klien ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Desa berperan dalam mengatur distribusi sumber-sumber kehidupan yang tersedia di dalam desa untuk menjamin tersediannya sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan warganya, sementara ikatan patron-klien menjadi institusi yang memungkinkan terjadinya distribusi kekayaan, sumber-sumber kehidupan di dalam desa, dari si kaya kepada si miskin melalui praktik-praktik ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial di antara warga desa. Jaminan yang diberikan desa dan ikatan patron-klien tertuju pada pemenuhan kebutuhan subsisten warga desa.

Secara agak kasar, Scott (1983:4) menggambarkan perilaku subsisten sebagai usaha untuk menghasilkan beras yang cukup untuk kebutuhan makan sekeluarga, membeli beberapa barang kebutuhan seperti garam dan kain, dan untuk memenuhi tagihan-tagihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pihak-pihak luar. Intinya, perilaku ekonomi subsisten adalah perilaku ekonomi yang hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling minimal. Perilaku seperti itu tidak lahir dengan sendirinya atau sudah demikian adanya (taken for granted), melainkan dibentuk oleh kondisi kehidupan, lingkungan alam dan sosial-budaya, yang menempatkan petani pada garis batas antara hidup dan mati, makan dan kelaparan.

D. Kondisi yang Membentuk Etika Subsistensi

Sebagai kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber agraria, petani sangat rentan terhadap gangguan yang berasal dari alam, bencana, ancaman hama, cuaca dan sebagainya. Sementara sebagai warga komunitas desa, petani memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang datang dari kekuatan supradesa, pungutan pajak, upeti dan sebagainya. Kondisi yang sudah melingkupi kehidupan petani selama berabad-abad lamanya itu pada akhirnya membentuk pandangan hidup mereka tentang dunia dan lingkungan sosialnya. Pandangan hidup inilah yang memberi arah kepada petani tentang bagaimana menyiasati, bukan mengubah kondisi dan tekanan yang datang dari lingkungan alam dan sosialnya melalui prinsip dan cara hidup yang berorientasi pada keselamatan prinsip mengutamakan selamat dan menghindari setiap resiko yang dapat menghancurkan hidupnya.

Kondisi yang membentuk karakter dan ciri khas petani pedesaan sebagaimana terurai di atas telah melahirkan apa yang oleh Scott (1983:3) dinamakan “etika subsistensi”, yakni kaidah tentang “benar dan salah”, yang membimbing petani dan warga komunitas desa mengatur dan mengelola sumber-sumber kehidupannya (agraria) dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam komunitas. Dalam pilihan tindakan secara kolektif, prinsip moral menekankan : (1) Pengorbanan yang harus dikeluarkan termasuk risikonya, (2) Hasil yang mungkin diterima, bila menguntungkan maka mereka akan ikut bila tidak mereka bersikap pasif (3) Proses aksi yaitu dipertimbangkan tingkat keberhasilannya apakah lebih bermanfaat secara kolektif atau tidak, (4) Kepercayaan pada kemampuan pemimpin atau dapatkah sang pemimpin dipercaya atau tidak. Dengan demikian aksi-aksi kolektif yang dapat dinilai mendatangkan keuntungan bagi mereka saja yang diikuti atau didukung.

Ada dua perilaku ekonomi terkait penulisan scott yang dikritik popkin, yaitu:

1. Perilaku ekonomi subsisten (Scott)

Perilaku ekonomi subsisten adalah perilaku ekonomi yang hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling minimal. Perilaku seperti itu tidak lahir dengan sendirinya atau sudah demikian adanya (taken for granted), melainkan dibentuk oleh kondisi kehidupan lingkungan alam dan sosial-budaya yang menempatkan petani pada garis batas antara hidup dan mati, makan dan kelaparan.

2. Perilaku ekonomi rasional (Popkin).

Perilaku ekonomi rasional kecenderungan masyarakat petani untuk menganut pemikiran rational peasant. Seorang petani pemilik tanah yang rasional tentu akan lebih suka memperkerjakan tetangganya sendiri dengan dasar pertimbangan hubungan tolong menolong dan patron client, daripada mengambil buruh tani di pasar bebas. Akan tetapi, tidak berarti bahwa seorang pemilik tanah akan selalu tunduk kepada norma dan moral pedesaan. Semua tergantung pada situasi dan kondisi pada masa dan tempat tertentu. Meski mendapat kritik, tulisan Scott tetap menjadi sumber khas dalam penelitian moral ekonomi petani di kawasan Asia Tenggara khususnya untuk melihat etika subsistensi, sehingga mendapatkan perhatian besar dari peneliti lain (seperti: Samuel Popkin dan Sairin dkk) untuk mengkaji ulang penelitian Scott.

E. Moral ekonomi pedagang

Dalam moral ekonomi ini setuju dengan pendapat james scott (1976-176) yang menyatakan bahwa masyarakat petani umumnya

dicirikan dengan tingkat solidaritas yang tinggi dan dengan suatu sistem nilai yang menekankan tolong menolong, pemilikan bersama sumber daya dan keamanan subsistensi. Hak terhadap subsistensi merupakan suatu prinsip moral yang aktif dalam tradisi desa kecil. Dalam kondisi seperti ini pedagang menghadapi dilema yaitu memilih antara memenuhi kewajiban moral kepada kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga untuk menikmati bersama pendapatan yang di perolehnya sendiri di satu pihak dan untuk mengakumulasi modal dalam wujud barang dan uang di pihak lain. Di luar desa para pedagang di hadapkan dengan tuntutan anonim yang sering bersifat anarkis dan berasal dari pasar terbuka dengan fluktuasi harga yang liar. Pedagang cenderung terperangkap di tengah dan dalam hal ini bisa disebut sebagai tengkulak karena mereka tidak hanya menanggung resiko kerugian secara ekonomi tetapi juga resiko terhadap diskriminasi dan kemarahan petani.

Para pedagang dalam masyarakat petani telah mencoba mengatasinya dengan cara-cara mereka sendiri. Evers (1994:10) telah menemukan 5 solusi atau jalan keluar yang berbeda yang dilakukan oleh para pedagang menghadapi dilema tersebut, yaitu:

1. Imigrasi pedagang minoritas

Kelompok minoritas baru dapat diciptakan melalui migrasi atau dengan etno-genesis, yaitu munculnya identitas etnis baru. Contoh yang menarik dari pemikiran ini adalah “*pedagang kredit*” yang sebagian berasal dari suku batak dan beragama kristen yang melakukan aktivitas dagangnya di Sumatera Barat.

2. Pembentukan kelompok-kelompok etnis atau religius

Munculnya dua komoditas moral yang menekankan pentingnya kerja sama tetapi tidak keluar dari batas-batas

moral. Menurut Evers (1994:8-9) ada beberapa cara yang dilakukan agar hal ini dapat berlangsung. Satu kemungkinan, misalnya menerima suatu agama baru atau menganut sebuah agama sebagaimana yang digariskan oleh aturan-aturan yang ditentukan dengan memperlihatkan kegairahan dalam menjalankan aturan-aturan tersebut. Dan kemungkinan lain menekankan nilai-nilai budaya hingga batas menentukan identitas etnis milik sendiri. Hal ini berarti terdapat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat pedesaan Sumatera Barat dan pedagang kredit yang masing-masing memiliki komonitas moral tersendiri, yaitu agama Islam dan agama Kristen.

3. Akumulasi status kehormatan (modal budaya)

Kembali kepada studi Geertz (1963), kedermawan, keterlibatan dalam urusan masyarakat, berziarah, menunaikan ibadah haji yang dilakukan oleh santri memberi dampak kepada akumulasi modal budaya yang dimiliki. Dengan kata lain, peningkatan akumulasi modal budaya berarti peningkatan derajat kepercayaan masyarakat sehingga memudahkan pedagang untuk melakukan aktivitasnya.

4. Munculnya perdagangan kecil dengan ciri” ada uang ada barang”

Dengan mengambil fenomena pedagang bakul di Jawa, Evers melihat bahwa para pedagang bakul kurang ditundukan oleh tekanan solidaritas desa dibandingkan dengan pedagang yang lebih besar dan lebih kaya serta suka pamer. Perdagangan kecil yang diperlihatkan di atas merupakan ciri-ciri standar pada semua masyarakat petani.

5. Depersonalisasi (ketidakterlekatan) hubungan-hubungan ekonomi

Jika ekonomi pasar berkembang dan hubungan-hubungan ekonomi relatif tidak terlekat atau terdiferensiasi, maka dilema pedagang diteransformasikan kedalam dilema sosial semua pasar ekonomi

Persoalan moral ekonomi menjadi topik perbincangan yang semakin menarik akhir-akhir ini seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi.

Konsep moral ekonomi itu secara khusus menurut mella dan madsen (1991) dan block (2006) mendefinisikan moral ekonomi pertukaran ekonomi melalui sentimen-sentimen dan norma-norma moral.

Persoalan-persoalan moral ekonomiyang sering terjadi di masyarakat yaitu:

1. Seorang manajer pabrik pokok menghadapi dilema moral ekonomi antara menggunakan pilihan mekanisme pabrik sehingga mengakibatkan PHK massal atau tetap menggunakan cara produksi lama dengan risiko keuntungan yang di perolehnya tidak sebesar menggunakan mesin baru.
2. Seorang manajer pabrik gula menghadapi dilema moral antara melaksanakan ritual upacara yang dilakukan sebelum giling tebu pertama kali. Upacara tersebut merupeken tradisi yang telah berlangsung puluhan tahun dan dalam pelaksanaanya memakan biaya yang besar.
3. Segala macam bentuk suap, kolusi, korupsi, nepotisme, menipulasi dan berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang lainnya yang dilakukan pejabat berwenang. Apalagi terjadi di tengah penderitaan dan kemiskinan masyarakat sekitar

dengan tujuan memperkaya diri jelas merupakan persoalan moral selain tentunya persoalan hukum.

4. Berbagai bentuk *moral hazzard* (permanfaatan kesempatan sekecil mungkin untuk tujuan memperkaya diri atau dalam bahasa jawa sering diekspresikan dengan ungkapan) merupakan persoalan moral ekonomi. Sebagai contoh dalam kebijakan pemerintah mengenai pengurangan subsidi BBM akan dilakukan pembedaan harga bensin untuk mobil dan motor.
5. Pada 1998, sesaat telah terjadinya krisis moneter, banyak masalah sosial baru yang muncul, seperti anak jalanan.

Dengan memperbandingkan penemuan dan pendekatan oleh peneliti yang berbeda yaitu moral ekonomi petani dan moral ekonomi pedagang, maka jawaban atas pertanyaan yang di ajukan pada awal tulisan adalah reaksi yang dilakukan oleh pedagang terhadap moral ekonomi. Pada kelompok masyarakat petani, tindakan ekonomi merupakan cerminan langsung dari moral ekonomi sedangkan dari kelompok masyarakat pedagang ia merupakan kombinasi antara moral ekonomi dan kepentingan ekonomi.

PROSES DAN INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA

A. Pengertian

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, dan antara orang dengan kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi sosial terjadi apabila dalam masyarakat terjadi kontak sosial dan komunikasi. Interaksi terjadi apabila dua orang atau dua kelompok saling bertemu atau pertemuan antara individu dengan kelompok dimana komunikasi terjadi di antara kedua belah pihak. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi kontak sosial dewasa ini tidak hanya diartikan dengan hubungan fisik. Teknologi komunikasi dan informasi telah dapat mengubah bentuk kontak tidak hanya badaniah, oleh karena itu kontak sosial dan komunikasi tidak hanya diartikan sebagai pertemuan dua orang yang kemudian berkomunikasi akan tetapi lebih luas menyangkut peran teknologi. Karena keduanya yakni kontak sosial dan interaksi merupakan syarat dari proses sosial dan untuk kebutuhan pemahaman sosiologis kedepan definisi tersebut perlu untuk diperhatikan. Tanpa kedua kegiatan itu sangatlah mustahil interaksi sosial dapat terjadi (Soedjono Soekanto, 1990).

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kita mengenal banyak sekali pandangan tentang bagaimana manusia berperilaku dan bertindak serta apa yang mendorong orang melakukan kegiatan

tersebut. Kontak sosial dan komunikasi merupakan kegiatan yang terjadi tidak hanya dengan kebetulan saja. Pada beberapa kejadian kedua kegiatan itu selalu dilandasi oleh tindakan-tindakan sengaja manusia. Perilaku manusia merupakan bahasan yang menarik untuk kita simak sebelum kita memasuki bagaimana proses sosial terjadi. Hal ini penting mengingat apapun tindakan manusia mulai dari kontak dan komunikasi pasti disebabkan oleh berbagai faktor yang mendorongnya manusia, oleh karena itu pembahasan tentang teori-teori yang membahas tentang dorongan tindakan manusia ini sangatlah penting.

Interaksi sosial merupakan dasar dari proses sosial dimana proses sosial hanya akan terjadi apabila ada interaksi sosial. Interaksi sosial apabila tidak dilanjutkan dengan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak tidak akan terjadi proses sosial. Seorang pembeli baju di toko atau petani yang sama-sama membeli pupuk di toko saprodi mereka saling bertemu dan tersenyum. Akan tetapi apabila setelah masing-masing mendapatkan pupuk lalu pergi begitu saja tanpa sebuah tindak lanjut dari pertemuannya maka proses sosial tidak terjadi dan hanya terjadi kontak sosial saja. Oleh para ahli sosiologi, interaksi sosial dibedakan dalam beberapa bentuk yakni proses yang *dissosiatif* dan *ossosiatif* menurut Gillin dan Gillin (1954), oposisi (*opposition*), kerjasama (*co-operation*), dan deferensiasi (*defferensiatton*)

B. Proses dan Interaksi Sosial Masyarakat di Pedesaan

Proses dan interaksi di pedesaan dapat kita lihat dari kegiatan kerja atau mata pencaharian mereka, sistem tolong menolong, jiwa gotongroyong, musyawarah dan jiwa musyawarah (Koentjoroningrat, 1979). Ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan tersebut menjadikan desa merupakan masyarakat yang berbeda dari perkotaan yang telah dikenal ahli sosiologi sebelumnya.

Orang kota menganggap ketenangan dan ketentraman desa sebagai sebuah kondisi santai dan tidak menanggung beban yang berat atas kehidupan. Pandangan ini terpatahkan manakala kita mengamati bentuk besar beban yang harus ditanggung penduduk desa dan bagaimana mereka bekerja keras walau dengan kembalian yang tidak sebanding dengan pengorbanannya. Mereka menilai ketidak bekerja dengan serius orang desa dilihat dari intensitas pekerjaan yang dilakukan dalam saat-saat tertentu yang sangat jauh dengan kesibukan yang biasa dilihat dalam pola produksi modern. Akan tetapi apabila kita lihat curahan tenaga kerja per orang dalam tiap hari sangatlah besar bahkan melebihi beban kerja yang ditanggung buruh pabrik. Pekerjaan mereka tidak terbatas seringkali sepanjang waktu.

Di pedesaan kita mengenal sistem tolong-menolong yang menjadi ciri khas utama penduduknya. Tenaga kerja yang bekerja untuk membantu tetangganya tidak disewa namun hanya diberi makan dan dilakukan suka rela. Tolong-menolong ini terjadi di pedesaan biasanya terkait dengan pekerjaan yang memerlukan orang banyak seperti persiapan upacara, pernikahan, kematian, pembuatan rumahjuga berbagai kegiatan iainnya yang memerlukan tenaga banyak. Tolong menolong sendiri dibedakan antara tolong menolong yang kompensasinya mengharapkan suatu saat akan ditioiong, dengan toEong-menolong yang benar-banar ikhlas tanpa harapan hai sempa dimasa datang. Untuk pertama biasanya terkait dengan kecelakaan atau kematian, sementara yang kedua pada kegiatan iainnya seperti pernikahan pendirian rumah, pesta, pembuatan sumur, juga berbagai kegiatan lainnya (Koentjaraningrat, 1961).

Aktifitas masyarakat pedesaan lainnya yang masih kita lihat adalah gotong-royong. Kegiatan ini dilakukan terkait dengan keperluan umum seperti perbaikan jalan, irigasi, perbaikan

pemakaman dan kegiatan lain dalam lingkup kepentingan bersama. Meski demikian kadangkala gotong-royong bukan merupakan kesadaran yang timbul dari kebutuhan bersama namun karena tekanan dari pihak luar khususnya pemerintah. Dimasa orde baru kebiasaan itu sering terjadi meski saat ini telah berkurang akan tetapi masih sangat dirasakan terutama terkait dengan program pemerintah. Seringkali pemahaman program bukan untuk kepentingan bersama namun adalah proyek dimana seluruh komponen terhitung sehingga swadaya masyarakat terutama pada gotong-royongnya berkurang. Fenomena ini telah lama dirasakan oleh para pelaksana pembangunan dan hampir ada di tiap desa.

Kebiasaan lain yang ada di pedesaan adalah kebiasaan musyawarah dan jiwa musyawarah yang melekat pada pikiran setiap hati penduduknya. Telah lama kebiasaan *rembuk desa* dilakukan untuk mengambil keputusan tentang pembangunan desa. Kebiasaan itu saat ini telah dilembagakan melalui Lembaga Musyawarah Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa, dan lembaga lain yang lahir dan bergabung sebenarnya dalam pemerintahan desa. Mengenai efektif atau tidaknya pelembagaan ini pada saat-saat ini sedang dilakukan evaluasi. Apalagi dengan isu otonomi daerah model musyawarah desa akan dikembalikan pada sistem lama asalkan masih memungkinkan dan dianggap lebih baik. Untuk melihat proses sosial yang ada di pedesaan kita juga harus melihat pada kategori apa proses sosial tersebut terjadi. Di bawah ini akan coba diungkapkan bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif dengan berbagai bentuknya di pedesaan. Asosiatif terdiri dari kerja sarna, akomodasi dan asimilasi, sementara *dissosiatif* terdiri dari persaingan, kontraversi dan konflik.

Proses *assosiatif* pertama adalah kerjasama dan merupakan proses sosial yang selalu ada di masyarakat termasuk masyarakat

pedesaan. Hal ini disebabkan oleh seseorang akan sangat sulit untuk memenuhi semua keperluan hidupnya tanpa bantuan atau bekerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu kerjasama merupakan proses sosial yang akan selalu melekat di masyarakat guna memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin dapat dipenuhi secara mandiri. Dalam masyarakat pedesaan kita banyak mengenal istilah sambatan, *gugur gunung*, *soyo*, dan masih banyak lagi sesuai dengan istilah setempat. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut pada intinya merupakan pola hubungan kerjasarna antara orang dengan orang, maupun orang dengan kelompok juga kelompok dengan kelompok dalam masyarakat,

Kerjasama merupakan proses yang telah dipelajari dan dilakukan manusia sepanjang hidupnya. Bentuk kerjasama mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik, keamanan dan kebutuhan lain termasuk kasih sayang. Tidak ada bayi yang dapat bertahan tanpa bantuan dari orang lain, juga tidak akan mungkin seseorang terbebas benar dari kehidupannya dan mandiri penuh. Pada beberapa sisi kehadiran dan pertolongan orang lain merupakan kebutuhan yang pasti. Dalam sebuah masyarakat yang kompleks bentuk-bentuk kerjasama itu setidaknya menurut Soedjono Soekanto (1999) terdiri atas kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*), kerjasama langsung (*directed cooperation*), kerjasama kontrak (*contractual cooperation*), dan kerjasama tradisional (*traditional cooperation*).

Kerjasama spontan merupakan bentuk kerjasama yang terjadi secara spontan dan serta merta di masyarakat. Kerjasama ini biasanya tidak terkoordinasi dengan baik dan merupakan hasil dari kepedulian atau keadaan yang menuntut kerjasama dengan mendadak. Kecelakaan lalu lintas sebagai misal akan mendorong semua orang untuk turut menolong. Demikian pula dengan kebakaran rumah, teman yang jatuh: saat berjalan bersama atau membantu seseorang

yang sedang mendorong mobilnya yang mogok. Di pedesaan kita mengenal tetulung kematian, tetulung sakit atau bekerjasama menangkap sapi yang lari saat akan dimandikan. Bentuk kerjasama tersebut terlihat tidak dikoordinasikan dan merupakan bentuk kerjasama yang spontan terjadi pada saat suatu peristiwa terjadi atau sebuah kerjasama yang secara cepat menuntut orang untuk bekerjasama.

Kerjasama kedua yakni kerjasama langsung merupakan kerjasama yang terjadi karena sebuah perintah atau aturan tertentu. Sekelompok buruh pabrik atau buruh tani di pedesaan akan cenderung bekerjasama untuk dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Apabila beberapa orang dipekerjakan pada sebidang lahan sawah yang dipersiapkan bagi tanaman padi, maka buruh tani akan membagi pada bagian pembajakan ada yang mencangkul, membersihkan rumput dan kotoran, juga ada yang membuat pematang (*mopok*). Sebagian yang lain mungkin akan menyiapkan benih, sementara ada pula yang mengurus masalah pengairan. Bentuk kerjasama karena perintah inilah yang dinamakan kerjasama langsung.

Selanjutnya merupakan kerjasama kontrak yang mana kerjasama ini terjadi karena adanya perjanjian untuk melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Biasanya bentuk kerjasama ini sangat rinci antara kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai contoh petani akan melakukan kerjasama kontrak dengan pabrik bajak untuk membuatkan bajak atau dengan pabrik peralatan lainnya. Kerjasama yang didasari oleh hal-hal semacam inilah yang dinamakan kerjasama kontrak yang mana kerjasama ini sangat mengikat antara satu dengan yang lainnya dan cenderung mempunyai konsekuensi yang jelas pada masing-masing. Hubungan buruh tani dan majikan adalah contoh bentuk kerjasama ini meski tidak ditulis secara langsung akan tetapi secara otomatis hak dan

kewajiban antara keduanya masing-masing akan memenuhi untuk memperoleh kepuasan yang diinginkan. Kerjasama tradisional merupakan bentuk kerjasama sebagai hasil dari sebuah sistem sosial. Bentuk kerjasama ini biasanya dikemas dalam aturan adat istiadat dan mempunyai konsekwensi secara adat pula. Tolong-menolong dalam menyelesaikan kepentingan bersama seperti jalan, mata air, dan sarana umum lainnya termasuk dalam bentuk kerjasama ini. Gotong-royong dan kerukunan lainnya merupakan bentuk dari kerjasama yang lahir dari sebuah sistem sosial dan terikat secara sosial pula.

Bentuk kerjasama yang lain adalah :

1. *Kerukunan* yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong
2. *Bargainmg* yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.
3. *Kooptasl* suatu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara dalam menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
4. Koalisi yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi akan menghasilkan keadaan yang tidak stabil dalam sementara waktu, hal itu disebabkan oieh perbedaan struktur dan kebiasaannya akan tetapi karena tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama maka sifatnya adalah kooperatif.
5. *Joint uenture* yakni kerjasama dalam mengerjakan proyek-proyek tertentu seperti pengeboran minyak, perfileman, perhotelan, properti dan lain-lain.

Dalam masyarakat pedesaan bentuk kerja sama banyak dilakukan sebagai contoh adalah *contract farming* dan berbagai kerja sama penyakapan lainnya. Kerjasama dalam bidang pertanian ini telah iama ada dan hampir ditemukan di selumh wilayah Indonesia dengan berbagai bentuk. Pada daerah yang berbeda akan diistilahkan berbeda juga model kerjasamanya. Bentuk proses *assosiatif* kedua adalah *akomodasi*. Dimana pada suatu masyarakat tidak selamanya terjadi sebuah keseimbangan dan keserasian dalam perjalannya. Seringkali terjadi pertentangan yang tajam mulai dari pandangan hingga pada tindakan-tindakan yang dilakukan baik antar individu maupun antar golongan. Berawal dari kondisi inilah maka secara otomatis sebuah sistem sosial akan menyeimbangkan pertentangan meski sebenarnya pertentangan adalah sesuatu yang laten dan sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial. Dalam pada itu mekanisme yang biasanya digunakan dalam istilah sosiologi adalah akomodasi. Dimana pertentangan antara individu dengan individu juga kelompok dengan kelompok akan disesuaikan masing-masing hingga terjadi kestabilan.

Sebenarnya akomodasi merupakan teori yang didasari oleh analogi kehidupan biologis. Akomodasi merupakan proses dari individu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Proses seseorang untuk dapat bertahan dalam lingkungannya inilah sebenarnya landasan utama asumsi dalam akomodasi. Demikian pula masyarakat juga akan melakukan mekanisme yang sama dalam menyesuaikan terhadap pertentangan yang juga merupakan sebuah bentuk penyesuaian terhadap lingkungan yang tidak kondusif.

Akomodasi sendiri menurut Soedjono Soekanto (1999) mempunyai tujuan untuk mengurangi pertentangan antara orang-orangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat dari perbedaan faham. Akomodasi disini bertujuan untuk nnenghasilkan

sebuah sintesa antara kedua paham tersebut sehingga terjadi pola yang baru. Selain itu akomodasi juga bertujuan untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer. Akomodasi juga dapat menjadi kondisi agar memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem kasta. Akomodasi juga dapat menjadi media peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya lewat perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti luas.

Akomodasi terdiri dari berbagai bentuk yakni *coersy* atau bentuk akomodasi secara paksaan, *compromise* atau bentuk akomodasi yang mana pihak yang terlibat menurunkan tuntutan agar tercapai penyelesaian terhadap pertentangan yang ada. *Arbitrase* merupakan cara untuk mencapai kompromis apabila pihak yang bertentangan tidak sanggup untuk menyelesaikan sendiri. *Mediation* juga bentuk akomodasi dimana berperannya pihak ketiga yang netral untuk menjembatani dan memfasilitasi pertentangan. *Conciliation* adalah usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bersengketa demi tercapainya tujuan bersama. *Tolerance* merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Toleransi lebih merupakan mekanisme kearifan manusia yang kadang tidak ingin selalu mempertentangkan sesuatu hal itu mendorong adanya toleransi yang tinggi di masyarakat. *Stalemate* merupakan sebuah bentuk akomodasi yang terjadi apabila kedua belah pihak mengalami kebuntuan dalam melanjutkan keinginannya masing-masing. Biasanya hal ini terjadi akibat kekuatan yang seimbang di antara keduanya sehingga pertentangan menjadi terhenti akan tetapi juga tidak terjadi sebuah bentuk penyelesaian. Dan yang terakhir adalah *adjudication* yaitu penyelesaian perkara di pengadilan. Secara

panjang lebar Gillin dan Gillin menguraikan hasil-hasil suatu proses akomodasi dengan mengambil contoh-contoh dalam sejarah. Antara lain hasil-hasilnya sebagai berikut:

1. Akomodasi, dan integrasi masyarakat telah berbuat banyak untuk menghindarkan masyarakat dari benih-benih pertentangan latent yang akan melahirkan benih pertentangan baru. Ketika orang-orang Normandia menaklukkan Inggris pada 1066, mereka telah memaksakan suatu kebudayaan baru terhadap masyarakat taklukannya. Bahasa, sistem feodalisme, hukum dan seterusnya diubah dan diganti. Dalam proses tersebut terjadi perkawinan campuran dan banyak orang Inggris yang mendapat kedudukan baru yang tinggi. Keadaan tersebut mengurangi jarak sosial (*social distance*) antara penjajah dengan yang dijajah. Kecuali itu akomodasi juga menahan keinginan-keinginan untuk bersaing yang hanya akan membuang biaya dan tenaga saja.
2. Menekan oposisi. Seringkali suatu persaingan dilaksanakan demi keuntungan suatu kelompok tertentu (misalnya golongan produsen) demi kerugian pihaklain (misalnya golongan konsumen). Akomodasi antara golongan produsen yang mula-mula bersaing akan dapat menyebabkan turunya harga, oleh karena barang dan jasa akan lebih mudah sampai kepada konsumen.
3. Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda. Hal ini tampak dengan jelas apabila dua orang misalnya bersaing untuk menduduki jabatan pimpinan suatu partai politik. Di dalam kampanye pemilihan, persaingan dilakukan dengan sengit, akan tetapi setelah salah satu terpilih biasanya yang kalah akan diajak bekerja sama demi keutuhan dan integrasi partai politik yang bersangkutan.

4. Perubahan lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang berubah.
5. Perubahan-perubahan dalam kedudukan. Sebetulnya akomodasi menimbulkan penetapan baru terhadap kedudukan orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia. Pertentangan telah menyebabkan kedudukan-kedudukan tersebut goyah dan akomodasi akan mengukuhkan kembali kedudukan-kedudukan tersebut.
6. Akomodasi membuka jalan untuk ke arah asimilasi.

Dengan adanya proses asimilasi para pihak lebih saling mengenal dan dengan timbulnya benih-benih toleransi mereka akan lebih mudah untuk saling mendekati. Keadaan demikian mungkin saja terjadi pada masyarakat berkasta seperti di India. Di India walupun gerak sosial yang vertikal hampir-hampir tidak ada yang terjadi suatu proses yang bernama *Sankritization* yaitu suatu proses dimana kasta-kasta yang lebih rendah mengambil sistem kepercayaan, upacara tingkah laku dalam pergaulan, dan lain-lain unsur kebudayaan dari kasta yang lebih tinggi, khususnya kasta Brahmana, untuk dijadikan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Proses tersebut menunjuk pada adanya usaha-usaha untuk mengadakan akomodasi antara kasta-kasta yang semula dipisahkan dengan tegas dan kaku.

Proses sosial assosiatif ketiga adalah asimi/osi yang merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan asimilasi dan tujuan-tujuan bersama. Apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka

dia tidak lagi akan membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan mereka dianggap mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan dan tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi yang ditandai dengan pengembangan sikap yang sama walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, Pikiran dan tindakan. Proses asimilasi timbul bila ada :

1. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya.
2. Orang perorangan sebagai warga kelompok saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama, sehingga.
3. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Asimilasi sendiri akan terjadi apabila ada suatu pendekatan antara kedua pihak, interaksi sosial tersebut tidak mengalami hambatan atau pembatasan, interaksinya bersifat primerjuga dilakukan dalam frekuensi yang tinggi. Selain itu juga didukung oleh sikap toleransi antar kedua belah pihak, kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Selain itu sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat juga akan mempercepat terjadinya asimilasi juga persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran dan adanya musuh dari luar atau ancaman perang. Sementara itu asimilasi juga akan mendapatkan penghalang yakni adanya isolasi golongan tertentu di masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, perasaan takut pada kebudayaan yang dihadapinya serta rasa rendah diri atau lebih tinggi terhadap budaya lainnya. Selain itu perbedaan warna kulit dan ras pada masyarakat tertentu juga menjadi penghalang asimilasi. *Group feeling* juga

menjadi penghaiang asimilasi apabila berlebihan demikian pula sikap menindas penguasa terhadap kelompok minoritas juga pertentangan kepentingan dan pertentangan antar pribadi.

Proses sosial selanjutnya adalah proses yang *dissosiatif* atau *oppositional processes*. Oposisi ini terdiri dari persaingan atau *competition*, *kontraersi* atau *contravention*, dan pertentangan atau *conflict*. Persaingan dalam masyarakat terdiri dari persaingan ekonomi, kebudayaan, kedudukan dan peranan serta persaingan ras. Persaingan akan berfungsi sebagai tempat menyalurkan keinginan-keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. Selain itu persaingan juga akan menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan yang dihargai saat itu, juga sebagai penyaring dalam pembagian pekerjaan.

Kontraversi merupakan proses disosiatif kedua yang berada diantara persaingan dan pertentangan. Kontraversi ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kontraversi berbentuk penolakan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, perbuatan kekerasan dan mengacaukan pihak lain untuk bentuk yang umum. Sementara itu memaki, menyangkal pernyataan orang didepan umum, memfitnah, mengkambing hitamkan orang lain adalah bentuk sederhananya. Kontraversi yang intensif terdiri dari penghasutan, menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak-pihak lain dan sebagainya. Selain itu yang rahasia terdiri dari pengkianatan dan menyebarkan rahasia orang lain sementara yang taktis adalah mengejutkan lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain dan lain sebagainya (Leopold Von Wiese dan Howard Becker dalam Soedjono Soekanto, 1997).

Proses disosiatif ketiga adalah konflik yang merupakan kondisi atau proses dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik disebabkan oleh perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perbedaan sosial. Pertentangan itu sendiri berbentuk pertentangan pribadi, rasial, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Pertentangan sendiri akan dapat menyebabkan solidaritas dalam kelompok, kehancuran atau keretakan kelompok, perubahan kepribadian individu, hancurnya harta benda dan jiwa, serta akomodasi atau tunduknya pihak lawan (Soekanto, 1997).

C. Proses dan Interaksi Sosial Masyarakat di Pedesaan Indonesia

Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu, dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Atau apa yang akan terjadi bila terjadi perubahan-perubahan yang menggoyahkan pola-pola kehidupan yang ada. Dalam masyarakat, interaksi ini berarti merupakan hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya saling mempengaruhi antara persoalan sosial dan ekonomi, sosial dan politik, ekonomi dan hukum, hukum dan politik dan seterusnya.

Dalam proses interaksi di pedesaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut adalah faktor inutasi, sugesti, identifikasi, dan simpati, imitasi akan mendorong seseorang untuk selaiu mematuhi peraiwan dan niiai yang ada. Faktor sugesti merupakan proses seseorang yang akan mengikuti pandangan yang disampaikan oleh seseorang. Ia akan mengikuti pandangan tersebut

dan cenderung emosional Sementara pertimbangan rasional kurang diperhatikan. Identifikasi merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku sama dengan orang lain yang dianggap lebih atau digemari. Proses ini akan membentuk kepribadian seseorang hal ini terjadi karena identifikasi lebih mendalam dari pada imitasi. Dalam proses identifikasi seseorang akan berusaha belajar untuk mengetahui kelebihan orang yang akan dicontohnya. Hal ini terlihat dalam proses di pesantren- pesantren di mana perilaku santri sangat erat kaitannya dengan pola sikap dan perilaku kyainya termasuk di desa.

Untuk melihat pola interaksi yang ada di desa perlu kita bahas bentuknya serta berbagai segi kehidupan yang ada di sana. Hal ini penting untuk menentukan bentuk interaksi yang ada yang berpengaruh terhadap pembinaan yang akan dilakukan selanjutnya. Ada dua macam bentuk interaksi sosial yang ada di desa proses yang pertama adalah asosiatif dan kedua proses disosiatif. Proses asosiasi terdiri dari kerja sama dan akomodasi. Kerjasama yang ada di sana terjadi antar individu dan antar kelompok masyarakat. Akomodasi yang ada di sana terjadi untuk menstabilkan apabila terjadi pertentangan. Pertentangan yang terjadi selain perselisihan antar individu karena hal keseharian juga perselisihan menyangkut waris, perceraian, masalah tanah, pembagian air dan lain-lain. Dalam kebiasaan sehari-hari mereka selalu mengucapkan istilah sabar atau yang selalu mereka ucapkan apabila ada ketidakcocokan dengan orang lain adalah *Innallooha ma'assobirrin, sing sabarae masa atau Sabar Cong!*, namun di sisi lain kerap kali mereka juga mengungkapkan jangan keterlaluhan dan apabila terlalu siapapun akan dilawan apalagi menyangkut kehormatan.

Kerjasama yang ada merupakan kerjasama yang dilakukan antar individu karena kekerabatan, rumah dekat, juga perkawanan.

Kerjasama juga dilakukan bersama-sama berupa perbaikan fasilitas umum, penjagaan keamanan, pembangunan masjid dan pelaksanaan acara desa. Selain itu kelompok-kelompok masyarakat dalam satu jama'ah masjid atau langgar juga mempunyai kebiasaan kerja sama. Mulai dari pengelolaan mushola, arisan, tahlilan dan perkumpulan selamatan. Meski pada acara tertentu mereka akan mengundang kyai atau tokoh masyarakat di sana. Sebagai contoh beberapa bentuk kerjasama di pedesaan.

Proses dissosiatif merupakan proses dimana antar orang dan antar kelompok tidak melakukan kerjasama yang mengikat namun akan menentukan sekali gerak dari mereka. Dissosiatif ini dapat berupa persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*), pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Persaingan desa banyak terjadi pada berbagai segi kehidupan di sana. Persaingan terjadi bisa antar keluarga. Antar kelompok masyarakat dan antar individu. Persaingan dalam ekonomi terlihat dari berlombanya masyarakat membangun dan berbeSanja barang yang berharga di rumahnya. Perginya para pemuda desa keluar negeri dan kebanyakan wanita ke Saudi Arabia sebagian besar adalah wujud dari persaingan ekonomi yang ada di antara mereka selain karena status sosial yang dewasa ini lebih dilihat dari kenampakan fisik.

Persaingan lain yang terlihat juga terjadi di antara tokoh masyarakat tentang eksistensi dan ekonomi. Kemunculan Kopontren dan lembaga ekonomi lain yang hadir adalah bentuk dari persaingan setelah pemain di sektor yang sama sedikit. Persaingan pengaruh juga terjadi antar pesantren dengan memperlihatkan pembangunan yang pesat secara fisik dan berlombanya tiap pondok untuk memanggil pejabat. Kedatangan pejabat karena undangan salah satu tokoh akan mengundang semangat tokoh untuk melakukan hal yang sama.

Bentuk disosiatif kedua yakni kontravensi yakni keadaan antara kerjasama dan konflik. Dalam masyarakat desa dapat kita temui dalam berbagai bentuk seperti penolakan terhadap bibit PB-5 saat awal revolusi hijau, keengganan masyarakat Samin untuk membayar pajak pada pemerintah.

Sementara itu konflik di pedesaan sering kita lihat dalam berbagai macam kehidupan. Proses pemilihan kepala desa dan perangkat desa kerap kali menimbulkan pertentangan antar *Botoh* (Pendukung), demikian pula pembagian jatah air yang tidak adil juga menjadi sumber konflik (Venansius, 2000). Sebagai sebuah kenyataan konflik merupakan suatu yang abadi, selama masyarakat masih ada dan berkembang.

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

A. Pengertian tentang lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok manusia. Himpunan norma tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, kelembagaan masyarakat terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piranti untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Soedjono Soekanto, 1997)

Koentjaraningrat (1987) mengatakan, bahwa lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma. Sistem norma tersebut mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari sana kita dapat melihat bahwa tujuan utama lembaga kemasyarakatan adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan masyarakat.

Dari kedua definisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem norma dari segala tingkatan yang mengatur serangkaian tindakan terpola untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soedjono Soekanto (1997) ciri umum lembaga kemasyarakatan adalah :

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-polperilaku terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil hasilnya.
- b. Semua lembaga kemasyarakatan mempunyai kekekalan tertentu. Sebuah sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan apabila telah melalui waktu yang lama.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu
- d. Lembaga kemasyarakatan memiliki alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan
- e. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari kelembagaan kemasyarakatan
- f. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak, untuk merumuskan tujuan dan keperluan lainnya.

Berdasarkan pengertian lembaga kemasyarakatan di atas menurut Jabal Tarik (2003), terdapat tiga unsur lembaga kemasyarakatan serta kutipan penjelasannya sebagai berikut :

- a. Sistem norma yang terdiri dari sejumlah norma dalam segala tindakan
- b. Tindakan berpola
- c. Kebutuhan manusia

1) **Sistem norma**

Sistem norma merupakan sejumlah norma yang terangkai dan berkaitan satu sama lain. Norma-norma ini mempunyai

kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma-norma yang sangat kuat mengikatnya dan ada pula yang lemah. Atas dasar kekuatan mengikat ini maka dikenal istilah kebiasaan, tata kelakuan, dan adapt istiadat

Kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, apa bila kebiasaan ini dilanggar, maka si pelanggar ini akan dikenai sanksi yang tidak terlalu berat. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang diterima sebagai norma dan bagi mereka yang melanggarnya dikenakan sanksi yang cukup berat.

Contoh perkumpulan petani pemakai air (P3A), kelompok petani pemakai air ini adalah kelompok petani yang mengelola pada suatu hamparan lahan pertanian dengan satu sumber aliran air yang sama. Pada kelompok ini telah diatur system pola tanamnya agar nantinya dalam pembagian air bisa merata. Dalam kelompok pemakai air tersebut telah dibuat aturan-aturan beserta sanksi-sangsinya bagi anggota yang melanggar aturan. Pada aturan tersebut biasanya sanksinya bersifat bertahap, ada yang ringan berupa denda sampai pada sanksi yang berat yaitu tidak diberi air. Sedangkan aturan dalam penyusunannya biasanya melalui musawarah dengan anggotanya.

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang terintegrasi dengan kuatnya dalam masyarakat , sehingga sanksi yang diberikan sangat berat bagi sipelanggar.

Contoh lain dari perkumpulan petani pemakai air di Bali yaitu Subak, subak merupakan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio agraris, ekonomis dan dinamis di bidang pengaturan pemanfaatan irigasi untuk persawahan.

Anggota subak adalah petani, termasuk penggarap. Mereka memanfaatkan jaringan irigasi yang bisa mencangkup satu wilayah desa atau lebih. Jadi keanggotaan subak berbasis jaringan irigasi (*canal based*), bukan satuan wilayah desa (*village based*).

Sebagai sebuah kelompok maupun system pengairan, subak berpegang pada filosofi *Tri Hita Karana* atau prinsip keseimbangan hidup bersandar pada tiga hal yaitu parahyangan (hubungan manusia dengan tuhan), *palemahan* (hubungan manusia dengan alam), dan *pawongan* (hubungan manusia dengan manusia lain). Parahyangan diterapkan melalui upacara-upacara dalam proses bertani. Pawongan diterapkan melalui proses-proses saling menghargai sesama anggota subak. Sedangkan palemahan dilaksanakan salah satunya adalah pengairan yang baik sehingga usaha tani berkelanjutan serta tidak merusak lingkungan.

Tatanan organisasi subak menerapkan prinsip demokrasi. Keputusan selalu diambil berdasarkan mekanisme sangkep (rapat), dengan keputusan tertinggi berdasarkan pasuara (kesepakatan rapat). Peraturan dan ketentuan subak didasarkan pada *awig-awig* yang disesuaikan *sima* dan *drestha* di wilayah masing-masing. *Sima* dan *drestha* adalah kesepakatan turun temurun dalam menjalankan aktivitas, yang biasanya tumbuh dan berkembang di desa masing-masing. Karena subak sebagai organisasi *sosio-religius*, maka anggota dari subak tersebut sangat takut untuk melanggarnya. (Maya W, 2007). Dari kedua contoh kelembagaan masyarakat petani pemakai air dengan sangsi yang berbeda pada kelompok P3A adalah sebagian besar di Pulau Jawa, sangsi-sangsinya bersifat administrasi misal dalam bentuk denda ringan sampai berat Tetapi kelompok

subak merupakan kelompok kemasyarakatan yang religius, maka anggotanya sangat takut untuk melanggarnya.

2) Tindakan berpola.

Tindakan berpola merupakan serangkaian tindakan yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu pola yang mantap. Dengan adanya kelakuan berpola ini, maka anggota masyarakat sudah dapat mengantisipasi atau mengetahui lebih dahulu peran yang akan ditampilkan bila berhubungan dengan anggota masyarakat lain. Pengetahuan akan tindakan berpola menentukan tindakan si individu itu sendiri.

Kesadaran adalah menyadari sesuatu yang berarti mengetahui dan merasakan sesuatu itu sepenuh-penuhnya. Meyakini kebaikan atau keburukan sesuatu itu dapat menggerakkan kemauan untuk kegiatan berbuat apa yang diketahui dan dirasakan baik.

Riza Primahendra (2003) mengatakan, bahwa untuk pengembangan kesadaran kritis dari orang miskin melalui penyadaran ini berupaya untuk menemukan akar masalah dari situasi kemiskinan yang dihadapi dan merumuskan berbagai alternatif untuk mengatasinya, dan pada tahap ini peranan fasilitator dari luar sangat penting. Menurut Riza Primahendra (2003), bahwa kesadaran (*consciousness*) ada beberapa bentuk, antara lain :

- a. Kesadaran pasif (*passive consciousness*), jenis kesadaran dimana seseorang memahami apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang terjadi disekitarnya sebagai sesuatu keniscayaan dan tak terelakan serta yang harus diterima.
- b. Kesadaran untuk mempertanyakan (*questioning consciousness*), kesadaran yang sudah diikuti dengan upaya mempertanyakan mengenai segala sesuatu yang terjadi,. Kenapa harus terjadi seperti ini dan tidak begitu?. Kenapa harus saya yang mengalami

dan bukan orang lain?. Serta pertanyaan-pertanyaan sejenis merupakan tanda dari berkembangnya jenis kesadaran ini.

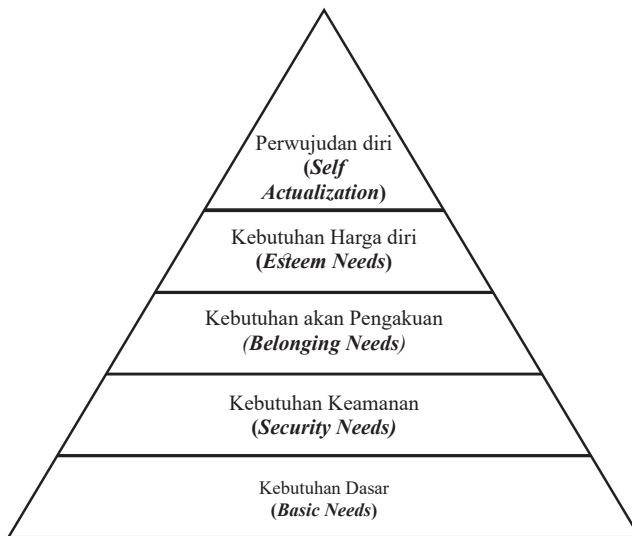
- c. Kesadaran analitis (*analytical consciousness*), jenis kesadaran yang lebih maju di mana seseorang mulai menganalisa segala sesuatu yang ia pertanyakan. Seseorang mulai mencari apa penyebab dan bagaimana sesuatu itu terjadi.
- d. Kesadaran kritis aktif (*active critical consciousness*) kesadaran yang sudah diikuti dengan posisi moral tertentu, seseorang mulai menilai segala sesuatu yang terjadi apakah dapat diterima atau tidak, merugikan atau menguntungkan bagi kepentingan banyak orang. Dalam kesadaran ini seseorang juga mulai secara aktif membangun sikap kritis, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi situasi ini, siapa yang bisa diajak untuk terlibat, bagaimana mengorganisasikannya, dan pertanyaan sejenis menjadi identifikasi kesadaran ini.

3) **Kebutuhan manusia**

Sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan manusia berfungsi memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam inilah yang menjadi dasar terbentuknya kelembagaan masyarakat yang beraneka ragam. Makin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, makin banyak pula jenis lembaga kemasyarakatan yang dibutuhkan/ terbentuk. Kelembagaan masyarakat terbentuk karena anggota masyarakat dalam melangsungkan hidupnya ada yang bisa dipenuhi sendiri tetapi ada yang harus melibatkan orang lain dalam mencapai tujuannya. Kelembagaan masyarakat terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai oleh pola tingkah laku dan sistem nilai bersama. Setiap anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut.

Lembaga sosial lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kehidupannya. Kebutuhan masyarakat meski tidak linear cenderung merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu sebagai anggotanya. Karena hal tersebut membicarakan kebutuhan masyarakat kita juga harus menguraikan beberapa hal mendasar dari kebutuhan individu.

Perkembangan teori tentang kebutuhan manusia dikemukakan oleh Abraham Maslow (1954) dalam bukunya tentang *Motivation Personality* yang memandang kebutuhan manusia secara berjenjang.



- Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang paling dasar dan merupakan kebutuhan fisik, seperti makan, minum, tidur dan sebagainya.
- Kebutuhan keamanan adalah untuk mengatasi rasa ketidakpastian.
- Kebutuhan akan pengakuan merupakan kebutuhan akan rasa disayang dan menyayangi.
- Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan akan penghargaan, seperti kekuasaan, prestasi atau status.

- Perwujudan diri merupakan puncak dari semua kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan kemampuannya melaksanakan konsep dan gagasan menjadi suatu kenyataan.

Dari piramida kebutuhan teori Maslow tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan yang paling dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang mampu merasakan kebutuhan yang lebih tinggi tingkatnya, demikian juga sebaliknya.

Menurut Miftah Toha (2003), alasan mengapa seseorang tertarik kepada lainnya, sehingga terjalin hubungan kelompok :

1. Kesempatan berinteraksi, dasar pokok yang amat penting dari daya tarik antar individu dan pembentukan kelompok adalah karena adanya kesempatan berinteraksi satu sama lain. Kesempatan berinteraksi dan yang dihubungkan dengan lingkungan ini dapat dibedakan karena jarak fisik dan jarak psikologis.
2. Status, status merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam daya tarik antar individu, siapa berinteraksi dengan siapa, seringkali status merupakan faktor penentu.
Ada dua tendensi dibidang status ini, yakni seseorang tertarik kepada orang lain karena adanya kesamaan status, dan seseorang itu lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai status lebih tinggi.
3. Kesamaan latar belakang, latar belakang yang sama merupakan salah satu faktor penentu dari proses daya tarik individu untuk berinteraksi satu sama lain. Kesamaan latar belakang, seperti misalnya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, ras dan status sosio-ekonomi seseorang akan memudahkan mereka untuk menemukan daya tarik beriteraksi satu sama lain.
4. Kesamaan sikap, kesamaan sikap ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari kesamaan latar belakang. Orang-orang yang

mempunyai kesamaan latar belakang nampaknya mempunyai kesamaan pengalaman, dan orang yang mempunyai kesamaan pengalaman ini akan memudahkan untuk berinteraksi. Kesamaan yang didasarkan kepada pengalaman itu akan membawa orang-orang ke arah kesamaan sikap.

B. Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan pedesaan

Lembaga kemasyarakatan merupakan susunan tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada pemenuhan kompleks-komplek kebutuhan masyarakat. Selain itu kelembagaan sosial juga merupakan jaringan proses-proses hubungan antar manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut sesuai dengan pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Lembaga kemasyarakatan pada masyarakat bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pedoman pada masyarakat, bagaimana ia harus berbuat di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan kita.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*) yang merupakan pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggotanya.

Dari ketiga hal tersebut lembaga kemasyarakatan di desa dapat kita lihat fungsi dan peranannya masing-masing dalam menjalankan fungsinya. Pesantren akan mempunyai fungsi yang berbeda dengan kelompok tani dan dejabat pengaruhnya juga akan berbeda.

Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan di desa dibagi menjadi beberapa tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan. Dari

sudut perkembangannya kelembagaan di desa terdiri dari *crescive institution dan enacted institution* Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat desa dibagi menjadi dua yakni *basic institution dan subsidiary institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga merupakan tipe kelembagaan masyarakat yang didasari pada penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *sanctioned institution dan unsanctioned institution*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi di atau yakni Islam, Kristen dan agama lainnya termasuk *Restricted Institution*.

Lembaga terakhir di desa merupakan lembaga yang terbagi berdasarkan pada fungsinya yaitu kelembagaan operatif institusional dan regulative institusional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan dan tata nilai yang ada di masyarakat. Secara skematis tipe kelembagaan ini dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan pertanian berfungsi untuk menunjang program pembangunan di pedesaan, pemanfaatan lembaga lokal ini oleh Rondinelli dan Ruddle (dalam Yuliati Y dan Poernomo M, 2003) dapat dilakukan apabila :

1. Lembaga lokal tersebut harus mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi untuk menjawab berbagai permasalahan dan kondisi yang bervariasi
2. Lembaga pedesaan harus komplementer dan menyatu dengan lembaga-lembaga pembangunan lainnya untuk mengatasi setiap permasalahan pembangunan yang timbul

3. Sebagai suatu organisasi yang adaptif, yang mana lembaga tersebut harus disusun dan dibentuk berdasarkan sifat-sifat budaya, praktek dan perilaku masyarakat sekitarnya.
4. Jaringan kelembagaan harus disusun untuk mentransformasikan perilaku dan praktek-praktek tradisional menuju yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang seimbang
5. Lembaga yang adaptif harus menyalurkan pelayanan secara merata kepada masyarakat yang menjadi kliennya.
6. Lembaga yang adaptif harus dibentuk bersama-sama kelompok sasaran dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menjadi pemimpin lembaga tersebut.

Begitu pentingnya masalah lembaga kemasyarakatan pedesaan kita perlu untuk mengamati lebih detail tentang lembaga apa saja dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

C. Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota masyarakat selalu berinteraksi dengan orang lain interaksi tersebut karena kemauan dari masyarakat pedesaan sendiri atau karena pengaruh dari proses pembangunan. Dalam proses perubahan individu ini juga akan berpengaruh terhadap kelembagaanya dengan proses yang cepat atau lambat. Perubahan kelambagaan masyarakat dalam tuisan ini adalah terjadi pada kelembagaan ketahanan pangan desa, yang juga disebut kelembagaan kelembagaan ketahanan pangan.

Menurut Sumardjo (2003) yang dimaksud kelembagaan pangan adalah segala bentuk pengaturan yang atau keteraturan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan di perdesaan

yang telah menjadi acuan dalam bertindak, karena di dalamnya teaarkandung nilai/orientasi nilai, norma, penggunaan/pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukungnya, kejelasan orang-orang yang mendukungnya , serta cara-cara berpola pengendalian sosial agar kelembagaan tersebut senantiasa tejada dengan efektif sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan masyarakat.

Wujud kelembagaan pangan di pedesaan ini di Jawa Barat dan Jawa Tengah dapat terlihat terwadahi dalam kelompok-kelompok masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pertanian, seperti kelompok tani, kelompok lumbung pangan, kelompok usaha bersama, kelompok/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan kelompok usaha bersama yang dikembangkan oleh masyarakat, koperasi, kelompok Pengembangan Kelembagaan Pangan Pedesaan (PPKP) yang dibina oleh Dinas Pertanian dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian Sumardjo tahun 2003 terhadap kelompok-kelompok tersebut dapat dijelaskan bahwa ada dua kecenderungan perilaku kelompok : (1) Kecenderungan perkembangan yang membawa atau mengarah pada ketidakefektifan kelembagaan tani di pedesaan, dan (2) kecenderungan perilaku dalam kelompok masyarakat yang dalam perkembangannya cenderung menuju pada keefektifan kelembagaan tani. Dalam uraian ini dibandingkan secara lebih rinci fakta yang mengarah pada kedua kecenderungan tersebut, sehingga dapat ditarik pelajaran atau kiat-kiat pengembangan kelembagaan kelompok, khususnya pangan di pedesaan.

a. Lumbung sebagai lembaga cadangan pangan

Di beberapa desa di Kabupaten yang diamati terdapat Kelompok Lumbung Padi, yang sejak awal kemerdekaan

sampai sekarang masih berfungsi secara nyata dalam upaya memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, khususnya yang menyangkut pertanian. Diantara lumbung tersebut dikaji beberapa lumbung yang secara mendalam dianalisis dalam tulisan ini, yaitu lumbung pangan.

Kebanyakan kelembagaan lumbung yang telah berfungsi secara berkelanjutan tersebut mempunyai kemiripan dalam beberapa hal, yaitu :

- (1) Dikembangkan oleh tokoh masyarakat (kepemimpinan lokal) berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi anggota lumbung bersangkutan, tidak mengalami intervensi yang intensif dari pemerintah maupun pihak manapun dalam pengambilan keputusan penting bagi kehidupan lumbung tersebut, sehingga keberadayaannya benar-benar lebih diwarnai oleh kegotong-royongan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat para anggota lumbung. Masyarakat terbangun keyakinannya bahwa lumbung benar-benar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Keyakinan tersebut antara lain merupakan keberhasilan kepemimpinan lokal mengembangkan kesadaran bersama atas manfaat lumbung tersebut bagi masyarakat.

Lumbung tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, khususnya modal usaha tani maupun keadaan-keadaan krisis masyarakat lainnya, seperti keadaan rawan pangan, keperluan dana untuk hajatan, dan sosial kegotong-royongan, sampai pembangunan prasarana kampung

dan wujud sikap kerukunan lainnya, umumnya semula dirintis dengan berangkat dari modal awal berupa gabah dari para anggotanya (warga masyarakat yang berminat) dan kemudian diteruskan dengan pengumpulan beras perelek atau jimpitan. Selanjutnya dipinjamkan kepada petani untuk dikembalikan dengan beras senilai yang telah disepakati bersama di antara anggotanya.

- (2) Lumbung semacam itu kebanyakan dikembangkan di tingkat komunitas yaitu kampung, atau di era pembangunan dan kini disebut rukun tetangga (RT) atau penggabungan beberapa RT di bawah rukun warga (RW), tetapi jangkauan pelayanannya kemudian berkembang ke tingkat RW, bahkan sampai ke luar RW atau tingkat desa. Fakta menunjukkan bahwa pada tingkat komunitas itulah keberpihakan seorang figur pemimpin kepada masyarakat, efektif mengembangkan keyakinan masyarakat tentang manfaat suatu kelembagaan kelompok masyarakat.
- (3) Lumbung melayani peminjaman, dan pengembalian sesuai aturan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggotanya. Keputusan kepemimpinan yang partisipasif semacam ini ternyata sangat efektif menghasilkan komitmen anggota lumbung untuk mentaati norma lumbung dalam kehidupannya. Pinjaman bisa berupa uang atau barang (gabah misalnya), tetapi mengembalikan harus berupa gabah. Dana kas tersedia karena ketika beras di pasar laku dengan harga tinggi maka kelebihan beras dari daya tampung gudang dijual, tetapi di gudang tetap selalu ada gabah, yang dapat

dipinjam setiap saat dengan prosedur sederhana (tanpa agunan tetapi berbasis kepercayaan) oleh warga yang sangat membutuhkannya. Masyarakat bisa meminjam tanpa menyimpan, kecuali penyeteroran pertama gabah dalam jumlah tertentu sebagai tanda menjadi anggota kelompok lumbung. Umumnya lumbung seperti itu mampu berkembang untuk melayani warga masyarakat dari kampung lain meskipun bukan anggota lumbung, tentu saja dengan ketentuan yang berbeda dengan anggota lumbung, misalnya dalam hal besarnya nilai beras atau gabah yang harus dikembalikan. Pembayaran jasa peminjaman pada anggota lumbung lebih murah dibanding bukan anggota kelompok lumbung. Misalnya bila anggota lumbung meminjam gabah atau uang senilai 100 kg gabah pada saat mengembalikan menjadi 120 kg gabah, sedangkan di luar anggota lumbung sedikit lebih besar dari jumlah itu, antara lumbung bervariasi sesuai kesepakatan anggota.

- (4) Keuangan dilaporkan secara rutin dalam periode waktu tertentu, minimal setahun sekali. Transparansi semacam inilah yang tampaknya telah memperkuat sikap dan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap seseorang pemimpin dan pengurus lumbung untuk mematuhi dan mengikuti pengaruhnya dalam kepemimpinan kelompok masyarakat.
- (5) Kepemimpinan pengurus lumbung yang efektif tampak sebagai seseorang dengan figur seorang pemimpin yang jujur, memiliki komitmen terhadap pengelolaan lumbung, dapat di percaya dan mampu mengelola lumbung secara transparan, serta senantiasa menghasilkan keteladanan

dan trust yang sangat nyata serta efektif mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap fungsi lumbung.

- (6) Seorang pemimpin dan pengelola lumbung yang berhasil memelihara kondisi pelayanan yang efektif biasanya adalah figur yang cukup komunikatif, mengetahui apakah pemanfaat jasa lumbung akan jujur atau tidak, sebaliknya pengelola lumbung yang keberadaannya dipilih berdasarkan kesepakatan anggota, umumnya merupakan penduduk setempat, selalu menginformasikan pada forum pertemuan masyarakat bulanan atau tahunan (35 hari) bahwa ada dan kas atau gabah dalam jumlah tertentu yang bisa dipinjam atau dimanfaatkan oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penegakan sanksi dalam norma lumbung diterapkan secara konsisten dan berbasis kepercayaan, norma dan nilai setempat, baik sanksi moral maupun sanksi masyarakat. Ketegasan dan konsistensi pemimpin dalam menegakkan sanksi ternyata menjadi salah satu kunci efektivitas pengelolaan kelembagaan lumbung. Di sini mengindikasikan bahwa seorang pemimpin adalah figur yang memahami dan mengkhayati betul keseluruhan norma, karena itulah sanksi dapat ditegakkan. Makna sanksi di sini tidak selalu berarti hukuman (penalty atau punishment) yang adil. Sanksi bagi yang menyimpang dari kesepakatan lebih bersifat sanksi sosial dan sanksi moral, bukan sanksi ekonomi atau sanksi hukum formal, yaitu timbulnya rasa malu dan rasa terasing di lingkungan kebersamaan masyarakat setempat bagi si penyimpang. Namun, juga diinformasikan bahwa bila pengguna jasa

lambung dari normal lambung menyimpang, maka dalam sanksi sosial juga tidak diperkenankan meminjam lagi sebelum pinjamannya dikembalikan.

Sejauh ini sanksi tersebut cukup efektif karena beberapa sebab, antara lain : keberadaan lambung memang benar-benar dirasakan manfaatnya yaitu dapat menyediakan dana/natura sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebanyak kebutuhan pengguna jasa yang bersangkutan dengan prosedur mudah, serta tanpa agunan melainkan kepercayaan (*trust*). Pengguna jasa lambung menyadari apabila mereka menyimpang, maka yang rugi dirinya sendiri dan dirinya akan merasa malu dan tidak nyaman pada masyarakat sekitar mereka berada.

b. Lambung sebagai lembaga pemasaran

Lambung pada tahap awal terbentuk berfungsi untuk cadangan pangan pada musim paceklik dan juga pada untuk mendukung kegiatan sosial. Tetapi pada perkembangannya lembaga-lembaga lambung mengembangkan fungsinya untuk mengorganisir pemasaran produk pertanian anggotanya utamanya produk beras. Di Kabupaten Boyolali telah didampingi terhadap 13 lambung pangan untuk dapat berfungsi dalam pemasaran produk pertanian. Lambung-lambung tersebut telah mendapat bantuan dari kantor PMD sebesar Rp. 10.000.000,- setiap lambungnya, dan mendapatkan pendampingan penguatan fungsi organisasi dari LSK-BB Solo. Dana tersebut digunakan kelompok untuk membeli gabah anggota kelompok, yang selanjutnya di tahan beberapa saat dan baru dijual setelah harga meningkat. Sehingga lambung dapat berfungsi sebagai penyangga harga gabah. Dampak nyata dari peningkatan fungsi lambung ialah

pengguna lumbung dan masyarakat di sekitarnya tidak terjerat baik terhadap rentenir maupun oleh dana kredit program lain Dampak lain adalah pengijon dan rentenir pun tidak mampu masuk atau bertahan di lingkungan masyarakat yang memiliki lumbung yang berfungsi efektif. Mereka sewaktu-waktu dapat memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan fakta tentang manfaat lumbung yang sangat dirasakan masyarakat secara sadar melestarikan keberadaan lumbung tersebut, sehingga tanpa diperintah pun menjaga keamanan jumlah lumbung.

Sehingga kedepan lumbung yang modern adalah lumbung yang benar-benar efektif menjadi penggerak ekonomi dan sosial masyarakat. Penggerak ekonomi dalam artian dapat menjadi tempat persediaan pangan di kala paceklik atau krisis pangan. Selain itu, lumbung juga berperan sebagai sumber permodalan usaha bagi anggotanya tepat waktu, tepat jumlah, tepat prosedur dan tepat sasaran. Secara sosial lumbung juga berfungsi sebagai pengelola kebutuhan-kebutuhan sosial, baik untuk keperluan gotong royong (misal mengelola kebutuhan peralatan pesta adat, hajatan dan acara sosial lainnya,) lumbung juga mempunyai kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur masyarakat.

PERUBAHAN SOSIO KULTURAL DAN MODERNISASI

A. Pengertian

Perubahan sosial merupakan ciri khas semua masyarakat dan semua kebudayaan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Dalam masyarakat modern perubahan itu sangat cepat, sedang dalam masyarakat tradisional sangat lambat. “Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang tertutup, padu monolitik.

Dengan. monolitik saya maksudkan bahwa di sana terdapat seperangkat pikiran dan nilai-nilai dari suatu bidang kehidupan yang meresapi, mengatur, menguasai, menyatukan semua bidang-bidang kebudayaan yang ada. Dalam masyarakat tradisional maka interpretasi dan pandangan serta nilai-nilai dari bidang agama kerakyatan (yang animistis dan dinamistis) meresapi, menjelajahi dan mengontrol seluruh kegiatan pengalaman dan pengetahuan yang ada.

Perubahan sosial dapat menimbulkan problem sosial. Problem sosial dapat saja identik secara materil dalam masa dan kebudayaan yang berbeda, tetapi problem itu selalu erat bergantung pada kenyataan sosio kultural yang khusus. Dengan kata lain ada relasi kecenderungan-kecenderungan dan dinamisme sosio kultural dengan problema sosial masyarakat modern. Problem sosial erat hubungannya dengan kondisi sosial, sebab problem sosial timbul dari kondisi sosial. Dan kondisi sosial ditimbulkan oleh interaksi

dan interelasi dua manusia atau lebih. Karena kondisi sosial melatar belakangi problem sosial, maka perlu meneliti kondisi sosial sebelum mempelajari problem sosial. Problem sosial khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan kondisi sosial dan kulturil, yaitu akibat dari diferensiasi dan multiplikasi kepentingan dan fungsi masyarakat, gangguan alam sekitar fisik dan sebagainya. Problem sosial dapat berubah menjadi patologi sosial.

Patologi sosial dalam suatu gejala di mana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibatnya bahwa pengikatan sosial patah sama sekali. Problem sosial tersebut berubah menjadi patologi sosial, bila timbul ketidakserasian dalam struktur sosial.

Struktur sosial adalah suatu jaringan abstrak yang mengatur hubungan orang dengan orang lain di dalam kehidupan masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu.

Adapun perubahan sosial yang dialami berbagai Negara yang belum berkembang adalah perubahan sosial yang direncanakan yaitu modernisasi.

“Modernisasi dapat diartikan sebagai suatu sikap pikiran yang mempunyai kecenderungan untuk pendahuluan sesuatu yang baru dari pada yang bersifat tradisi, dan satu sikap pikiran yang hendak menyesuaikan soal-soal yang sudah menetap dan menjadi adat kepada kebutuhan-kebutuhan yang baru”.

Sikap ini terutama disebabkan penggunaan ilmu pengetahuan positif. Dengan demikian modernisasi dapat kita rumuskan sebagai pikiran yang hendak berusaha untuk mengharmoniskan hubungan antara lembaga yang telah lama ada dengan ilmu pengetahuan. Dalam

proses modernisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peranan, makanya cara berpikir kritis, sistematis, analitis, logis rasional, pikiran yang merelativisasikan segenap nilai-nilai sosio kultural, cara berpikir yang mengarah kedesakralisasi dan profanisasi dan berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah menjadi dasar yang kuat bagi modernisasi. Pengertian modernisasi menggambarkan scope yang luas, tetapi dalam arti teknologis-ekonomis menggambarkan adanya transformasi yang menyeluruh dari masyarakat tradisional pramodern dalam bentuk teknologi dan bentuk organisasi sosial yang menyertai perkembangan teknologi, sebagaimana terdapat dalam negara-negara yang sudah berkembang. Modernisasi menyangkut aspek sosiodemografi dari masyarakat dan aspek struktural dari organisasi sosial. Aspek sosiodemografi meliputi proses di mana sosial, ekonomi, psikologis masyarakat menunjukkan peluang kearah pola baru melalui sosialisasi dan perikelakuan yang berwujud pada aspek kehidupan modern. Sedangkan aspek struktural dari organisasi diartikan sebagai unsur-unsur dari norma kemasyarakatan yang terwujud, apabila manusia inengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan struktur menyangkut lembaga kemasyarakatan, norma kemasyarakatan, stratifikasi sosial, hubungan-hubungan kekerabatan. Sebagai akibat dari transformasi itu timbullah proses disorganisasi dislokasi, problema sosial, konflik antar kelompok sosial, hambatan terhadap perubahan. Disorganisasi ini hendsknya dilihat sebagai permulaan menuju integrasi. Disorganisasi, integrasi ini menyangkut sistem nilai dan norma masyarakat.

“Nilai adalah ide-ide masyarakat akan sesuatu yang baik, sedang norma merupakan suatu patokan tingkah laku manusia yang memberikan pedoman agar supaya manusia memenuhi nilai-nilai masyarakat tersebut.

Sistem adalah suatu kesatuan organis yang terdiri dari berbagai bagian dengan berbagai peranan dari berbagai segi dalam rangka saling berhubungan antara bagian dengan bagian lainnya serta antara dari yang satu dengan peranan dari segi yang lainnya dalam rangka proses perkembangan kesatuan tersebut guna mencapai tujuan yang dikandungnya”

Disorganisasi merupakan proses melemahnya norma-norma dalam masyarakat serta menimbulkan problem sosial.

Problem sosial sebagai penyimpangan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Dalam disorganisasi sosial individu menarik diri dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara langsung ataupun tidak langsung. Proses modernisasi yang terlalu cepat menimbulkan cultural lag dan technological lag, juga menyebabkan masyarakat tidak sempat mengadakan reorganisasi atas norma-norma yang membeku sebagai akibat disorganisasi sosial. Modernisasi bersifat preventif konstruktif. Agar modernisasi tidak mengambang, sebaiknya dapat memproyeksikan kecenderungan yang ada dalam masyarakat kearah waktu yang datang.

B. Disorganisasi Sosial

Sebelum kita membicarakan konsep disorganisasi sosial maka perlu memahami pengertian masyarakat.

“Masyarakat ialah sekelompok manusia yang merupakan kesatuan daerah fungsional dan kebudayaan”

Dalam pengelompokan ini harus ada hubungan batin dan saling pengaruh. Masyarakat memiliki norma (suatu peraturan umum tentang kelakuan dan perbuatan), lembaga sosial (tiap bentuk kerjasama dan pergaulan hidup, di dalam mana menjelma kehidupan masyarakat secara organisatoris). Masyarakat bagaikan

tubuh manusia yang terdiri dari berbagai-bagai bagian yang saling berhubungan dan berpengaruh timbal balik. Apabila terjadi perubahan dalam salah satu bagian masyarakat, maka keseimbangan terganggu. Keseimbangan hanya dapat pulih dengan penyesuaian pada perubahan itu. Ada kalanya perubahan itu berjalan cepat disertai suatu bentrokan-bentrokan sehingga keseimbangan semakin terganggu. Keadaan seperti ini menimbulkan kekacauan dalam organisasi sosial yang lazim disebut disorganisasi sosial. Dalam kondisi disorganisasi sosial maka norma, peranan dan corak-corak

Kelakuan yang diwariskan dan sudah tertera oleh masyarakat seolah-olah tidak dapat mengikat lagi, sehingga terjadi penyelewengan-penyelewengan. Cuber mengatakan, disorganisasi merupakan suatu fase perubahan ke arah pertumbuhan norma baru. Dalam pertumbuhan ini terjadi trial and error, tetapi sekalipun demikian kita harus percaya bahwa hal itu sebagai suatu perkembangan ke arah integrasi di masa depan.

Perubahan sosial menyangkut semua transformasi yang mempengaruhi struktur sosial dan perikelakuan suatu masyarakat.

Karena masyarakat itu suatu sistem dalam interaksi, maka transformasi struktur dalam suatu bagian sistem itu menimbulkan ketegangan-ketegangan dan pertentangan, akibatnya membutuhkan proses penyesuaian dalam sektor-sektor yang lain. Dalam interaksi sosial itu terlibat individu, kelompok-kelompok. Dengan kata lain mereka mengalami akibat proses-proses itu, yang mana menimbulkan problem-problem khusus dalam rangka penyesuaian. Dalam transformasi itu tingkah laku-tingkah laku sosial melepaskan diri dari kebiasaan kultural, sehingga terjadilah modifikasi di lapangan adat kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan. Memang perumahan kultural adalah sifat khas segala masyarakat, hanya yang menjadi

persoalan apakah perubahan itu secara evolusi atau revolusi? Seandainya perubahan itu secara revolusi maka ini menuntut penyesuaian yang lebih berat yang impactnya terhadap masyarakat/individu. Transformasi merupakan akibat dari penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi. Dalam masyarakat modern penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi menyebar dengan irama yang tidak terkekang. Dan hasilnya penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi itu saling memasuki bidang masing-masing. Melenyapnya organisasi kekeluargaan dan integrasi, konflik nilai-nilai serta ditinggalkannya norma adalah akibat dari masuknya peradaban secara tiba-tiba yang sifatnya modern.

Segi lain yang meminta perhatian dalam perubahan sosial adalah di bidang demografi. Dalam masyarakat tradisional penelitian penduduk, struktur penduduk, stratifikasi tidak menjadi persoalan. Malahan dalam masyarakat tradisional tempat kedudukan anggota (menurut umur, seks, fungsi) lokalisasi geografis telah diatur. Dalam transformasi ke masyarakat modern hal-hal itu akan terseret, sehingga timbul urbanisasi.

Gejala urbanisasi merupakan alat istimewa dalam perubahan sosial. Berhubung dengan mobilitas yang ditimbulkan dan anonim yang diakibatkan urbanisasi maka nilai-nilai kultural lembaga sosial akan melemah. Dan fenomena ini merupakan permulaan kesusahan-kesusahan dan problem sosial yang khusus. Selain fenomen urbanisasi tampak nomadisme dalam masyarakat. Gejala nomadisme modern (perpindahan setiap hari antara tempat tinggal dan tempat kerja) menjadi alat perubahan sosial, karena hal itu memisahkan orang yang bersangkutan dari hubungan sosial, kebudayaannya yang lama ke hubungan sosial yang baru yang belum mantap. Dengan demikian terbentuklah marginal man yang di bidang psikis dan efektif terkatung-katung antara dua kebudayaan.

Karena dalam interaksi sosialnya marginal-man tersebut menghadapi problem sosial maka hal itu baginya merupakan problem khusus. Akibat yang sama akan terasa pula dalam pedesaan di mana desa-desa mengalami kegelisahan karena brain drainage (warga-warga desa yang terpandai beremigrasi). Keadaan ini membawa problem penyesuaian kepada situasi baru yang menuntut sebelumnya asimilasi sosio-kultural. Akibat pembaharuan itupun menyusup dalam lembaga keluarga. Keluarga sebagai lembaga dasar bagi masyarakat mengalami transformasi. Penganalisaan fungsional menunjukkan telah terjadi perbedaan keluarga sekarang dengan keluarga dulu. Melemahnya fungsi-fungsi menciptakan situasi status anggota keluarga, khususnya tempat ibu dalam keluarga. Melemahnya fungsi-fungsi, perubahan status anggota keluarga, luntarnya organisasi masyarakat, terjadi konflik nilai-nilai membutuhkan penyesuaian. Akibat dari itu semua lenyaplah suatu sistem referensi dan regulasi yang memainkan peranan hakiki dalam keutuhan penyatuan sosio kultural individu dan kelompok juga dalam perubahan sosial itu terjadi perubahan mentalitas sakral ke arah mentalitas sekularis. Dalam mentalitas sakral semua warisan lama (tradisi, tingkah laku) sangat dipegang teguh, sedang

Mentalitas sekuler bersifat utiliter (menggunakan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari). Jadi mentalitas sekuler merupakan penggerak perubahan sosio kultural. Dalam perubahan sosial pelbagai unsur kebudayaan tidak berubah dengan irama yang sama, tetapi ada interdependensi di antara unsur-unsur itu. Perubahan dalam salah satu unsur menimbulkan penyesuaian dari pelbagai sektor lain. Peradaban materil pada umumnya relatif lebih cepat berubah dari peradaban non materil. Kelambatan-kelambatan peradaban non materil merupakan tiadanya penyesuaian sosial akibat lambatnya perkembangan lembaga karena kurangnya penemuan-

penemuan dalam bidang non materil. Dengan kata lain terjadi disorganisasi sosial, yang menimbulkan problem sosial. Perubahan sosial yang cepat mengakibatkan kelemahan budaya, di mana organisasi kemasyarakatan senantiasa ditunggu oleh pertentangan cara hidup lama dan tuntutan yang dinamis dari situasi-situasi yang baru. Pertentangan ini menimbulkan problem sosial yang melibatkan hubungan antara kelompok inapun hubungan antara individu. Dengan kata lain kelambatan budaya berpengaruh terhadap individu antara lain menghalangi penyesuaian diri individu. Di satu pihak dituntut tunduk kepada kondisi eksistensi materil sedang di pihak lain dipengaruhi nilai norma lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan situasi riil, Dengan kata lain norma lama tidak berlaku, sedang norma baru belum menemukan bentuk yang definitif.

Penyelesaian yang diambil individu dalam bidang keagamaan di benua Amerika, Eropa ialah dekristianisasi, sedang dalam bidang seksuai terdapatnya cinta bebas; sedang di bidang keluarga dengan ineningkatnya broken home. Dengan hilangnya hubungan kultural yang pokok, maka individu-individu mengalami bermacam pertentangan sosial/kultural. Perubahan kultural menimbulkan gangguan dalam hubungan mikrososiologis yang pada akhirnya gangguan itu mengacau individu. Transformasi sosio kultural mengakibatkan pertentangan dalam masyarakat, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. *Perubahan mengancam kepentingan yang sudah tetap.*

Golongan-golongan yang telah mewarisi hak-hak istimewa dalam kondisi yang sedang berlaku, tentu menentang perubahan tradisional; karena takut kehilangan hak istimewa. Golongan ini dengan gigih mempertahankan kondisi tradisional.

2. *Perubahan menghancurkan kebiasaan.*

Manusia hidup atas dasar kebiasaan dan kebiasaan itu akan hancur bila terjadi perubahan. Sepanjang fase sosialisasi individu ada dalam proses menghayati kelakuan, nilai, tujuan, norma-norma masyarakat. Unsur kultural ini masuk ke dalam kepribadiannya dengan perantaraan lingkungan sosial. Inilah sebabnya ancaman terhadap perubahan unsur kultural ini dianggap sebagai ancaman terhadap kepribadian. Inovasi mengundang reaksi individu untuk memusuhi inovasi tersebut. Terhadap ancaman ini naluri keagamaan berjaga-jaga. Rasa aman bergantung pada berlangsungnya nilai-nilai pokok. Perubahan membuyarkan nilai-nilai serta membangkitkan rasa takut dalam diri individu. Sesuai dengan pernyataan Parsons bahwa masyarakat modern menciptakan banyak situasi yang membangkitkan rasa takut menghadapi eksistensi, sebagai akibat kedinamisan masyarakat modern tersebut.

3. *Perubahan membawa pola-pola baru tingkah laku.*

Dengan munculnya pola-pola baru berarti lenyaplah pola-pola lama. Lenyapnya pola-pola kelakuan tradisional dan munculnya pola-pola baru menimbulkan ketegangan-ketegangan. Ada kemungkinan pola-pola lama secara lambat menghilang dan pola-pola baru muncul secara lambat, proses desintegrasi lambat. Proses seperti itu tidak begitu berbahaya karena masih ada kesempatan “bernafas”. Tetapi sangat dramatis bila pola-pola lama lenyap sebelum pola-pola baru muncul, sehingga masyarakat kehilangan pedoman/pegangan. Masa periode transisi itu menimbulkan ketegangan-ketegangan, problem sosial dan neurose.

Seorang yang neurose (sociose) hubungan dengan pribadinya sendiri maupun dengan orang lain kurang

menyenangkan. Reaksinya akan mengundurkan diri dari hubungan sosial dan berada dalam keadaan isolasi mental. Akibatnya kebutuhan sosialnya tak terpenuhi, seperti: *the desires for new experience, for security, for intimate response and for recognition*. Karena masyarakat terdiri dari individu-individu maka tidaklah mengherankan kalau pada suatu saat timbul masyarakat yang neurotoid yang terdiri dari individu yang neurotis.

Masyarakat yang neurotis tidak memiliki daya integrasi terhadap social change, sehingga membawa disorganisasi sosial, desintegrasi sosial yang semakin parah.

C. Pengaruh Terhadap Keamanan

Dinamisme sosio kultural dapat menimbulkan gejala *juvenile delinquency*. Manifestasi perubahan sosial itu dalam diri pemuda yang sedang mencari own identitynya adalah sebagai berikut:

1. Penghayatan yang salah karena lemahnya daya persepsi pemuda sekitar *sense of value*. Pemuda-pemuda pada umumnya mengidentifer dirinya dengan pemuda yang berasal dari *the upper class*. Segala kelakuan *anak the upper class* dilihatnya sebagai kelakuan yang terpuji dan periu dicontoh. Orang tua yang merupakan sumber norma tidak lagi berpengaruh karena kekurangan dialog dengan anak-anak yang memerlukan informasi.
2. Kondisi-kondisi yang tidak *favourable*, memberi respon sayang tak sehat dalam pertumbuhan watak. Gejala urbanisasi menimbulkan dislokasi, seperti pengangguran, perumahan yang sempit. Hal ini dapat menimbulkan problem seks pada anak-anak/pemuda karena melihat pergaulan yang intim dari orang tua karena sempitnya ruangan. Adakalanya anak

yang berbeda seks tidur dalam satu ranjang, padahal secara psikologis harus terpisah, seperti pada fase Genitals.

3. Timbulnya organisasi pemuda yang bertujuan mengadakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan *youth values* mereka. Partisipasi mereka dalam seluruh kegiatan kehidupan merupakan proklamasi ketidakpuasan. Dalam organisasi tersebut dinamika sosialnya mewujudkan diri sepenuhnya sebagai usaha menunjukkan eksistensinya.

Pola kehidupan pemuda tersebut dapat merupakan pendorong bagi modernisasi asal lebih dahulu mengalami proses institusionalisasi. Sebab bila tidak mengalami proses tersebut dapat mengarah kepada disorganisasi. Keadaan ini dapat menimbulkan juvenile delinquency karena pemuda tidak melihatnya adanya norma. Hal ini berpengaruh terhadap segi keamanan, timbulnya kejahatan. Seperti kita maklumi bahwa setiap perubahan (pembangunan) menimbulkan hal yang bersifat positif dan negatif. Dalam saat pembangunan berhadapan nilai harapan (*value expectation*) dan nilai kesanggupan (*value capabilities*). Bila kedua nilai ini tidak sejajar maka timbullah jurang pemisah. Dengan kata lain bila harapan yang ditimbulkan pembangunan itu lebih besar dari kesanggupan kita maka akan timbul kekecewaan yang dimanifestasikan dengan tindakan anti sosial kejahatan.

Ada tiga kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat:

- a. Nilai harapan tetap, sedang kesanggupan menurun. Hal ini menciptakan jurang kekecewaan sehingga yang bersangkutan memencilkan diri dari masyarakat (*decremental deprivation*).
- b. Nilai harapan berubah, sedang kesanggupan menetap (*aspiration de-privation*).
- c. Nilai harapan dan nilai kesanggupan secara bersama meningkat sementara, kemudian nilai kesanggupan menurun tetapi nilai

harapan meningkat terus sehingga pada suatu saat nilai harapan tidak bisa dikejar nilai kesanggupan.

Ketiga kondisi ini membuka penyimpangan tingkah laku, penyimpangan nilai yang berlaku dalam masyarakat, antara lain :

- a. Tingkah laku di luar ketentuan hukum serta nilai masyarakat misalnya: kejahatan, pemberontakan, kriminalitas bertambah banyak antara lain: *white collar crime*, korupsi, vandalisme. Hal ini terjadi karena orang aktif mengejar nilai harapan.
- b. Tingkah laku atas dasar hukum serta nilai masyarakat tetapi orang bersangkutan berbeda dalam situasi terasing (alienasi).

Keadaan ini menciptakan SIKAP YANG REAKTIF : resigned, pasif, mencari nilai substitusi yang dimanifestasikan dengan memasuki aliran kebatinan, aliran lain (arisan?). Oknum ini pasif mengejar nilai harapan, tetapi aktif mengejar nilai substitusi. Kelompok yang alienasi biasanya bergabung dalam kelompok subkultur (*counter culture*) yang ada dalam masyarakat. Subkultur ini dapat dibagi :

- a. Yang sifatnya dissident group. Kelompok ini aktif mencari nilai substitusi di dalam rangka mengejar nilai harapan. Mereka ini bersikap menunggu transformasi sosial yang baru di mana nilai substitusi submerge, menyusupkan nilai yang diharapkan. Kelompok ini merupakan ancaman keamanan baik dalam jangka lama maupun dalam waktu yang dekat
- b. Yang sifatnya non dissident group. Kelompok ini tetap berada dalam nilai substitusinya yang relatif langgeng. Berharap mencapai nilai harapannya pada suatu dunia lain seperti pembalasan di akhirat. Kelompok ini merupakan ancaman keamanan karena tindakan inasih berdasar hukum dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

D. Tanda-tanda Perubahan

Perubahan sosial ditandai adanya :

1. *Differential social organization*
2. Individualisme politik dan ekonomis
3. *Mobility (mobilitas)*
4. *Culture conflict*
5. Tendensi ke arah terorganisasi kembali

1. Differential Social Organization

Dalam masyarakat primitif, pengaruh keluarga sangat besar. Keluarga sebagai unit masyarakat yang terkecil tetap menjalankan fungsinya. Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat tetap terjalin, tindakan-tindakan individu seragam. Tindakan individu yang menyimpang dari norma terlihat dengan jelas, sehingga dengan cepat mendapat teguran dari masyarakat sekelilingnya. Organisasi sosial mengadakan pengawasan untuk memungkinkan terpeliharanya keseragaman norma. Pengakuan akan keseragaman norma ini akan memperkecil timbulnya kejahatan. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang terpengaruh arus kemajuan sebagai akibat terlibatnya dengan dunia luar, sehingga menimbulkan perubahan sosial. Karena itu ada norma-norma yang dulu dianut, sekarang ditinggalkan karena tidak sesuai dengan tuntutan jaman. Padahal norma baru belum ada sebagai pengganti norma tadi. Akibatnya tidak lagi ada norma untuk keseragaman penafsiran dan tindakan. Dengan demikian terjadi samar pola norma. Kesamaran pola ini terjadi sebagai akibat pertemuan organisasi sosial yang berbeda (pengaruh dunia luar) yang masing-

masing memiliki norma. Kelompok sosial yang berbeda ini dapat saling menimbulkan reaksi yang negatif terhadap norma yang bukan norma kelompoknya. Apabila keadaan ini demikian intensifnya, maka telah terjadi *social disorganization* (keberantakan sosial). Masyarakat yang berantakan tidak lagi memiliki keseragaman norma, cita-cita. Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mengetahui norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar.

2. Individualisme Politik dan Ekonomis

Kemajuan di lapangan teknik mendorong perubahan pemikiran ideologi, politik dan ekonomi. Kemajuan ekonomi menimbulkan sikap individualisme. Ideologi individualisme menyusup ke dalam lapangan ekonomi, agar inisiatif perseorangan dalam kegiatan ekonomi diberi kelonggaran. Ideologi ini menginginkan agar pengawasan pemerintah di bidang ekonomi dihapuskan. Dengan demikian tercipta kebebasan, perubahan norma. Dengan demikian tercipta kebebasan, perubahan norma dari yang lama ke yang baru. Perubahan struktur sosial ini menunjukkan adanya pergeseran norma, perubahan, keseragaman penafsiran. Pergeseran norma ini menimbulkan kejahatan, karena norma dulu tidak diikuti, dilanggar. Setiap pelanggaran merupakan crime. Di lapangan politik timbul revolusi demokrasi. Revolusi demokrasi menurut derajat sama harkat, memiliki kebebasan mengutarakan pendapat. Ideologi individualisme dalam politik memberontak terhadap ikatan tradisional yang mengekang kebebasan diri.

3. Mobilitas

Dengan terjadinya revolusi industri dan revolusi demokrasi, maka terjadi pula mobilitas baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Revolusi industri memungkinkan

orang untuk mobilitas liorizental, orang-orang di desa berpindah ke kota. Sedang revolusi demokrasi merangsang untuk mobilitas vertikal, seseorang dapat berubah status. Dmpama: seorang petani menjadi anggota DPR.

Akibat mobilitas ini merengganglah hubuhgan keluarga dan hubungan lingkungan. Fungsi keluarga tidak berjalan semestinya, karena kesibukan, mengejar kemewahan dan perubahan status. Akibatnya fungsi keluarga sebagian diserahkan ke lembaga sosial. Demikian juga lingkungan tidak lagi efektif mengadakan pengawasan terhadap individu sebagai akibat nomadisme. Dalam nomadisme individu yang bersangkutan akan menjadi marginal man vang secara psikis dan efektif sangat labil. Keadaan ini gampang brrbuat kejahatan.

4. **Culture Conflict**

Culture conflict disebabkan terjadinya pertemuan norma dari borbagai kelompok sosial yang berbeda. *Culture conflict* dapat incngakibatkan seseorang kurang mantap dalam pergaulan, sehingga terjadi kejahatan. *Culture conflict* dalam menimbulkan kejahatan berlangsung dalam 3 cara yaitu :

- a. Bertemunya berbagai norma pada daerah perbatasan. Dari suatu penelitian yang dilakukan oleh Evelyn Crook di AS ternyata 86% gadis-gadis menjadi delinquency terdapat di daerah perbatasan yang berpenduduk heterogen.
- b. Terjadinya pertentangan norma-norma penjajah dengan norma yang dijajah dalam daerah jajahan. Ketika Soviet menjajah Siberia, maka wanita yang mengikuti hukum Soviet lepaskan kain penutup muka dibunuh di Siberia.

c. Kombinasi butir (point) 1 dan 2 :

Para Psychiater dan Social worker mengatakan bahwa konflik dalam rumah tangga berpengaruh terhadap emosi sehingga anak mengalami gangguan emosi. Dan hal ini merangsang untuk menjadi delinquency. Levy mengatakan perbedaan tingkah laku, bahasa, cita-cita orang tua merupakan faktor yang homogen.

Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, dan tiap kebudayaan mempunyai norma-norma yang berbeda satu sama lain. Tingkah laku individu dipengaruhi oleh kebudayaan, masyarakat di mana individu itu hidup. Dalam masyarakat ada social different yang melahirkan differential organization differential association, yang memiliki norma-norma tertentu. Karena setiap organisasi sosial memiliki norma-norma tertentu yang kemungkinan saling bertentangan, maka individu-individu dari organisasi sosial yang berlainan akan merasa asing terhadap norma-norma itu.

Bila norma-norma dari suatu kelompok diberlakukan kepada kelompok lain, maka akan terjadilah, konflik norma atau *culture conflict*. *Culture onflict* menimbulkan mental konflik, dan mental konflik dapat menimbulkan kejahatan. Inilah sebabnya Sutherland mengatakan *culture conflict* merupakan dasar terjadinya kejahatan, sedang Taft mengatakan “*Crime is product of culture*”. Pertemuan norma dapat terjadi pada saat pertemuan dua kebudayaan yang berlainan. Pertemuan ini menimbulkan *marginality*, *heterogenity*, *hybridisme*. Dalam *culture conflict* timbul kebingungan karena samarnya nprma. Karena kesamaran norma itu

maka timbullah pelanggaran individu-individu terhadap pemilihan salah satu norma yang bertentangan.

Dalam *culture conflict*, *culture controle* melemah lalu kejahatan timbul. Seperti diketahui tindakan manusia dibimbing norma dan obyek identifikasi. Dalam *culture conflict* obyek identifikasi goyah. Bila *culture conflict* sangat hebat, *culture lag* terlalu banyak dan *culture controle* melemah, maka timbullah *social disorganization*. Individu yang hidup dalam *social disorganization* itu melahirkan individual disorganization. *Social disorganization* me-rusak mekanisme kebiasaan. Individual disorganization berada dalam kekacauan mental yang disebabkan mental konflik yang bersumber dari *culture conflict*. Louis Wirth mengatakan bahwa *culture conflict* merupakan faktor penting dalam timbulnya kejahatan. Bila individu merasakan adanya konflik tersebut, maka jiwa individu goncang dan akan melahirkan perbuatan anti sosial. Bila sebagian besar individu anggota masyarakat melakukan perbuatan anti sosial, berarti sebagian besar tidak memiliki suatu pola keseragaman penafsiran maka masyarakat tersebut mengalami *social disorganization*. Dalam *social disorganization* terdapat keadaan norma, pola-pola tingkah laku yang diwariskan dan yang sudah tertera oleh masyarakat, seolah-olah tidak dapat mengikat lagi. Dengan demikian terjadi banyak penyelewengan. Dorkheim inenyebut keadaan ini *anomie*.

E. Tendensi Ke Arah Terorganisasi Kembali

Sistem individualisme perdagangan diperbaharui dengan sistem kerja sama. Dengan kerjasama ini, maka tingkah laku dan kesempatan

perseorangan dibatasi, sehingga terbentuklah keseragaman norma. Kalau dulu perkembangan dari sistem feodalisme, absolutisme ke industrialisme, dari kolektivitas ke individualisme, inaka sekarang ada tendensi dari individualisme ke kolektivisme. Hal ini menunjukkan tendensi menuju integrasi sosial. Untuk mencapai integrasi sosial ini ada 4 tendensi, sebagai berikut :

1. Meluasnya keseragaman tingkah laku melalui mass media.
2. Adanya keseragaman sikap. Hal ini terlihat di Eropa pada masa Nazi Jerman, dan Facisme di Italia.
3. Timbulnya gerakan penghidupan desa di kota antara lain sistem RT

Ide-ide untuk mendesakan kehidupan kota adalah suatu nsaha memperkuat hubungan batin antara individu yang selama ini mulai pudar di kota. Sistem RT/RK merupakan usaha mengelompokkan kembali anggota masyarakat dengan keseragaman nor

4. Keseragaman ilmu pengetahuan.

Para ahli berusaha mengembalikan ke arah homogenitas. Prinsip-prinsip organisasi masyarakat diseragamkan, sehingga tercipta kesatuan pandangan.

Naik turunnya kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, seperti : politik, ekonomi, kebudayaan, pergaulan. Memang differential social organization dapat menimbulkan kejahatan dengan memperhatikan faktor umur dan watak. Disposisi psikologis dan sosiologis mempengaruhi crime rate. Keadaan politik, ekonomi dapat merubah norma, dan perubahan norma dengan sendirinya merubah pandangan orang di masyarakat. Perubahan norma yang terus menerus menyebabkan anomie dalam masyarakat sebab individu tidak tahu lagi norma mana yang harus diikuti. Fluktuasi ekonomi

selalu diikuti meningkatnya statistik kriminal baik statistik kriminal yang dilakukan oleh orang yang lemah ekonominya maupun oleh orang yang baik ekonominya.

F. MODERNISASI

Pengertian Modernisasi

1. Alex Inkeles : modernisasi adalah sikap-sikap tertentu yang menandai manusia dalam setiap masyarakat modern
2. Astrid S.Susanto: modernisasi adalah proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan
3. Oghburn dan Nimkoff: modernisasi tidak sama dengan reformasi yang menekankan pada factor-factor rehabilitasi. Modernisasi bersifat preventif dan konstruktif
4. Soerjono Soekanto : modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (directed change) yang didasarkan pada suatu perencanaan yang disebut sosial planning
5. J.W. School : modernisasi merupakan penggantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang tertampung dalam pengertian revolusi industri. School merumuskan penerapan ilmu pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas merupakan factor penting dalam modernisasi

Dilihat dari definisi diatas modernisasi dapat dilihat sebagai suatu perubahan fisik yaitu cara-cara tradisional kearah modern atau penggunaan teknologi atau mesin serta dari pola pikir yaitu pola pikir tradisional menjadi pola pikir rasional. Praktis dan efisien

Syarat modernisasi menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Cara berfikir yang ilmiah (scientific thinking)
2. Sistem administrasi yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi

3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat
4. Penciptaan iklim yang favourable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa
5. Tingkat organisasi yang tinggi
6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial

Setiap modernisasi hal yang paling mendukung adalah sumber daya manusia modern. Adapun konsep manusia modern dikemukakan oleh Alex Inkeles adalah sebagai berikut:

1. Bersikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru dan penemuan-penemuan baru
2. Senantiasa siap menerima perubahan
3. Mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi di sekitarnya
4. Senantiasa mempunyai informasi yang lengkap mengenai pendiriannya
5. Lebih banyak berorientasi ke masa kini dan masa mendatang
6. Senantiasa menyadari potensi-potensi yang ada pada dirinya
7. Tidak pasrah pada nasib
8. Percaya pada kemampuan iptek
9. Menyadari hak-hak, kewajiban serta kehormatan orang lain

G. GLOBALISASI

Pengertian Globalisasi menurut beberapa ahli adalah :

1. Selo Soemardjan : globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia. Tujuan globalisasi adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama misalnya terbentuknya PBB, OKI

2. Menurut Anthony Giddens (1989), proses peningkatan kesalingtergantungan masyarakat dunia dinamakan dengan globalisasi. Ditandai oleh kesenjangan tingkat kehidupan antara masyarakat industri dan masyarakat dunia ketiga (yang pernah dijajah Barat dan mayoritas hidup dari pertanian)

Masyarakat penerima globalisasi ada yang mampu menerima globalisasi tersebut atau ada yang menolak. Masyarakat yang menolak biasanya adalah:

1. Kelompok masyarakat yang belum mapan/belum siap menerima perubahan
2. Kelompok masyarakat tertinggal yang terasing
3. Kelompok masyarakat dari kalangan generasi tua yang cenderung mencurigai globalisasi

Adapun kelompok masyarakat atau individu yang menerima globalisasi adalah

1. Kelompok masyarakat yang kedudukan atau status sosialnya sudah mapan
2. Kelompok masyarakat kota yang telah menikmati berbagai media komunikasi dan informasi globalisasi
3. Kelompok masyarakat dari kalangan generasi muda yang memiliki kecenderungan terbuka menerima unsur-unsur perubahan dan modernisasi

Dampak Perubahan Sosial Budaya Akibat Modernisasi dan Globalisasi

Dampak positif modernisasi adalah:

1. Tercapainya kemajuan kebudayaan bangsa
2. Meningkatnya industri yang memungkinkan masyarakat lebih sejahtera (lapangan kerja, barang konsumsi, volume ekspor dan lain-lain)

3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kerja, transportasi dan komunikasi
4. Meningkatnya sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia

Dampak negatif modernisasi antara lain:

1. Pudarnya pengetahuan tradisional
2. Pudarnya sistem kepercayaan atau religi tradisional
3. Bergesernya nilai budaya akibat kemajuan di bidang teknologi dan pengetahuan
4. Melemahnya etos kerja tradisional
5. Meningkatnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja
6. Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan
7. Menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi

Dampak positif globalisasi:

1. Masuknya nilai-nilai positif (disiplin, etos kerja, pentingnya pendidikan)
2. Mempercepat proses pembangunan karena perkembangan iptek
3. Menumbuhkan dinamika terbuka dan tanggap terhadap unsur-unsur pembaruan

Dampak negatif globalisasi:

1. Terjadinya cultural shock, yaitu masyarakat mengalami disorientasi dan frustrasi karena tidak siap menerima kenyataan perubahan akibat globalisasi
2. Terjadinya cultural lag yaitu unsur-unsur globalisasi tidak berlangsung secara serempak
3. Anomi, yaitu keadaan tanpa nilai karena nilai dan norma lama telah ditinggalkan sedang nilai dan norma baru belum terbentuk.

H. Inovasi-Difusi

Masuknya sesuatu unsur, umumnya secara selektif, dari suatu pola kebudayaan ke pola lain, disebut difusi. Unsur itu dalam pola kebudayaan penerima dapat menghasilkan perubahan. Menelaah proses difusi dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan syarat-syarat yang mempermudah atau menghambat proses penerimaan baru ke dalam pola penerimaan serta menunjuk pada akibatnya pada masyarakat penerima unsur baru itu.

Pendapat baru (inovasi) yang diciptakan di dalam sistem masyarakat itu sendiri juga merupakan pendorong pada perubahan sosial. Pendapat baru hasil pola sendiri atau difusi unsur dari luar, ada yang berupa suatu teknologi baru atau benteng organisasi baru. Walaupun masyarakat tradisional lebih sering digambarkan mengalami perubahan sosial karena masuknya unsur dari luar, sebenarnya proses difusi itu dapat berupa pertukaran unsur antar dua pola. Masyarakat kota yang modernpun menerima unsur-unsur dari pola desa. Sebagian dari tradisi lama sesuatu bangsa bahkan dapat memberi corak dan arah pada perkembangan pola modern (“modernity of tradition”). Unsur “ajar” adalah suatu alat penting dalam perubahan sosial. Mendidik umumnya diartikan merubah sikap, nilai dan norma seseorang atau suatu kelompok.

KELOMPOK DAN ORGANISASI

A. Konsep kelompok dan organisasi

Kelompok adalah terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, interaksi tersebut bersifat relative tetap dan mempunyai struktur tertentu (Jones, 1994). Selanjutnya berdasarkan rumusan tersebut Duncan menyebut empat ciri utama kelompok, yaitu : (1). Anggota suatu kelompok, paling tidak harus punya satu tujuan bersama. (2). Hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. (3). Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat/status, karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. Dan (4). Karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai oleh pola tingkah laku dan sistem nilai bersama. Setiap anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut.

Menurut Miftah Toha (2003), alasan mengapa seseorang tertarik kepada lainnya, sehingga terjalin hubungan kelompok :

1. Kesempatan berinteraksi, dasar pokok yang amat penting dari daya tarik antar individu dan pembentukan kelompok adalah karena adanya kesempatan berinteraksi satu sama lain. Kesempatan berinteraksi dan yang dihubungkan dengan lingkungan ini dapat dibedakan karena jarak fisik dan jarak psikologis.

2. Status, status merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam daya tarik antar individu, siapa berinteraksi dengan siapa, seringkali status merupakan faktor penentu.

Ada dua tendensi dibidang status ini, yakni seseorang tertarik kepada orang lain karena adanya kesamaan status, dan seseorang itu lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai status lebih tinggi.

3. Kesamaan latar belakang, latar belakang yang sama merupakan salah satu faktor penentu dari proses daya tarik individu untuk berinteraksi satu sama lain. Kesamaan latar belakang, seperti misalnya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, ras dan status sosio-ekonomi seseorang akan memudahkan mereka untuk menemukan daya tarik beriteraksi satu sama lain.
4. Kesamaan sikap, kesamaan sikap ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari kesamaan latar belakang. Orang-orang yang mempunyai kesamaan latar belakang nampaknya mempunyai kesamaan pengalaman, dan orang yang mempunyai kesamaan pengalaman ini akan memudahkan untuk berinteraksi. Kesamaan yang didasarkan kepada pengalaman itu akan membawa orang-orang ke arah kesamaan sikap.

Kelompok mempunyai fungsi untuk dijadikan sebagai wadah saling belajar dan mengajar, merumuskan dan memecahkan masalah bersama, menggalang potensi bersama, dan menjadikan sarana berinteraksi dengan lembaga luar (Coralie Bryant dan Louise, 1989)

Dengan cara berkelompok akan meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan perekonomian maupun untuk meningkatkan daya tawar terhadap pihak luar. Oleh karena itu petani harus mempunyai kekuatan penawaran melalui kelompok-kelompok yang terdampingi keprofesionalannya, mandiri, dan mempunyai

kemampuan untuk mengembangkan diri dan menjadi kelompok yang kuat (Bambang Ismawan, 2000).

Menurut Sumardjo (2003) sejarah proses terbentuknya kelompok petani pada umumnya adalah :

1. Kelompok yang dibentuk berdasarkan rumusan atau direkayasa demi kepentingan pemerintah, pendekatan seperti ini telah menyebabkan kelompok tani seperti itu, tidak mengakar pada anggota kelompok dan dirasakan petani tidak memenuhi kebutuhan kesejahteraan petani. Pengembangan kelembagaan petani bersifat sentralistis (*top down*) ternyata kegiatannya bias terhadap kepentingan pusat dan cenderung melemahkan berkembangnya potensi potensi lokal.

Kelompok-kelompok seperti itu pada kondisi seperti itu secara obyektif tampak jelas lebih ditempatkan sebagai media untuk indoktrinasi kepentingan dan obsesi pihak dari luar. Gejala tersebut dinilai sebagai fenomena yang mengarah pada ketidak efektifan kelembagaan kelompok. Kelompok yang seperti itu biasanya mengalami pasang surut, sejalan dengan pasang surutnya intensitas pembinaan oleh pihak pemerintah. Dari jenis-jenis kelompok ini sebagian besar tidak bisa berkelanjutan, karena motivasi anggota dalam berkelompok adalah untuk meraih proyek.

2. Kelompok yang dibentuk oleh masyarakat lokal, kelompok tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah. Dalam pengambilan keputusan kelompok ini tampak justru lebih mampu bertahan, bahkan dalam menghadapi pasang surutnya kondisi pertanian secara makro. Kelompok seperti inilah yang mengarah pada terwujudnya efektifitas kelompok, yang antara lain ditandai oleh adanya kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut: kelompok

tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen bagi anggota untuk memenuhi kepentingan anggota dan biasanya dikembangkan oleh anggota atas kesadaran mereka untuk memenuhi kebutuhan para anggota kelompok. Kelompok yang dibentuk dari bawah semacam ini cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat anggota, serta memiliki komitmen anggota yang tinggi. Kelompok tani lebih efektif sebagai wahana media mewujudkan bargaining position untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Menurut Robbins, 1996 (dalam Arifin dkk, 2003), sebuah kelompok dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kelompok: *Pertama*, kelompok formal (*formal group*), didefinisikan oleh struktur organisasi dengan pembagian kerja yang ditandai untuk menegakan tugas-tugas. Selanjutnya kelompok formal dapat diklasifikasikan lagi menjadi (1). Kelompok komando yang dicirikan oleh pengaturannya ditentukan oleh sebuah bagan organisasi. (2). Kelompok tugas yang dicirikan oleh dibentuknya kelompok yang didasarkan pada tugas-tugas tertentu. *Kedua*, Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan kesukaan individu atau kemiripan minat, latar belakang dan karakteristik pribadi. Selanjutnya kelompok informal dibedakan menjadi (1). Kelompok kepentingan, merupakan kumpulan dari sejumlah individu yang tidak tergabung /termasuk dalam anggota dari kelompok tugas maupun komando. (2). Kelompok persahabatan, yaitu mereka yang tergabung bersama-sama karena mereka berbagi satu karakteristik atau lebih. *Ketiga*, Kelompok referensi adalah kelompok apapun yang digunakan oleh individu sebagai sumber nilai, keyakinan, atau sikap pribadi, atau sebagai standart untuk penilaian perilakunya sendiri.

Menurut Soedjono Soekanto ,1997 (dalam Yayuk Yuliati dan Mangku Poernomo, 2003), Sebuah kelompok dapat disebut satu organisasi apabila anggotanya secara sadar merasa bagian dari kelompok yang bersangkutan, ada hubungan timbal balik antara anggota dengan lainnya. Selain itu harus ada faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tersebut dapat berupa persamaan nasib, persamaan tujuan, idiologi politik yang sama dan lain lain. Kelompok juga bisa dikatakan sebagai organisasi juga apabila memiliki struktur, berkaidah, serta mempunyai pola perilaku, juga bersistem dan berproses.

Kelompok-kelompok tani yang dibentuk atas prakarsa masyarakat lokal ada yang menyebut sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM atau dalam bahasa Inggris ditulis *Self-Help Group* pada dasarnya berasal dari kata swadaya : *self-Help Group* adalah suatu kerangka acuan kelembagaan bagi para individu atau rumah tangga yang telah sepakat untuk bekerjasama secara kesinambungan untuk mencapai satu banyak tujuan secara bersama. Terkait dengan hal ini, yang juga harus dipahami yaitu adanya keyakinan bahwa suatu organisasi keanggotaan yang bersifat menyeluruh, yang berarti bahwa keuntungan, biaya-biaya dan resiko-resiko ditanggung dan dimiliki bersama berlandaskan pada pemerataan, termasuk juga adanya konsekuensi bahwa pimpinan atau manajernya wajib mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan para anggotanya. (Anonim, 2002).

Dengan uraian seperti tersebut diatas, maka Kelompok Swadaya Masyarakat mempunyai cirri-ciri spesifik dibandingkan dengan kelompok yang lain, yaitu :

- a) Kumpulan orang, bukan semata-mata kumpulan uang.

Ini menunjukkan bahwa walaupun uang menjadi sarana untuk mencapai tujuan kelompok dalam mmensejahterakan

anggota dan untuk menjalankan roda organisasi, tapi kehadiran orang lebih diutamakan dari pada kehadiran uangnya.

- b). Keanggotaannya berdasarkan kesadaran, sukarela dan terbuka, bukan paksaan.

Dalam hal ini keanggotaan tidak terbatas, berapa dan siapapun orangnya bisa menjadi anggota kelompok yaitu selama mau dan tunduk patuh terhadap aturan dan kesepakatan yang dibuat secara abersama.

- c). Bekerja atas dasar prinsip “dari, oleh, dan untuk anggota”

Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa semua yang dimiliki dan dikelola kelompok berasal dari seluruh anggota kelompok dan dikelola oleh anggota itu sendiri yang dalam hal ini diwakili pengurus kelompok, serta manfaat sebesar-besarnya harus dinikmati oleh anggota.

- d). Kelompok lokal melakukan pendidikan terus menerus.

Pendidikan disini bukan berarti pendidikan secara klasikal, tetapi kelompok harus menciptakan terjadinya wahana saling asah, asih dan asuh diantara anggota, baik melalui agenda pertemuan anggota maupun pengalaman yang dimiliki oleh salah seorang anggota yang kemudian disebarluaskan kepada anggota lain.

- e). Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota, bukan untuk kegiatan politik.

Kelompok lokal bukan organisasi masa dan bukan juga organisasi politik. Kelompok lokal adalah ekonomi produktif sebagai wahana mengatasi dan juga mencari solusi untuk secara bersama-sama menghadapi permasalahan dan kesulitan, terutama dibidang ekonomi, dan masalah-masalah lain pada umumnya.

- f). Mengadakan pertemuan rutin anggota dan pengurus secara teratur.

Pertemuan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kelompok. Artinya, sekali saja tidak mendatangi pertemuan anggota, maka ia merasa rugi, karena pertemuan merupakan wahana bagi proses belajar-mengajar, tempat pengurus kelompok memberikan informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan anggota.

- g). Anggota wajib menabung secara teratur.

Walaupun pada dasarnya uang merupakan faktor kedua setelah orang, tetapi bagaimanapun juga uang menjadi sarana penting bagi operasional kelompok. Tabungan merupakan pengakumulasian potensi yang serba kecil yang dimiliki oleh golongan ekonomi lemah. Walaupun kecil, asalkan secara rutin, maka dengan yang kecil-kecil ini akan menjadi sangat berarti apabila setelah satu periode tertentu uang terkumpul lewat tabungan, kemudian dipinjamkan kepada anggota untuk usaha produktifnya.

- h). Usaha dan tatalaksana organisasi dan kegiatan bersifat terbuka.

Prinsip yang harus ditaati dalam pengelolaan kelompok adalah prinsip pengelolaan secara terbuka dalam semua aspek, termasuk juga dalam hal ini adalah pengelolaan keuangannya.

Kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat local yang berkembang menjadi lebih efektif mempunyai ciri-ciri proses pembentukan segai berikut :

1. Kelompok tersebut pada awalnya dikembangkan oleh tokoh masyarakat (kepemimpinan lokal) berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi anggota kelompok,

tidak mengalami intervensi yang intensif dari pemerintah maupun pihak lembaga lain dalam pengambilan keputusan penting bagi kehidupan kelompok, sehingga keberadaanya benar-benar diwarnai oleh kegotong royongan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat para anggota kelompok. Masyarakat terbangun keyakinan bahwa kelompok benar-benar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

2. Kelompok tersebut dikembangkan ditingkat komunitas yaitu kampung atau ada yang ditingkat RT dan RW.
3. Pada tahap awal kelompok-kelompok tersebut mempunyai kegiatan simpan pinjam, yang aturanya didasarkan kepada kesepakatan anggota yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan para anggotanya.
4. Perkembangan keuangan dilaporkan secara rutin dalam periode waktu tertentu, biasanya dilakukan setiap pertemuan yaitu bulanan (30 hari) atau selapanan (35 hari), Transparansi semacam ini yang tampaknya telah memperkuat sikap dan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap kepemimpinan dan kepengurusan kelompok.
5. Penegakan sanksi dalam norma kelompok diterapkan secara konsisten dan berbasis kepada kepercayaan, norma dan nilai setempat, baik sanksi moral maupun sanksi masyarakat.

B. Perkembangan kelompok lokal

Peter Gubbels dan Catheryn Koss (2001), mengatakan yang dimaksud dengan pengembangan kapasitas kelompok/ organisasi adalah suatu intervensi nyata untuk memperbaiki kinerja organisasi yang berkaitan dengan tujuan, konteks, sumberdaya dan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan organisasi

lokal yang lebih efektif, berketahanan, dan mandiri dengan cara menciptakan kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan perubahan dari dalam diri organisasi itu sendiri. Pengembangan kapasitas membutuhkan proses pengelolaan perubahan organisasi tersendiri dimana pimpinan dan para anggota organisasi belajar mendiagnosa kekuatan dan kelemahan organisasi mereka.

Penguatan kapasitas tidak hanya membutuhkan keterampilan dan perubahan-perubahan dalam perilaku perorangan, tetapi juga perubahan-perubahan dalam perilaku organisasi

Dalam perjalanannya semua organisasi akan melalui berbagai tahap perkembangan. Tidak ada satu organisasi pun yang terbentuk langsung sempurna dengan seluruh kapasitas yang kuat.

C. Organisasi tani

Bagi kelompok lokal yang sudah berkembang, menjadikan anggotanya banyak yang sudah meningkat tingkat kesadaran tentang cara memahami permasalahan kemiskinan. Bahwa penyebab kemiskinan selain disebabkan oleh rendahnya kemampuan SDM petani, selain itu juga kemiskinan karena faktor kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani miskin.

Seperti yang disampaikan Robert Chambers (1983). Sebenarnya petani miskin adalah pekerja keras, setiap hari bekerja untuk dapat bertahan hidup, tetapi mereka termasuk masyarakat yang kurang beruntung karena tiadanya akses dalam pengembangan sumberdaya, akses politik untuk pengambilan kebijakan.

Maka bagi kader tani yang kritis setelah menyadari hal tersebut maka selanjutnya mengorganisir sesama kader dari kelompok lain. Karena dalam rangka melakukan advokasi kebijakan, tidak akan mungkin mampu dilakukan dengan kelompok-kelompok lokal

secara sendiri-sendiri dan harus membutuhkan gabungan kelompok local menjadi organisasi tani yang lebih besar, bisa berbentuk Forum, Jaringan, Asosiasi atau ikatan. Dimana advokasi diartikan sebagai usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (*incremental*), sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. (Roem Topatimasang, 2000).

Seperti yang disampaikan oleh Sarah Longwee (dalam Anonim, 1998). Ketidak berdayaan petani sehingga tidak mampu keluar dari kemiskinan disebabkan karena tidak adanya kesempatan dan pada petani untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan kegiatan dan evaluasi program-program kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, tidak adanya kesempatan untuk ikut melakukan kontrol terhadap sumberdaya.

Pengorganisasian rakyat diperlukan untuk membangun organisasi-organisasi rakyat demi mencapai transformasi nasional dengan memberikan kemudahan bagi rakyat memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Organisasi rakyat (*community organization*) sangat lekat dengan perjuangan kelas tertindas untuk merubah struktur politik, ekonomi, dan kondisi social yang tidak adil.

Difinisi dari (*Community Organization/Organisasi Rakyat*) adalah, dimana kalimat tersebut terdiri dari kata “Organisasi” yang menurut Sheldon (1923), Organisasi adalah suatu proses penggabungan pekerjaan individu atau-kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk

pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.

Sedangkan kata “Community”, menurut Paulus Wirutomo (2003), komunitas (*community*), adalah satu kesatuan masyarakat yang ukurannya relatif kecil sehingga terjadi hubungan yang intensif kedalam daripada keluar dan memiliki kesamaan tertentu.

Karakteristik komunitas sendiri terdiri dari : (1). *Primordial community*, yakni komunitas yang memiliki kesamaan suku, agama, dan ras, (2). *Occupation community*, yakni komunitas yang anggotanya memiliki kesamaan pekerjaan /profesi; (3). *Special community*, yakni komunitas yang terbentuk karena kesamaan tempat tinggal.

Selanjutnya dijelaskan oleh Susetiawan (1991) komunitas menurut definisi PBB adalah, suatu konsep “komunitas” organis dan fisik yang secara implisit telah masuk dalam suatu teori yang selama ini digunakan sehubungan dengan pembangunan masyarakat, suatu kelompok yang mengadakan kontak secara langsung (*face to face*) telah dipersatukan atau diikat oleh nilai-nilai serta obyektivitas masing-masing dengan suatu keselarasan dasar (*basic harmony*) dalam hal minat dan aspirasi

Di Kabupaten Boyolali telah berkembang beberapa organisasi komunitas, mengingat sebagian besar masyarakat petani yang miskin adalah komunitas petani maka perkembangan organisasi komunitas ini adalah Organisasi tani, antara lain adalah : (1). Jaringan Tani Mandiri adalah organisasi komunitas petani yang ada dikawasan lahan kering (Boyolali kawasan bawah kering), (2). Forum Petani Kawasan Bawah Basah, adalah orgaisasi petani yang tinggal di Boyolali kawasan bawah basah, (3). Jaringan Tani Makmur, adalah organisasi petani di kawasan Boyolali bagian atas. (4). Organisasi tani tepi hutan.

D. Organisator (Community organizer/CO)

Untuk melakukan pengorganisaian diperlukan seorang organistaor (selanjutnya disebut CO) yang tangguh dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kaum tertindas. Tugas CO adalah membantu rakyat membangun organisasi-organisasi yang kritis, Demokratis, dan terbuka, yang selanjutnya dapat menentukan isu atau program-program yang dikehendaki rakyat. Inti dari tugas organisator adalah mempersiapkan rakyat untuk menggalang kerja sama yang kritis dalam rangka menghadapi masalah-masalah yang lebih besar.

CO Berbeda dengan Seorang Pemimpin Perbedaannya adalah sebagai berikut :

Pemimpin, Orang yang dengan jabatan dan kekuasaan yang diperolehnya menggunakan kekuasaannya untuk mengornaisir rakyat, mengadakan rapat, menjadi juru bicara, dan mendidik rakyat untuk berpikir dan merasa sebagai satu kesatuan. Sedangkan kalau *CO*, orang yang selalu bersama rakyat, mengagitasi rakyat, dan kemudian mendapat partisipasi dari rakyat. CO tidak memegang jabatan formal dan tidak menjalankan sendiri kekuasaan, tidak memimpin rapat, dan tidak menjadi jurur bicara. CO adalah pembantu rakyat (bekerja dibalik layar) untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Tidak ada aturan dan syarat baku untuk menjadi seorang CO. namun pada prinsipnya CO harus memiliki kualitas sebagai berikut :

- Dasar dari CO adalah self sufficiency, yaitu percaya bahwa potensi untuk memenuhi kebutuhan ada dikonumiytas sendiri (daerah, negara, bumi, dunia)
- Percaya bahwa tidak ada konsep pemberian (dari pihak penguasa atau penindas) yang ada adalah bahwa rakyat harus meminta, menuntut, dan merebut hak-haknya

- Luwes dalam bergaul atau melakukan pendekatan, dan peka terhadap lingkungan serta perubahan situasi. Karena itu CO harus siap untuk merubah rencana dan taktik sesuai dengan situasi
- Kreatif dan selalu melihat dan mendengar suara-suara rakyat dan persoalan yang muncul. CO adalah seorang pendengar yang sadar dan akan mengumpulkan semua data.
- CO harus teguh hati, berpegang pada tugasnya dan bersedia untuk memenuhi rakyat kapan saja dan di mana saja serta berbicara dengan mereka, meskipun pada awalnya rakyat terlihat apatis dan masa bodoh.
- Kecintaan yang dalam terhadap rakyat, namun tetap mendorong rakyat menghadapi persoalan dan kesulitannya sendiri serta berjuang terus agar benar-benar mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
- Tidak memiliki rasa hormat terhadap penindas dan musuh-musuh rakyat. Bagi CO tidak ditolak. Rasa tidak hormat ini adalah bentuk lain dari kecintaan dan hormatnya pada rakyat
- CO harus tetap gembira dan humoris untuk menjaga keseimbangan diri dan tugasnya. Kegembiraan akan menghindari dari rasa kecewa dan frustrasi.

E. Dinamika Kelompok

Dari pengertian “kelompok” terlihat bahwa satu ciri terpenting dari suatu kelompok adalah, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh (anggota-anggota) kelompok yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini, maka penting kajian terhadap “Dinamika Kelompok”, yaitu kajian terhadap *“kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan*

perilaku anggota-anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan, untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut". Hal itu, dilandasi oleh pemikiran bahwa tercapainya tujuan kelompok akan sangat ditentukan oleh tindakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang merupakan perwujudan dari perilaku kelompok sebagai suatu kesatuan dari perilaku anggota-anggota kelompok.

Untuk melakukan analisis terhadap Dinamika Kelompok, pada hakekatnya dapat dilakukan melalui dua macam pendekatan, yaitu:

- a. *Pendekatan Sosiologis*, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap bagian-bagian atau komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial tersebut. Pendekatan seperti ini, terutama dilakukan untuk melakukan analisis kelompok terhadap kelompok-kelompok sosial.
- b. *Pendekatan Psiko-Sosial*, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap faktor-taktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu sendiri.

Pendekatan seperti ini, lebih sering dikerapkan pada kelompok-kelompok tugas. Meskipun demikian, karena banyak kelompok- kelompok (tani) masih merupakan bentuk peralihan dari kelompok sosial ke kelompok tugas, di dalam analisis dinamika kelompoknya seringkali masih dilakukan penggabungan terhadap kedua pendekatan tersebut.

1) Pendekatan Sosiologis

Seperti telah dikemukakan di atas, pendekatan ini terbagi dalam 2 (dua) macam analisis, yakni: analisis terhadap

- (a) Komponen atau bagian-bagian kelompok dan
- (b) Analisis terhadap proses yang terjadi di dalam kelompok

Analisis terhadap komponen atau bagian-bagian organisasi, pada dasarnya merupakan analisis terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam yang diatur dan disediakan oleh kelompok yang bersangkutan demi berlangsungnya kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan merupakan tujuan kelompok itu. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni :

- 1) Tujuan kelompok (*goal*), yaitu hasil akhir yang ingin dicapai, baik berupa sesuatu obyek (materi) atau keadaan serta keinginan-keinginan lain yang diinginkan dan dapat memuaskan semua anggota kelompok yang bersangkutan.

Adanya tujuan kelompok, akan menggerakkan semua anggota untuk perilaku atau melaksanakan tindakan kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Karena itu, harus diupayakan secara sederhana tetapi jelas agar setiap anggota memahami tujuan kelompoknya.

- 2) Unsur-unsur kelompok yang menyangkut pembagian tugas dan hak serta kewajiban anggota-anggota kelompok yang meliputi:
 - a) Jenjang sosial (*social rank*), jenjang atau pelapisan anggota-anggota kelompok yang menunjukkan perbedaan nilai atau prestise tertentu yang akan membedakan penghargaan, kehormatan, dan hak wewenang anggota-anggotanya. Adanya jenjang sosial seperti ini, merupakan faktor pendorong bagi setiap anggota untuk bekerja keras agar memperoleh tingkat penghormatan dan kekuasaan wewenang yang lebih tinggi di dalam kelompoknya.
 - b) Peran kedudukan (*status role*), yakni peran yang harus dilakukan ditunjukkan oleh anggota kelompok sesuai dengan kedudukan yang diperolehnya dalam struktur

sistem sosial (kelompok) yang bersangkutan. Adanya perbedaan peran kedudukan seperti itu, akan membuat setiap anggota harus melaksanakan tugas kewajiban sesuai dengan hak (prestise, penghargaan) yang diperoleh dari kedudukannya. Dengan demikian., setiap individu akan selalu bekerja keras untuk melaksanakan perannya sebaik-baiknya agar tidak kehilangan kedudukan yang telah diperolehnya itu.

- c) Kekuasaan (power), yaitu kewenangan yang memungkinkan seseorang menggerakkan orang lain melaksanakan sesuatu kegiatan demi tercapainya tujuan atau kemauannya yang diinginkan.

Kekuasaan, biasanya melekat dengan kedudukannya. Karena itulah, setiap orang dalam kelompok akan berusaha mempertahankan dan atau merebut kedudukan anggota yang lain untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan.

- 3) Unsur-unsur yang berkaitan dengan aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang harus ditaati oleh semua anggota kelompok dalam menunjukkan perilaku, melaksanakan peran tindakan-tindakan demi tercapainya tujuan kelompok, yang mencakup:

- a) Kepercayaan (*belief*), yaitu segala sesuatu yang secara akal atau perasaan anggota kelompok dinilai dan diterima sebagai kebenaran, yang digunakan sebagai landasan kegiatan kelompok (dan masing-masing anggotanya) untuk mencapai tujuan kelompok yang diinginkan.

Adanya kepercayaan, setiap anggota akan selalu berusaha menunjukkan perilaku tertentu dan di lain pihak akan saling menjaga agar anggota lain tidak melakukan kegiatan -kegiatan yang menyimpang dari kepercayaan

mereka, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

- b) Sanksi (*Sanction*), yaitu perlakuan yang diberikan kepada setiap anggota kelompok yang berupa penghargaan (reward) bagi yang mentaati atau melaksanakan dengan benar, dan hukuman (*penalty, punishment*) bagi yang melanggar aturan-aturan atau kebiasaan/kepercayaan kelompoknya.

Dengan adanya sanksi di dalam kelompok, setiap anggota diharapkan akan menunjukkan perilaku atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati dengan benar demi tercapainya tujuan kelompok.

- c) Norma (*norm*), yakni aturan-aturan tentang perilaku (biasanya tak tertulis) yang harus ditaati dan ditunjukkan oleh setiap anggota kelompok, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Adanya norma, dimaksudkan agar setiap anggota mentaatinya, sehingga tujuan kelompok dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

- d) Perasaan-perasaan (*sentiment*), yaitu tanggapan emosional yang diberikan/ditunjukkan oleh setiap anggota terhadap kelompoknya. Perasaan tersebut dapat berujud kesenangan, kekecewaan, kesetiaan, dll.

Adanya perasaan-perasaan tertentu di kalangan anggota kelompok, sebenarnya dapat dijadikan ukuran untuk melihat apakah kelompok tersebut telah berhasil mencapai tujuan kelompok yang diinginkan semua anggotanya ataukah tidak. Dengan kata lain, setiap anggota kelompok selalu dituntut untuk mematuhi semua aturan dan melaksanakan kegiatan dengan benar agar dapat memuaskan semua anggota yang lain.

4) Unsur-unsur dalam kelompok yang harus diupayakan disediakan demi terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang mencakup:

a. Kemudahan (*facility*), yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, yang diperlukan oleh kelompok untuk dapat melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan kelompok.

Dalam hubungan ini, yang perlu diperhatikan bukanlah sekadar penyediaan kemudahan saja, tetapi bagaimana kemudahan tersebut dapat tersedia tepat waktu, mudah diperoleh didapat, dan memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu untuk dapat digunakan dengan memperoleh hasil yang baik.

Sebaliknya, setiap anggota harus menggunakannya/ memanfaatkan segala kemudahan yang tersedia semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

b. Tegangan dan himpitan (*stress and strain*), yaitu adanya tegangan atau tekanan-tekanan (baik yang berasal dari dalam maupun dari luar) yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan antar sesama anggota kelompok yang bersangkutan, demi tercapainya tujuan kelompok (Bertrand dalam Soedijanto, 1980). Contoh, perlombaan-perlombaan.

Karena itu, di dalam kelompok perlu diciptakan adanya ketegangan-ketegangan, sepanjang tidak sampai merusak kesatuan kelompok itu sendiri.

Ditinjau dari proses sosial, perlu dianalisis adanya beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh setiap kelompok yang mencakup:

- 1) Komunikasi (*communication*), yaitu interaksi antar sesama anggota dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan kelompok. Komunikasi di dalam kelompok, harus diupayakan untuk menembus setiap isolasi sosial yang ada di dalam kelompok (perbedaan status, umur, pendidikan, dll.) sehingga semua pihak dapat dan mau berinteraksi untuk mencapai tujuan kelompok yang sudah disepakat.
- 2) Pemeliharaan batas (*boundary maintenance*), yaitu pemeliharaan batas-batas sistem sosial (kelompok) dengan lingkungannya.

Pemeliharaan batas tersebut dimaksudkan agar ada perbedaan yang jelas antara sesama anggota kelompok (*ingroup*) dengan yang bukan anggota kelompoknya (*outgroup*) sesama sehingga terpujuk rasa kesetiakawanan dalam mewujudkan identitas kelompoknya maupun menghadapi tekanan dari luar.
- 3) Kaitan sistemik (*systemic linkage*), yaitu proses terjadinya jaminan atau kaitan antar sistem-sistem sosial atau antar kelompok satu dengan yang lainnya. Pemahaman tentang konsep ini memberikan petunjuk setiap kelompok juga harus menjalin hubungan dengan kelompok yang lain, karena tercapainya tujuan kelompoknya selalu dipengaruhi tidak mungkin terlepas dari keterkaitannya dengan kelompok yang lain.
- 4) Penghargaan (*institutionalization*), yaitu proses pengembangan fungsi-fungsi sosial atau hubungan-hubungan sosial. Konsep ini memberikan arahan bahwa, untuk tercapainya tujuan-tujuan kelompok, perlu dikembangkan lembaga-lembaga atau sub kelompok yang harus menjalankan fungsi masing-masing, serta saling keterkaitannya dengan sub kelompok yang lain yang jelas.

- 5) Sosialisasi (*socialization*), yaitu proses pembelajaran atau pewarisan nilai-nilai kelompok dalam rangka menyiapkan setiap anggota kelompok untuk dapat melaksanakan perannya sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok, sehingga berperilaku dan dapat melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan kelompok.
- 6) Kontrol sosial (*social control*) yaitu proses pengawasan terhadap perilaku atau kegiatan setiap anggota kelompok agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah disepakati, demi tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. Karena itu, dalam setiap kelompok harus selalu ada kontrol sosial.

2) Pendekatan Psiko-Sosial

Analisis dinamika kelompok dengan pendekatan psiko sosial, dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap segala sesuatu yang akan berpengaruh terhadap perilaku anggota-anggota kelompok dalam melakukan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan kelompok.

Faktor-faktor itu adalah :

1) Tujuan kelompok (*group goal*)

Tujuan kelompok sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok. Berkaitan dengan hal ini, kejelasan tujuan kelompok akan sangat berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan-tindakan anggota kelompok. Sehingga, perlu dikaji, sampai seberapa jauh tujuan kelompok benar-benar telah dipahami dan dihayati oleh setiap anggota kelompok yang bersangkutan.

2) Struktur kelompok (*group structure*), yaitu suatu pola yang teratur tentang bentuk tata hubungan antara

individu-individu dalam kelompok yang sekaligus menggambarkan kedudukan dan peran masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan kelompok. Ketidakjelasan mengenai struktur kelompok, akan berpengaruh terhadap ketidakjelasan: kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kekuasaan masing-masing anggotanya, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mungkin dapat berlangsung secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kelompok.

- 3) Fungsi tugas (*task function*), yaitu seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok.

Dengan demikian, setiap orang harus memahami betul tugas-tugas yang harus dilaksanakannya demi tercapainya tujuan kelompok.

- 4) Pembinaan dan pemeliharaan kelompok (*group building and maintenance*), yaitu upaya kelompok untuk tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan kelompok atau upaya kelompok untuk berusaha memelihara tata kerja dalam kelompok, mengatur memperkuat dan mengekalkan kelompok.
- 5) Kekompakan kelompok (*group cohesiveness*), yang diartikan sebagai rasa keterikatan anggota kelompok terhadap kelompoknya. Rasa ketertarikan itu, dapat dilihat ditunjukkan pada kesamaan tindakan (integrasi), kerjasama, kesadaran menjadi anggota, persamaan nasib, homogenitas perilaku, kesepakatan terhadap tujuan kelompok dan pengakuan terhadap kepemimpinan kelompok.

- 6) Suasana kelompok (*group atmosphere*), yaitu lingkungan fisik (dangon nasional) yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota kelompok terhadap kelompoknya. Suasana tersebut dapat berupa: keramah-tamahan, kesetiakawanan, kebebasan, bertindak, dan suasana fisik seperti kerapihan keberantakan, dll.
- 7) Tekanan kelompok (*group pressure*), yaitu: tekanan-tekanan atau ketegangan kelompok yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras untuk mencapai tujuan kelompok. Seperti telah dikemukakan dalam pendekatan sosiologis, adanya tekanan kelompok (baik dari dalam, maupun dari luar) memang baik untuk mendinamiskan kelompok, tetapi jika ketegangan tersebut berlarut-larut dapat pula membahayakan kehidupan kelompok yang bersangkutan.
- 8) Keefektifan kelompok (*group effectiveness*), yaitu keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun non fisik) yang memuaskan anggotanya .
- 9) Agenda terselubung (*hidden agenda*), yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok yang diketahui oleh semua anggotanya, tetapi tidak dinyatakan secara tertulis. Meskipun demikian, seringkali agen selubung ini justru sangat penting untuk mendinamiskan kelompok pemberontak.

SISTEM STATUS DAN PELAPISAN SOSIAL

A. Pengertian Status dan Peran

Setiap anggota masyarakat selalu berada dalam posisi tertentu sebagai bagian dari kelompoknya. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang jelas posisi dan kedudukannya secara sosial di masyarakat. Kedudukan seseorang inilah yang kemudian memberikan dia sebuah peranan dalam pola interaksi sosialnya. Dalam analisis sistem pelapisan masyarakat, kedudukan dan peran atau yang lebih dikenal status dan peran sangatlah penting. Soedjono Soekanto (1997) mendefinisikan bahwa kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajibannya. Jadi kedudukan sebenarnya merupakan kumpulan dari hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang dalam pola kehidupan tertentu.

Kedudukan dan peran kecuali merupakan unsur yang baku dalam sistem pelapisan sosial juga mempunyai arti yang Sosiologi Pedesoan penting dalam sistem pelapisan sosial masyarakat secara keseluruhan. Sistem tersebut meliputi pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat.

Dalam hubungan timbal balik ini tentu kedudukan dan peranan sangat penting guna menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan individu yang dimaksud. Lebih lanjut status atau

kedudukan dibedakan menjadi *ascribed status* dan *achieved status* dan kadangkala dibedakan lagi dengan *assigned status*. Yang pertama merupakan status yang diperoleh oleh masyarakat karena kelahiran atau keturunan. Ia melekat pada seseorang secara otomatis karena kelahiran. Hal ini banyak kita jumpai pada masyarakat tertutup meski pada masyarakat terbuka juga terjadi. Seorang anak yang Sahir dari rahim seorang bangsawan dengan sendirinya menjadi bangsawan, demikian pula dengan anak seorang arakyat jelata akan menjadi rakyat jelata statusnya dalam masyarakat.

Dalam realitas kita sering melihat seseorang memiliki beberapa status atau kedudukan dalam masyarakat. Meskipun demikian seseorang hanya akan dilihat pada status yang «dominan saja. Berdasarkan hal tersebut maka seseorang diletakkan dalam kelas tertentu dalam masyarakat. Akibat berbagai macam status yang dimiliki oleh seseorang, seringkali terjadi konflik dalam diri seseorang dimana satu status mewajibkan melakukan hal tertentu sementara status yang lain tidak memungkinkannya. Sebagai contoh seorang kader partai politik yang menjadi Jaksa karena jaminan dari partainya tentu akan sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan pada keburukan partainya. Hal itu selain akan menyebabkan statusnya dalam partai yang tidak memungkinkan ia memeriksa pemimpinnya sementara tugas sebagai Jaksa harus dilakukan. Konflik status ini seringkali terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Di dalam kelompok sosial seringkali kita melihat status seseorang ditunjukkan dengan berbagai macam simbol. Simbol tersebut apabila dimiliki oleh seseorang, maka ia akan masuk pada kedudukan tertentu dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional simbol ini memegang peranan penting dalam menilai status seseorang. Gaya hidup, pakaian, perhiasan, rumah, berbagai kepribadian dan kebiasaan merupakan media untuk menunjukkan simbol status

seseorang di masyarakat. Seperti barang-barang keramat masyarakat pedalaman yang hanya boleh dimiliki dan dipelihara oleh keturunan ketua suku adalah simbol status bagi masyarakatnya. Seseorang biasa dan bukan ketumnan kepala suku tentunya tidak memiliki simbol itu, pun demikian kadangkala cara berpakaian suatu suku sangat berbeda antara rakyat jelata dengan kepala sukunya. Simbol-simbol status pasti ada dalam setiap kebiasaan dan perilakunya termasuk cara berpakaian, senjata, serta adat tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh ketua suku. Pemahaman itu penting dalam mempelajari sosiologi pedesaan mengingat masih banyak wilayah kita yang memegang berbagai simbol status selain berguna bagi identifikasi sebuah sistem status dalam masyarakat tertentu.

Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari status dimana seseorang yang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya maka ia telah melakukan peranan. Peranan ini mengatur perilaku seseorang juga dapat digunakan bagi seorang individu untuk mengestimasi apa yang akan dilakukan orang lain karena orang lain juga akan diatur oleh peranannya. Hal itu tentu akan menggerakkan individu untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok lain sesuai dengan peranannya.

Peranan sendiri mencakup tiga hal pokok yakni norma-norma yang berhubungan dengan status orang dalam masyarakat, konsep tentang sesuatu yang boleh dilakukan oleh individu dan masyarakat sebagai sebuah organisasi, peranan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Peranan akhirnya akan memberikan fasilitas bagi individu sesuai dengan peranan tersebut. Lembaga sosial merupakan media yang paling banyak menyediakan fasilitas peranan tersebut bagi individu. Perubahan terjadi dalam fasilitas bisa karena perubahan norma yang terkait dengan status,

pembahasan konsep tentang sesuatu yang boleh dan tidak, serta perubahan perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

Sebagaimana status, peranan juga akan menyebabkan konflik pada individu pada saat tertentu. Hal itu kemudian ditanggapi dengan pemisahan antara individu dengan peranannya (*role-distance*) dengan harapan bahwa tidak terjadi tekanan tertentu pada individu akibat konflik peran yang dihadapinya. Pemahaman terhadap peranan tersebut sangat penting dilakukan untuk berbagai hal berikut sebagaimana yang dikemukakan Marion J. Levi dalam Soedjono Soekanto bahwa :

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu tertentu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka ahrus terlebih dahulu dilatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam individu sering terlihat ada individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sehingga pelaksanaannya perlu mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang mampu melaksanakan peranannya maka belum tentu masyarakat memberikan peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Dalam sebuah masyarakat akan terjadi sebuah keseimbangan apabila kedudukan dan peranan dilakukan secara seimbang. Tidak ada salah satu yang dipentingkan diantaranya. Akan tetapi seringkali hal itu sangat tidak mungkin dilakukan. Pada masyarakat tertentu status sering dikedepankan sementara peranan kurang diperhatikan.

Gejala ini timbul pada masyarakat-masyarakat modern yang semakin jauh dari nilai-nilai keluhuran dan lebih mementingkan material sebagai simbol status.

B. Pengertian Pelapisan Sosial

Gejala pelapisan sosial merupakan sesuatu yang pasti ada di setiap masyarakat. Gejala itu timbul apabila dalam kelompok sosial masyarakat ada sesuatu yang dihargai misalnya uang, tanah, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sejak manusia hidup berkelompok dan sejak saat itulah pelapisan sosial itu ada, berdasarkan pembedaan kelas-kelas secara hierarkis atau bertingkat dari yang tinggi hingga yang rendah. Dasar atau esensi pelapisan sosial adalah ketidakseimbangan dalam hak, kewajiban, dan tanggungjawab nilai-nilai sosial, kurang terpenuhinya kebutuhan individu/kelompok, dan pengaruhnya terhadap kelompok tertentu.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri maka pelapisan sosial akan tumbuh berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Pembagian dalam kelas pun mulai dari yang sederhana seperti kelompok umur, jenis kelamin hingga kompleks seperti tokoh partai, kaum intelektual dan lain sebagainya.

Pelapisan sosial merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia termasuk di pedesaan. Gejala itu muncul karena manusia mempunyai sesuatu yang dihargai seperti tanah, uang, gedung, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Aristoteles sejak lama mengungkapkan bahwa manusia mempunyai ciri kelompok dalam bentuk kaya, miskin dan kategori lainnya. Sorokin sendiri juga mengungkapkan bahwa pelapisan sosial merupakan ciri yang tetap dan umum terjadi dalam masyarakat.

Dari berbagai pendapat tersebut kita dapat melihat bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk berdasarkan kelas

secara bertingkat atau herarkis dari tingkat terendah kepada tertinggi dimana hal itu terjadi sejak manusia berkelompok. Dasar dari pelapisan sosial adalah ketidak seimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab nilai-nilai sosial, kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kelompok dan pengaruh terhadap kelompok tertentu. Hal ini mengacu pada peran dan status sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Dalam masyarakat sederhana pelapisan sosial juga masih sederhana seperti berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kekuasaan. Pada masyarakat kompleks pelapisan sosial sangat rumit pula dan berdasarkan berbagai kategori. Namun pada dasarnya pelapisan sosial terdiri dari tiga klasifikasi yakni pelapisan berdasarkan derajat ekonomis, berdasarkan derajat politis, dan derajat fungsional. Akan tetapi klasifikasi ini tidaklah tegas benar karena pada kenyataannya pelapisan sosial adalah proses yang sangat kompleks.

Pelapisan sosial sendiri terjadi karena dua sebab atau proses yakni proses yang alami dan kesengajaan. Proses alami biasanya terjadi akibat dari proses sosial masyarakat yang alami seperti kepala suku, kepala dusun dan lain-lain. Sementara itu yang disengaja seperti jabatan publik, jabatan perusahaan dan lain-lain yang tujuannya untuk mencapai sesuatu. Hal itu dilakukan agar dapat dilakukan pengaturan dalam masyarakat.

Dalam mempelajari pelapisan sosial ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, bahwa pelapisan sosial adalah sistem herarkis yang ada dan mengacu pada masyarakat tertentu. Tidak bisa kita melakukan generalisasi sebuah sistem pelapisan hanya berdasarkan satu atau dua sistem dalam masyarakat. Sifat sistem pelapisan ini sangat bervariasi dari satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya. Selain itu pelapisan sosial dapat dianalisa dari beberapa unsur yaitu segi distribusi hak istimewa yang obyektif/riel misalnya kekayaan,

wewenang, dan lain-lain, Pelapisan yang diciptakan seperti prestise dan penghargaan. Juga dapat kita lihat dari kriteria pelapisan itu sendiri yakni kualitas pribadi dan statusnya dalam kelompok.

Pelapisan sosial juga dapat kita amati dari simbolitas masyarakat atau lambang tertentu yang menunjukkan kedudukannya. Hal itu dapat dilihat dari pola tingkah lakunya, pakaian dan juga model mmah. Pada masyarakat Jawa sentral dari simbolitas ini adalah Kraton sehingga seluruh simbol selalu mengacu kepada Kraton sebagai puncak herarkis. Hal itu tercermin dari model pengantin, bangunan rumah, dan juga adat kesopanan.

Selain dari simbol, pelapisan sosial dapatjuga di amati dari mudah atau tidaknya sebuah kedudukan itu berpindah. Semakin sulit sebuah kedudukan berpindah maka kita dapat menyimpulkan, bahwa status itu mempunyai keterbatasan sehingga mempunyai nilai tertentu. Selain itu dari solidaritas antar anggota dalam lapisan sosial tertentu dalam mempertahankan kedudukannya juga dapat kita lihat. Golongan ini akan selalu membuat mekanisme agar kelompoknya tetap menduduki lapisan itu sehingga biasanya menciptakan jenis kebiasaan sendiri, simbolitas sendiri dan juga gaya hidup sendiri. Pelapisan sosial yang disusun secara sengaja dilakukan untuk mengejar sebuah tujuan. Hal itu dilakukan agar kekuasaan dan wewenang dapat digunakan untuk mengatur kelompok tadi. Pada beberapa bagian, hal itu disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang ada antar individu, perbedaan kebutuhan, dan kemampuan individu yang tidak sama. Kemampuan individu yaitu kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang diakui dalam masyarakat yang menyebabkan orang tersebut memiliki kedudukan tertentu. Akan tetapi kedudukan itu tidak otomatis meletakkan orang pada lapisan sosial tinggi. Hal itu disebabkan keahlian yang dimiliki

sendiri juga akan di klasifikasikan sesuai dengan kesukaran dan derajatnya dalam masyarakat.

C. Pelapisan Sosial Masyarakat Desa

Pelapisan sosial mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama. Di dalam organisasi sosial pelapisan sosial didasarkan pada perbedaan suku, perbedaan pemimpin dengan yang dipimpin, perbedaan berdasarkan pembagian dan perbedaan berdasarkan kekayaan. Semakin kompleks dan semakin maju perkembangan masyarakat, maka akan semakin kompleks pula sistem lapisan sosial dalam masyarakat.

Pelapisan sendiri merupakan kenyataan yang selalu ada di masyarakat dan tetap akan ada. secara teoritis semua manusia memiliki derajat yang sama namun pada kenyataannya derajat dan lapisan sosial merupakan kenyataan dan gejala universal di kelompok sosial manapun. Menurut Sorokin dalam (Soemarjan & Soemardi, 1964) bahwa pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara herarkis atau bertingkat. Lapisan ini terdiri dari lapisan bawah dan atas, dengan kriteria tertentu yang dipakai dan ada dalam masyarakat itu sendiri.

Di sisi lain menurut Betiele (Pujiwati 1985) pelapisan sosial adalah gambaran mengenai ketidaksamaan (*iniquity*) dalam kehidupan kemasyarakatan. Lebih lanjut menelaah struktur sosial menurut beliau tidaklah cukup untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat. Oleh karena itu perlu pula untuk membahas analisis mengenai kelas, grup, strata. Dalam stratifikasi masyarakat desa kita mengenal istilah *sikep*, *Gogol*, *wong cihk*, *kawulo alit*, *wong sugih*, dan masih banyak lagi yang semuanya menunjukkan pada perbedaan dalam masyarakat. Ada yang berdasarkan kewajiban komunal, ada yang didasarkan pada kekayaan, juga ada yang didasarkan pada

kekuasaan. Pada umumnya perbedaan ini merupakan abstraksi dari posisi seseorang dalam masyarakatnya. Ogburn (1974) mengatakan, bahwa status merupakan hasil dari kedudukan seseorang dalam kelompok. Pelapisan sosial merupakan bagian penting dalam penentuan status seseorang.

Pada jaman kuno Aristoteles telah mengatakan, bahwa didalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Ucapan yang demikian itu membuktikan bahwa di zaman itu, dan diduga di zaman sebelumnya pula, orang telah mengakui adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Ucapan yang agak khusus itu dirumuskan dalam ilmu sosiologi modern secara umum oleh Pitirim A. Sorokin dalam karangannya “*Sosial Stratification*”, bahwa sistem berapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur.

Selama di dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang diharganya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat.

Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah yang sangat banyak dianggap oleh masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas, mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan atas dan rendah terdapat lapisan-lapisan yang jumlahnya dapat

ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Biasanya golongan yang berada dalam lapisan atas itu tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif, yaitu mereka yang memiliki uang banyak misalnya akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan mungkin juga kehormatan, sedang mereka yang mempunyai kekuasaan besar mudah menjadi kaya dan mengusahakan ilmu pengetahuan.

Masyarakat desa pada umumnya melihat kedudukan atau status seseorang dari berbagai macam sudut. Lahan sebagai faktor ekonomi utama merupakan salah satu kategori. Hal itu tentu beralasan mengingat mata pencaharian penduduk pedesaan yang kebanyakan dari bertani, maka semakin luas lahan yang dimiliki maka akan semakin tinggi status seseorang.

Faktor kedua yang cukup penting adalah, keturunan dimana seorang keturunan pendiri desa biasanya akan mendapatkan status lebih baik dari pada yang lain mengingat jasa leluhurnya. Dewasa ini hal itu agak berkurang mengingat semakin kompleksnya kehidupan masyarakat dan semakin jauhnyajarak antara keturunan dengan empunya, juga banyak masuknya faham dan faktor dari luar yang mendorong memudarnya anggapan itu.

Kekayaan merupakan faktor penting yang hampir ada dalam setiap masyarakat termasuk masyarakat desa. Semakin kaya seseorang akan semakin tinggi kedudukannya dalam masyarakat apalagi dengan kekayaannya itu seseorang dapat lebih luas bergaul dengan masyarakatnya. Seringkali akibat kekayaan yang berlimpah seorang warga desa kaya agak mengasingkan diri dengan lingkungannya seperti membuat pagar atau acuh pada tetangga sehingga lingkungan tidak menerimanya.

Selain itu ketokohan seseorang dalam masyarakat juga menunjukkan status seseorang dalam masyarakat. Biasanya hal itu terkait dengan keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau juga referensi moral keagamaan. Seorang ahli penyembuhan penyakit dan juga tempat bertanya seseorang apabila terjadi sesuatu pada dirinya akan meletakkan seseorang tersebut pada kedudukan tertentu dalam masyarakat. jabatan formal juga merupakan simbol status dari seseorang di masyarakat desa selain ketokohan yang biasanya informal.

Adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Yang terakhir itu biasanya dilakukan terhadap pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik atau perkumpulan.

Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur ‘• yang khusus dalam sistem lapisan masyarakat. Unsur mana yang mempunyai sifat lain dari pada uang, tanah, benda-benda ekonomis, ilmu pengetahuan atau kehormatan. Uang, tanah dan sebagainya dapat terbagi secara bebas diantara para anggota suatu masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat itu, akan tetapi apabila suafu inasyarakat hendak hidup dengan teratur maka kekuasaan dan wewenang yang ada padanya hams dibagi-bagi dengan teratur pula, sehingga jelas bagi setiap orang ditempat-tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang. Dalam suatu organisasi vertikal dan horizontal, apabila kekuasaan dan wewenang itu tidak dibagi-bagi secara teratur, maka kemungkinan besar akan terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Lapisan-iapisan yang dengan sengaja di susun dalam suatu organisasi

yang teratur itu menjadi bab pokok dalam karangan Chester I. Barnard yang berjudul “*The Function of Status Systems*”.

Sistem pelapisan dalam masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Jika bersifat tertutup tidak mungkin seseorang dapat pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahannya ke atas maupun ke bawah. Di dalam sistem yang demikian itu satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Sistem yang tertutup dengan jelas dapat dilihat dalam masyarakat India yang berkastra, atau dalam masyarakat yang feodal atau di dalam suatu masyarakat, dimana sistem berlapis-lapisnya tergantung pada perbedaan rasial.

Sebaliknya di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan buat berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Pada umumnya sistem terbuka ini memberi perangsang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kecakapannya. Karena demikian maka sistem ini lebih sesuai untuk dijadikan landasan buat pembangunan masyarakat dari sistem yang tertutup.

Di dalam uraian tentang teori masyarakat yang berlapis-lapis senantiasa di jumpai istilah kelas (*sosiai-class*). Seperti yang sering terjadi dengan beberapa istilah lain dalam sosiologi maka istilah kelas ini pun tidak selalu mempunyai arti yang sama. Ada kalanya yang dimaksudkan dengan kelas ialah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedang kedudukan mereka itu di ketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Dengan demikian maka pengertian kelas adalah paralel dengan pengertian lapisan, tanpa membedakan apakah dasar lapisan itu uang, tanah, kekuasaan atau dasar lainnya.

Ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedang lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan “*Kelompok Kedudukan*” (status group). Menurut Kurt B. Mayer dalam *karangannya “Dimensions of Sosial Stratification in Modern Society”* maka harus diadakan perbedaan dengan tegas antara kelas dan kelompok kedudukan itu. Namun dalam hubungan ini diterangkan olehnya bahwa sistem pembagian kekuasaan dalam masyarakat banyak tali-temalnya dengan adanya kelas-kelas ekonomis dan kelompok-kelompok berkedudukan.

Meskipun Max Weber membedakan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial dari lapisan-lapisan, ia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan itu. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, dan kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan yang dinamakan “stand” olehnya.

Kalau kita menengok kepada istilah kelas yang digunakan dalam teori Marxisme maka kita melihat bahwa istilah itu di gunakannya hanya dalam rangka ekonomis saja, meskipun adanya kelas-kelas itu mempunyai pengaruh besar pada kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan pada umumnya dari masyarakat. Kelas menurut Marxisme pada pokoknya ada dua macam dalam setiap masyarakat, yaitu kelas yang memiliki tanah atau alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyai serta hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam proses produksi.

Perbedaan lain dalam teori tentang adanya kelas dalam masyarakat yang digunakan dalam ilmu sosiologi dan dalam

Marxisme adalah mengenai hubungan antar kelas. Kelas-kelas dalam arti sosiologis dapat hidup dan kerja bersama tanpa pertentangan, sedang kelas dalam arti Marxistis senantiasa berada dalam pertentangan untuk berebut kekuasaan.

Perbedaan lain ialah bahwa dalam teori sosiologi adanya kelas-kelas yang menurut sosiolog senantiasa akan ada sepanjang masa di dalam tiap-tiap masyarakat yang hidup teratur seperti yang telah dikemukakan lebih dahulu dalam kata pengantar ini. Sedang teori Marxisme meramalkan akan terbentuknya suatu masyarakat dimana semua kelas dalam arti Marxistis akan lenyap dengan sendirinya (*classless society*). Dengan singkat maka dapat disimpulkan bahwa istilah kelas yang digunakan dalam ilmu sosiologi mempunyai arti yang berlainan dari pada istilah kelas yang digunakan dalam teori Marxisme. Kelompok kutipan karangan dalam bidang lapisan-lapisan dalam masyarakat ini dimulai dengan karangan Ralph Linton tentang “*Status and Role*” (kedudukan dan peranan) yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.

Perbedaan yang selalu menonjol dalam teori ini adalah antara yang dinamakan “*ascribed status*” (kedudukan yang didapat dengan sendirinya oleh seseorang anggota masyarakat) dan “*achieved status*” (kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja). Selanjutnya di dalam kelompok kutipan karangan-karangan ini terdapat dua karangan yang sifatnya sangat berbeda satu sama lainnya.

Yang satu adalah karangan “*The Problem of Classes*” oleh Joseph Schumpeter dan “*The Functions of Status Systems*” karangan Chester I Bernard. Schumpeter mengutarakan adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat yang terjadi dengan sendirinya dan

yang dengan tepat dinamakan olehnya sebagai “*the creation of the researcher*” (ciptaan peneliti).

Sebaliknya Barnard menghususkan diri dalam ulasan tentang adanya lapisan-lapisan dalam suatu organisasi formil yang dengan sengaja diadakan dan diatur oleh mereka yang berwewenang untuk itu. Di dalam pandangannya terhadap adanya kelas-kelas sosiologis Schumpeter menggunakan penilaian fungsional dan historis bersama-sama. Dikatakannya olehnya bahwa terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat adalah karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi makna kelas-kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya (Polak, 1964).

Meskipun Chester I. Barnard hanya membatasi diri pada ur'aian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus, namun dikatakannya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas dimana organisasi-organisasi itu berada. Barnard yang memang diakui sebagai ahli dalam teori yang khusus mengenai organisasi dan birokrasi (dalam arti yang netral) memberikan analisa yang teliti tentang kegunaan dari sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi yang teratur. Ia membedakan antara sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja bersama dalam kedudukan yang sederajat, dan sistem skalar yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah ke atas.

Yang menarik perhatian dalam karangan ini ialah pendapat Barnard bahwa sistem pembagian kedudukan itu pada pokoknya

diperlukan secara mutlak agar organisasi itu dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh para penciptanya, akan tetapi sistem itu pada hakekatnya mengandung di dalam tubuhnya benih-benih yang dapat merusak organisasi itu sendiri. Karena semua gerak dalam organisasi itu harus melalui susunan kedudukan-kedudukan yang sudah ditentukan dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat lebih dahulu, maka organisasi itu kehilangan banyak dari keluwesan dan kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya pada keadaan-keadaan di dalam masyarakat umum yang senantiasa berubah.

Di samping itu karena penggunaan tenaga-tenaga di dalam organisasi itu terikat pada sistem pembagian kedudukan yang telah ditentukan maka tidak dapat digunakan sebaik-baiknya kemampuan mengambil inisiatif dan kemampuan memimpin yang ada pada mereka yang karena kedudukannya tidak mempunyai wewenang untuk mengambil inisiatif atau menjalankan pimpinan. Dengan kata-kata lain perbedaan antara kedudukan dan kecakapan pribadi adalah menjadi kabur.

KEPEMIMPINAN, KEKUASAAN DAN WEWENANG

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi itu mengandung dua pengertian pokok yang sangat penting tentang kepemimpinan, yaitu *pertama*, mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnnya. Motivasi orang untuk berperilaku ada dua macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.

Dalam hal motivasi ekstrinsik perlu ada faktor di luar diri orang tersebut yang mendorongnya untuk berperilaku tertentu; kepemimpinan adalah faktor luar. Pada motivasi intrinsik, daya dorong untuk berperilaku tertentu itu berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Jadi semacam ada kesadaran kemauan sendiri untuk berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki mutu kerjanya. Kepemimpinan yang merupakan faktor eksternal tadi harus selalu dapat memotivasi anggota organisasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Tetapi kalau setiap kali dan dalam setiap hal harus memberi perintah atau pengarahan, itu akan menimbulkan kesulitan. Kalau setiap melakukan pekerjaan dengan baik itu harus dengan perintah pimpinan, dan kalau tidak ada perintah pimpinan tidak dilakukan

pekerjaan dengan baik, maka perbaikan mutu kinerja yang terus menerus akan sulit diwujudkan.

Kedua, kepemimpinan harus diarahkan agar orang-orang mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi perilaku yang ditimbulkan oleh kepemimpinan itu berupa kesediaan orang-orang untuk saling bekerjasama mencapai tujuan organisasi yang disepakati bersama. Dalam implementasinya, kepemimpinan yang berhasil adalah yang mampu menumbuhkan kesadaran orang-orang untuk melakukan peningkatan mutu kinerja dan tercapainya kerjasama dalam kelompok untuk meningkatkan mutu kinerja masing-masing kelompok maupun kinerja secara terpadu. Dalam proses tersebut pimpinan membimbing, memberi pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, memfasilitasi serta menggerakkan orang lain untuk bekerja menuju sasaran yang diinginkan bersama. Semua yang dilakukan pimpinan harus bisa dipersepsikan oleh orang lain dalam organisasinya sebagai bantuan kepada orang-orang itu untuk dapat meningkatkan mutu kinerjanya. Dalam hal ini *usaha mempengaruhi perasaan* mempunyai peran yang sangat penting. Perasaan dan emosi orang perlu disentuh dengan tujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai baru, misalnya bekerja itu harus bermutu, atau memberi pelayanan yang sebaik mungkin kepada pelanggan itu adalah suatu keharusan yang mulia, dan lain sebagainya. Dengan nilai-nilai baru yang dimiliki itu orang akan tumbuh kesadarannya untuk berbuat yang lebih bermutu. Dalam ilmu pendidikan ini masuk dalam kawasan *affective*.

B. Tujuh Hal Mendasar yang Perlu dikuasai untuk Kepemimpinan

Dalam suatu organisasi atau institusi tertentu yang pada tahap awal implementasinya digerakkan oleh kepemimpinan yang sangat peduli pada mutu, dan bertekad kuat untuk membuat organisasinya

selalu dan terus menerus meningkatkan mutu kinerjanya. Kepemimpinan memerlukan modal dasar dalam bentuk penguasaan tujuh mendasar yang menyangkut kehidupan organisasinya.

1. **Filosofi organisasi** : Mengapa organisasi yang dipimpinnya ini ada dan untuk apa? Jawaban terhadap pertanyaan yang sangat mendasar ini perlu dikuasai secara baik oleh semua orang yang memegang tampuk kepemimpinan dari suatu organisasi. Tanpa menguasai jawabannya secara baik diragukan apakah mereka akan mampu mengarahkan orang-orang lain dalam organisasi itu ke tujuan yang seharusnya.
2. **Visi** : Akan menjadi organisasi yang bagaimanakah organisasi itu di masa depan? Orang-orang yang memegang kepemimpinan perlu memiliki pandangan jauh ke depan tentang organisasinya; mereka ingin mengembangkan organisasinya itu menjadi organisasi yang bagaimana, yang mampu berfungsi apa dan bagaimana, yang mampu memproduksi benda dan jasa apa dan yang bagaimana, serta untuk dapat disajikan kepada siapa? Visi ini seharusnya berjangka panjang, misalnya 10 atau 25 tahun ke depan, agar dapat memfasilitasi usaha-usaha perbaikan mutu kinerja yang berkelanjutan.
3. **Misi** : Mengapa kita ada dalam organisasi ini? Apa tugas yang harus kita lakukan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan visi tersebut di atas. Bagaimana visi itu akan dapat diwujudkan? Tugas-tugas pokok apakah yang harus diakukan oleh organisasi agar visi atau kondisi masa depan organisasi tadi dapat diwujudkan. Rumusan tentang misi organisasi ini juga seharusnya dapat dikuasai dengan baik dan jelas oleh orang-orang yang memegang kepemimpinan agar mereka dapat memberi arahan yang benar dan jelas kepada orang-orang lain.

4. Nilai-nilai (*Values*): Prinsip-prinsip apa yang diyakini sebagai kebenaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas organisasi, dan ingin agar orang lain dalam organisasi juga mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. Misalnya mutu, fokus pada pelanggan, disiplin, kepelayanan adalah nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh orang-orang yang memegang kepemimpinan.
5. Kebijakan (*Policy*): merupakan rumusan-rumusan yang akan disampaikan kepada orang-orang dalam organisasi sebagai arahan agar mereka mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menyediakan pelayanan dan barang kepada para pelanggan. Orang-orang yang memegang kepemimpinan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan semacam itu agar orang-orang dapat menyajikan mutu seperti yang diinginkan oleh organisasi.
6. Tujuan-tujuan Organisasi: adalah hal-hal yang perlu dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang dan jangka pendek agar memungkinkan orang-orang dalam organisasi memenuhi misinya dan mewujudkan visi mereka. Tujuan-tujuan organisasi itu perlu dirumuskan secara konkrit dan jelas.
7. Metodologi: adalah rumusan tentang cara-cara yang dipilih secara garis besar dalam bertindak menuju perwujudan visi dan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Metodologi ini terbatas pada garis-garis besar yang perlu dilakukan dan bukan detail-detail teknik kerja.

C. Pengertian Kekuasaan

- a. Dalam membahas masalah kekuasaan, sosiologi tidak memandangnya sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Kekuasaan itu merupakan suatu unsur yang sangat penting

dalam kehidupan suatu masyarakat kekuasaan itu pasti ada dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks susunannya.

Walaupun selalu ada kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat, namun kekuasaan itu tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Karena pembagian yang tidak merata itu, maka timbul makna pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh tersebut, baik secara rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu dijalankan pada diri seseorang, biasanya orang tersebut dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan terdapat disemua bidang kehidupan dan dilakukan apabila misalnya seorang guru mewajibkan siswa-siswanya mengerjakan pekerjaan rumah, apabila orang tua mendidik anak-anaknya, apabila seorang mandor kebun memberi perintah pada para karyawannya dan sebagainya.

Kekuasaan tersebut mencakup baik suatu kemampuan memerintah dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lain. Kekuasaan itu mempunyai aneka bentuk, yang mempunyai pula bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber-sumber kekuasaan.

Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping misalnya suatu kemampuan yang khusus dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan terkhusus tentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana dalam hubungan-hubungan sosial maupun organisasi organisasi sosial.

Akan tetapi umumnya kekuasaan tertinggi ada pada organisasi yang bernama “negara”. Secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan. Juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan-kekuasaan yang lebih rendah derajatnya. Itulah yang dinamakan kedaulatan (sover-reignty).

b. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada setiap hubungan sosial antara manusia maupun antar kelompok itu mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu :

i. Bisa takut

Perasaan takut pada seseorang menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti. Rasa takut tadi merupakan perasaan yang negatif karena seseorang yang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa dan akan berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang yang ditakuti, agar terhindar dari kesukaran-kesukaran yang menimpa dirinya, seandainya dia tidak patuh rasa takut merupakan gejala universal dan biasanya digunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat dengan pemerintahan yang autoriter.

ii. Rasa cinta,

Biasanya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif. Orang-orang bertindak sesuai

dengan kehendak pihak yang mempunyai kekuasaan, untuk menyenangkan semua pihak, yang berarti ada titik-titik pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Rasa cinta tersebut biasanya telah mendarah-daging dalam diri seseorang atau kelompok orang.

iii. Kepercayaan

Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan antara dua orang atau lebih. Misalnya A adalah orang yang dikuasai mengadakan hubungan langsung dengan B sebagai pemegang kekuasaan dan A percaya sepenuhnya pada B, bahwa dia akan selalu bertindak dan berlaku baik. Sehingga setiap keinginan B akan selalu dilaksanakan A walaupun mungkin dia sama sekali tidak mengetahui manfaat dari tindakan-tindakannya. Tetapi karena dia menaruh kepercayaan kepada B, maka dia akan berbuat hal-hal yang sesuai dengan kemauan B yang merupakan penguasa, agar B bertambah memercayai A.

iv. Pemujaan

Pada sistem pemujaan seseorang atau sekelompok orang-orang yang memegang kekuasaan, mempunyai dasar pemujaan dari orang-orang lain. Segala tindakan penguasa akan dibenarkan atau setidak-tidaknya dianggap benar. Bila dilihat dalam masyarakat, kekuasaan dalam pelaksanaan itu dilakukan melalui saluran-saluran yang tertentu. Saluran-saluran tersebut banyak sekali, diantaranya adalah melalui:

c. Saluran militer

Bila digunakan saluran ini penguasa akan lebih banyak menggunakan paksaan serta kekuasaan militer

guna melaksanakan kekuasaannya. Tujuan utama adalah menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk kepada kemampuan penguasa atau sekelompok orang sebagai penguasa.

d. Saluran ekonomi

Dalam hal ini penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat dengan menggunakan saluran-saluran dibidang ekonomi, misalnya dengan jalan menguasai modal-modal yang besar, menguasai buruh dan selanjutnya.

e. Saluran politik

Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati masyarakat. Caranya antara lain dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan yang syah.

f. Saluran tradisi

Saluran ini dilakukan dengan cara menyesuaikan tradisi sendiri dengan tradisi yang dikenal di dalam suatu masyarakat, sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lebih lancar.

g. Saluran ideologi

Dalam hal ini penguasa mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Hal ini dilakukan agar kekuasaannya dapat menjelma menjadi wewenang.

h. Saluran-saluran lain

Saluran lain yang dapat digunakan penguasa, misalnya melalui alat-alat komunikasi massa ; surat kabar, film, brosur-brosur, televisi dan lain-lain.

Suatu kekuasaan yang telah melaksanakan melalui saluran-saluran seperti dimuka itu memerlukan serangkaian cara atau untuk mempertahankannya dengan cara-cara atau usaha-usaha, antara lain:

1. Dengan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa dan diganti peraturan-peraturan baru yang menguntungkan penguasa.
2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa, sistem-sistem tersebut meliputi agama, ideologi dan sebagainya.
3. Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik.
4. Mengadakan konsolidasi secara horizontal dan secara vertikal.

Biasanya penguasa mempunyai beberapa cara untuk memperkuat kedudukannya yaitu ;

- a. Dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya menguasai bidang ekonomi dengan cara memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah tenaga kerja, menaikkan produksi, mengadakan perlindungan terhadap barang-brang produksi dalam negeri dan sebagainya. Hal ini pada umumnya dilakukan dengan cara-cara damai.
- b. Dengan meaguasai bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat dengan paksaan dan kekerasan. Maksudnya untuk menghancurkan atau menguasai pusat-pusat kekuasaan di bidang-bidang kehidupan lainnya.

D. Pengertian Wewenang

Wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan

keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak dan bukan pada kekuasaannya.

Seperti halnya kekuasaan, wewenang juga dapat dijumpai dimana-mana walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada disatu tangan. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan saja tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak syah.

Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan mengesahkan dari masyarakat agar menjadi kuat wewenang. Adapun kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh dengan rela atau terpaksa. Apabila kekuasaan itu ada pada diri seseorang biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan merek yang menerima pengaruhnya merupakan pengikut pengikutnya.

Beda antara kekuasaan dengan wewenang (authorit atau legalized power) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendukung atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu maka didalam suatu masyarakat yang sudah komplek susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yan terinci, wewenang itu

biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputinya, waktunya dan cara menggunakan kekuasaan itu.

Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Akan tetapi tidak ada suatu masyarakat didalam sejarah yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu menjadi wewenang. Bila setiap macam kekuasaan menjelma menjadi wewenang, maka susunan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku, sehingga tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi di masyarakat. Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif bila didukung dengan kekuasaan yang nyata.

Tetapi acapkali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak satu tempat atau tidak ada di dalam satu tangan. Dalam masyarakat yang kecil dan susunannya sederhana, umumnya yang dipegang seseorang atau sekelompok orang itu meliputi bermacam bidang sehingga terdapat sistem kekuasaan terpusat. Selain itu terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat laun diidentifikasi dengan orang yang memegangnya.

Sebaliknya dalam masyarakat yang besar dan kompleks dimana ada pelbagai golongan yang sifat dan tujuan hidupnya berbeda-beda dan kepentingannya tidak selalu sesuai satu sama lain, maka kekuasaan biasanya terbagi pada beberapa golongan sehingga terdapat perbedaan dan pemisahan teoritis dan nyata dari kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama dan sebagainya. Adanya kekuasaan yang terbagi itu tampak jelas pada masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi yang luas. Adanya kekuasaan dan wewenang setiap masyarakat, merupakan gejala yang wajar,

walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, karena sifatnya yang abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kekuatan dan wewenang. Wewenang itu ada beberapa bentuk ialah ;

1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal).

Pembedaan antara wewenang ; karismatik tradisional dan rasional (legal) dibedakan pada hubungan antara tindakan-tindakan dengan dasar hukum yang berlaku.

Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang dibesarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Orang-orang disekitarnya mengakui akan ada kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada diatas kekuatan dan kemampuan manusia umumnya. Sumber kepercayaan dan pemujaan tersebut ada, karena kemampuan khusus tadi pernah terbukti manfaat serta kegunaannya bagi masyarakat. Wewenang kharismatis akan dapat tetap bertahan selama dibuktikan keampuhannya bagi masyarakat. Wewenang kharismatis dapat berkurang, bila ternyata individu yang memiliki berbuat kesalahan -kesalahan yang merugikan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat berkurang atau hilang. Wewenang kharismatis ini tidak diatur oleh kaedah-kaedah, baik yang tradisional maupun rasional sifatnya adalah irrasional Adakalanya kharisma dapat hilang karena masyarakat sendiri yang berubah dan mempunyai paham yang berbeda. Wewenang tradisonal dapat dimiliki seseorang atau

sekelompok orang. Wewenang tersebut dimiliki seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatis, tetapi karena telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Karena sudah demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan, masyarakat percaya itu mengakui kekuasaan tersebut. Wewenang rasional (legal) adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Sistem hukum dalam hal ini adalah sebagai kaedah-kaedah yang sudah diakui serta ditaati masyarakat, bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

Dalam masyarakat yang demokratis, sesuai dengan sistem hukumnya, orang-orang yang memegang kekuatan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas. Gunanya adalah agar orang-orang yang memegang kekuasaan tadi akan dapat menyelenggarakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pada umumnya ketiga bentuk wewenang tersebut dapat dijumpai ketiga-tiganya dalam masyarakat walaupun mungkin hanya salah satu bentuk yang tampak menonjol.

2. Wewenang resmi dan tidak resmi

Pada setiap masyarakat akan terdapat berbagai bentuk kelompok, mulai dari kelompok kecil dimana masing-masing anggota saling mengenal, sampai kelompok besar dimana hubungan anggota-anggotanya lebih banyak didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang sifatnya rasional. Dalam kelompok-kelompok tersebut sering timbul masalah mengenai resminya suatu wewenang yang berlaku didalamnya. Pada kelompok-kelompok kecil sering wewenang sebagai tidak

resmi, karena sifatnya spontan, situasional, dan didasarkan faktor saling mengenal dan wewenang biasanya tidak diterapkan secara sistematis. Misalnya pada diri seorang ayah dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. biasanya terdapat pada kelompok-kelompok besar dengan aturan tata tertib yang tegas dan tetap. Karena banyak anggota, umumnya ditentukan secara luas hak-hak serta kewajiban-kewajiban anggotanya, kedudukan serta peranannya dan sebagainya Tetapi dalam kelompok-kelompok besar dengan wewenang resmi tersebut, dapat saja dijumpai wewenang yang tidak resmi. Tidak semua dalam kelompok tersebut dilakukan atas dasar peraturan-peraturan resmi.

3. Wewenang pribadi dan territorial

Perbedaan antara wewenang pribadi dengan territorial sebenarnya timbul dari sifat kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan daerah, faktor ikatan tempat tinggal atau gabungan kedua faktor tersebut. Di Indonesia dikenal kelompok-kelompok atas dasar ikatan darah misalnya marga. Selain itu dikenal pula desanya lebih didasarkan pada faktor territorial. Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok yang bersangkutan dan unsur kebersamaan, memegang peranan yang sangat penting. Individu-individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban-kewajiban daripada hak-hak Struktur wewenang bersifat konsentris, artinya dari satu titik pusat kemudian meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu. Setiap lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan penuh diwilayahnya masing-masing.

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dari pada peraturan-peraturan dan juga mungkin didasarkan pada kharisma seseorang. Pada wewenang teritorial, wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Kedua bentuk wewenang di atas dapat saja hidup berdampingan. Pada desa-desa di Jawa wewenang teritorial lebih berperan ada juga kecenderuagan-kecenderungan untuk mengakui wewenang dari golongan pemilik lahan (kuli kenceng) yang sifatnya turun-temurun dan didasarkan pada ikatan atau hubungan darah.

4. Wewenang terbatas dan menyeluruh

Wewenang terbatas merupakan wewenang yang dikaitkan pada kelompok tertentu, hubungan tunggal tertentu atau suatu fungsi yang tunggal. Artinya wewenang tersebut terbatas tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Wewenang, menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi bidang-bidang kehidupan tertentu.

KEBIJAKAN TERHADAP PEREMPUAN, GENDER DAN PEMBANGUNAN

A. Pengertian gender

1) Perbedaan gender dan seks

Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh budaya, dibentuk oleh manusia, dan dibentuk melalui pembiasaan secara sosial. Gender merupakan bentukan secara sosial-budaya dalam organisasi dan struktur kemasyarakatan dan berubah dari suatu budaya ke budaya lain, dari suatu konteks lokal ke konteks lokal lain, dan menurut kelompok etnik, struktur sosial dan generasi dari waktu ke waktu. Perbedaan gender tidak tidak terbawa dari lahir melainkan dipelajari melalui sosialisasi: seorang anak yang belajar bagaimana menjadi seorang perempuan/laki-laki dalam komunitas, kemasyarakatan dimana dia tumbuh, dan posisi apa yang harus dia ambil sebagai perempuan/laki-laki (menurut standart dan nilai yang dominan dalam hubungan dengan anggota lain dalam masyarakat).

Seks merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis dan jelas bukan buatan manusia, karena perbedaan tersebut sudah dimiliki seorang sejak lahir. Karenanya, tidak bisa dirubah dan tidak tergantung atau berubah karena konteks sosial-budaya, kelompok etnik, struktur sosial, maupun generasi atau waktu.

2) Peran Gender

Peran adalah pola tingkah laku seseorang. Suatu peran meliputi hak dan kewajiban khusus ; dengan status sosial dan kekuasaan tertentu yang terkandung di dalamnya dan melekat dalam suatu latar belakang sosial-budaya tertentu. Peran seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya dalam komunitas. Peran yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dalam komunitas dipengaruhi oleh norma-norma budaya masyarakat itu sendiri, status sosial-ekonomi mereka; oleh harapan orang lain dan citra (image) seseorang yang ingin dia tampilkan.

Peran Gender merujuk pada peran-peran yang dilakukan baik oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang ditentukan oleh kebijakan sebagai perempuan dan laki-laki. Peran seorang ibu dan bapak, contohnya, mencakup hak dan tanggungjawab untuk mengasuh anak-anak dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kedua peran tersebut, mengandung perangkat tingkah laku dan nilai sosial. Apabila seseorang tidak melakukan peran gendernya sesuai dengan harapan masyarakat, mereka akan menghadapi sanksi sosial. (Kerstan, 1995).

Peran gender berdasarkan pada stereotip gender “perempuan dan laki-laki’, ciri-ciri yang dianggap ‘maskulin” atau “feminin”, berbagai macam sikap, tingkah laku, kegiatan, tugas, pekerjaan, hak, kewajiban, keputusan, ruang gerak, ruang untuk berpendapat dan mengembangkan kreatifitas, dll, dapat dihubungkan dengan nilai dan standar budaya gender.

3) Masalah mengenai Gender

Perbedaan Gender dan peran gender bukanlah menjadi masalah. Gender adalah sesuatu yang netral-suatu konsepsi-

salah satu dari sekian banyak konsepsi sosial budaya yang memungkinkan orang hidup bersama dalam suatu kelompok atau komunitas.

Gender menjadi masalah bila salah satu pihak; perempuan atau laki-laki secara ekonomi, sosial-budaya dan/atau sosial-politik dirugikan, disubordinasi, didiskriminasi atau ditindas dibandingkan pihak lain, karena perbedaan gender dan peran gender sehingga tertinggal oleh pembangunan karena tidak mendapatkan cukup kekuasaan untuk menentukan arah hidup serta masa depan mereka.

Inti masalahnya terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dimana ketidaksertaan hubungan gender merugikan salah satu pihak, dalam banyak kasus yaitu perempuan di seluruh dunia khususnya arus utama ekonomi.

Akan tetapi, suatu kesalahan bahwa ketidak-seimbangan kekuasaan dipahami sebagai masalah yang hanya merugikan kaum perempuan. Laki-laki juga bisa sebagai pihak yang dirugikan akibat stereotip gender yang memaksa mereka untuk melakukan peran yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Selain itu, masalah gender tidak saja terjadi antara laki-laki dan perempuan. Hubungan kekuasaan gender menentukan hubungan antara laki-laki dan antara perempuan dan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan sosial antara perempuan dan laki-laki (berdasarkan kelas, umur, etnik dll) lebih besar dibandingkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan gender mempengaruhi semua aspek kehidupan, pemahamannya akan membantu kita untuk lebih memahami bagaimana budaya dan masyarakat melakukan fungsinya.

B. Dampak Pembangunan Pertanian dan Kaum Perempuan

Pada akhir tahun 1960-an dalam rangka pembangunan pertanian, khususnya pembangunan subsektor tanaman pangan, pemerintah memperkenalkan berbagai program pembangunan dalam kerangka melaksanakan Revolusi Hijau. Dengan partisipasi petani Indonesia Revolusi Hijau telah berhasil menaikkan secara drastis produksi pertanian Indonesia, khususnya produksi subsektor pangan. Namun kenaikan produksi itu sendiri ternyata diikuti dengan pengorbanan kaum perempuan pedesaan, khususnya mereka yang miskin yang harus kehilangan mata pencaharian mereka. Kaum perempuan miskin terpaksa tidak dapat mengikuti peristiwa panen di desa mereka secara bebas karena para pemilik sawah membatasi jumlah perempuan miskin yang diizinkan ikut panen di sawah mereka. Ketika terjadi perubahan teknologi panen dan ani-ani ke teknologi sabit maka sekali lagi kelompok perempuan miskin terpaksa menyingkir dan tempatnya digantikan oleh buruh para pria. Demikian pula ketika terjadi perubahan teknologi dalam prosesing padi dari teknologi tumbuk padi ke teknologi huller maka ratusan bahkan ribuan perempuan miskin di pedesaan yang bermata pencaharian penumbuk padi terpaksa menganggur karena mesin huller telah menggantikan mereka. Penelitian tentang dampak hal ini terhadap kesejahteraan keluarga petani miskin yang menggantungkan kehidupan mereka dari perolehan bawon panen si ibu atau anak perempuan mereka belum ada di Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa perubahan-perubahan itu mengakibatkan para kelompok perempuan miskin harus menggantungkan food security keluarga mereka pada pasar bebas. Inilah mungkin sebab mengapa beberapa keluarga miskin suatu desa di sebuah kabupaetn di Jawa Barat seperti diberitahukan oleh sebuah harian ibu kota terpaksa harus makan beras aking karena mereka tidak mampu membeli beras di pasaran bebas.

Pergeseran tenaga buruh perempuan oleh tenaga buruh pria dilaporkan oleh Susanna Price (dalam Sutrisno L, 1997) juga terjadi di sektor industri tekstil dan batik. Ketika teknologi cap mulai digunakan dalam industri batik, maka pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan yang menghasilkan upah yang tinggi semua dimonopoli oleh pekerja-pekerja pria, sedang buruh-buruh perempuan yang semula mengerjakan pekerjaan sama dipaksa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan dengan demikian upah mereka pun rendah. Pembangunan industri yang terpusat di daerah perkotaan dan tetap langkanya kesempatan bekerja di daerah pedesaan membuan banyak laki-laki di daerah pedesaan mencari pekerjaan di kota-kota yang jauh dari desa mereka. Jauhnya tempat bekerja kaum lelaki ini dari tempat tinggal mereka menyebabkan semakin sulit para perempuan desa untuk mengontrol pendapatan suami mereka. Istri-istri mereka tidak tahu berapa banyak upah yang diterima oleh si suami dan untuk apa saja uang itu digunakan oleh suami mereka. Karena para istri itu tetap tinggal di desa sementara suami mereka berkelana mencari pekerjaan jauh dari desa mereka.

Hubungan antara pembangunan dan peran ganda perempuan di Indonesia. Pembangunan dapat bahkan sering mempersempit kesempatan kelompok perempuan miskin untuk melestarikan peranan ganda mereka yang memang telah lama merupakan bagian dari kehidupan mereka. Gejala ini telah melembaga dalam masyarakat ketika masyarakat tidak mau mengubah budaya yang mendiskriminasikan perempuan, dan ketika pimpinan-pimpinan organisasi perempuan terbelenggu oleh kegiatan yang didasarkan pada citra baku perempuan dan bukan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memperjuangkan martabat perempuan dalam pembangunan.

C. Peranan Ganda Perempuan dalam Pembangunan

Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan miskin peranan ganda bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Bagi golongan ini peranan ganda telah ditanamkan oleh orang tua mereka sejak mereka masih berusia muda. Bagi putri seorang petani miskin ia tidak dapat lagi bermain-main seperti lazimnya anak-anak sebaya mereka dari keluarga kaya di desa mereka karena putri keluarga miskin tersebut dibebani kewajiban bekerja oleh orang tua mereka segera mereka mencapai usia tujuh tahun, bahkan sering lebih muda dari umur itu.

Pekerjaan mereka, tergantung dari usia anak, bervariasi mulai dari menjaga adik, menggembala kambing, sampai bekerja sebagai buruh tani untuk memperoleh upah di dalam menambah pendapatan keluarga mereka. Keadaan ini terus mereka lakukan setelah mereka kawin; mereka bekerja baik sebagai ibu rumah tangga maupun “bread winer” di samping suaminya. Bagi perempuan golongan ini peranan ganda seorang perempuan telah mereka terima sebagai kodrat perempuan. Karena mereka melihat tanpa bantuan mereka jelas sang suami tidak dapat menghidupi keluarganya. Kemiskinan yang melanda mereka dan keluarga mereka menyebabkan perempuan-perempuan dari golongan ini tidak dapat begitu saja menyerahkan kelangsungan hidup keluarga kepada suami mereka. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan perempuan dari golongan kaya. Sejak kecil mereka tidak perlu bekerja karena orang tua mereka dapat menggaji pembantu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada keluarga miskin dilakukan oleh putri-putri mereka. Setelah mereka dewasa, mereka pun tak perlu harus membantu orang tua mereka untuk bekerja menambah pendapatan keluarga seperti halnya teman-teman sebayanya dari golongan miskin. Demikian pula sesudah mereka kawin mereka tetap tinggal di rumah karena suami

mereka telah dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi mereka yang karena nasib yang kurang beruntung memperoleh suami yang kurang mampu, mereka masih memperoleh bantuan dari orang tua mereka.

D. Pendekatan Kebijakan Terhadap Perempuan, Gender dalam Pembangunan

Didasari keterbelakangan dan kerugian perempuan dalam proses pembangunan, telah mendorong para pembuat kebijakan dan pelaksana pembangunan mengembangkan program bagi kemajuan perempuan. Mereka kemudian mengidentifikasi daftar kerugian perempuan dalam proses itu. Identifikasi itu kemudian dijadikan dasar bagi rancangan yang menekankan pada program pemenuhan kebutuhan perempuan sebagai unsur tambahan dalam sasaran pembangunan yang kemudian dikenal dengan pendekatan *Women in Development project*. *Women in Development* (WID) kemudian menjadi diskursus pembangunan dan pendekatan dominan terhadap pemecahan persoalan perempuan dunia ketiga. Agenda utama WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Hal ini didasari asumsi bahwa penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Program-program WID menjelma dalam proyek-proyek peningkatan peran wanita dengan pendekatan kesejahteraan yang melekatkan perempuan sebagai sasaran, seperti program kesehatan ibu-anak, skema pemberian ASI pelayanan Keluarga Berencana, bantuan pangan dan sebagainya yang sekaligus memperkuat peran gender tradisional perempuan. Program kesejahteraan ini menjadi sangat populer sekalipun tidak mampu menciptakan kemandirian bagi perempuan dan penghapusan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan anti

kemiskinan (*anty poverty*) dan pendekatan efisiensi yang mewujud dalam proyek peningkatan pendapatan perempuan merupakan beberapa pendekatan program bernuansa WID yang sangat populer pada dekade 70-an.

WID dengan cepat menjadi *mainstream* kebijakan yang berkaitan dengan perempuan di hampir semua negara dunia ketiga. Tahun 1974 USAID membuka biro WID dan sejak saat itulah, hampir serentak, pemerintah dunia ketiga memasukkan agenda WID ke dalam program masing-masing. Departemen peranan perempuan pun menjadi model di hampir semua pemerintah dunia ketiga, tidak terkecuali Indonesia.

Setelah satu dasa warsa berjalan, banyak kalangan mulai menyangsikan dan memberikan kritik mendasar terhadap konsep WID. Konsep WID, selain bias dengan feminis liberal juga lebih menghasilkan penjinakan dan pengekangan perempuan dunia ketiga ketimbang pembebasan. Dalam bukunya *Women's Role in Economic Development*, Esther Boserup melancarkan kritik asumsi feminis liberal bahwa teknologi membebaskan perempuan menurutnya, peningkatan teknologi justru merendahkan status kaum perempuan karena menyingkirkan perempuan dari akses kerja produktif. Dalam konteks yang lebih luas Boserup menilai bahwa modernisasi telah menghancurkan perempuan dan tidak mampu menghapus kemiskinan.

Kritik terhadap pendekatan WID kemudian melahirkan pendekatan baru dalam pemajuan perempuan, yakni *Women and Development* (WAD) yang menekankan pada aspek pendekatan persamaan. Gagasan tentang persamaan menjadi agenda sangat penting dalam kerangka memahami apa yang dibutuhkan bagi perempuan dan partisipasinya dalam proses pembangunan, baik melalui peran produktif maupun reproduktifnya. WAD merupakan

satu pendekatan yang berasal dari feminis Neo Marxis yang muncul pada akhir pertengahan tahun 1970-an. WAD selain memberikan perhatian pada perempuan, juga mengakui bahwa laki-laki miskin juga menjadi proses pembangunan. Asumsi yang dikembangkan WAD, posisi perempuan akan lebih baik adil. Kelemahan mendasar pendekatan ini adalah “ a) WAD cenderung mengabaikan penindasan gender perempuan, b) posisi perempuan sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas. Ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur laki-laki, c) pendekatan WAD cenderung menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

E. Pengintegrasian Gender Dalam Pembangunan

Dekade 1980-an mulai muncul kesadaran bahwa analisis hubungan gender yang semata-mata hanya mengangkat perempuan saja tidak serta merta mampu menyelesaikan ketimpangan dan ketidakadilan relasi kekuasaan, termasuk relasi laki-laki dan perempuan. Sejak itu, terjadi pergeseran cara pandang yang berfokus pada persoalan ketidaksetaraan pembagian kerja, kekuasaan, serta sumber daya antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pendekatan yang memberi perhatian pada hubungan gender dalam analisis hubungan ini disebut pendekatan *gender and development* (GAD). GAD memberikan catatan kritis terhadap teori-teori yang menegaskan adanya nilai lebih dalam pembangunan serta menolak gagasan bahwa perempuan ingin diintegrasikan dalam arus utama pembangunan yang didesain dari barat yang menjadi landasan WID. Pendekatan pembedayaan atau GAD merupakan pendekatan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan seluruh kerja yang dilakukan oleh perempuan, baik bersifat produktif, reproduktif,

private dan publik, juga menolak upaya apapun yang menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya, baik dalam analisa asal, dinamika dan struktur penindasan terhadap perempuan dan bagaimana merubah posisi dan peran perempuan.

Pemberdayaan yang banyak yang banyak muncul dari pemikiran feminis dari selatan ini ,menawarkan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dan melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi-posisi negara selatan dalam tata ekonomi internasional, tujuan pembangunan dalam perspektif GAD dirumuskan sebagai penciptaan kemandirian dan kekuatan internal. Pendekatan ini lebih menekankan segi-segi pembuatan undang-undang yang menekankan relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ketimbang pemberdayaan terhadap perempuan untuk mengubah dan mentransformasikan struktur yang bertentangan dengan mereka/ oleh karenanya, mobilisasi politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat menjadi titik tekan dalam perubahan sosial yang berkelanjutan. Orientasi organisasi perempuan ke depan tidak saja menawarkan pemberdayaan dan perubahan pribadi tetapi juga memberikan konteks transformasi pribadi menuju aksi politik. Dengan kata lain, orientasi GAD tidak sekedar pemenuhan kebutuhan praktis perempuan (kebutuhan khusus jangka pendek) tetapi juga kebutuhan strategis yang berjangka panjang.

Menurut Friedmann (dalam Sutrisno L, 1997) pemberdayaan memiliki makna memberikan atau mendapatkan kekuatan (power). Pemberdayaan sangat berkaitan erat dengan kemampuan golongan tidak mampu untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan. Sebuah sistem dalam organisasi pada tataran individual.

Seseorang dipandang mampu apabila dalam komunitas lokal mendapatkan kemahiran dan kemampuan secara sosial, ekonomi dan politik sekaligus memanfaatkan kemahiran itu dalam periode lama dan dapat dialihkan pada aspek lain dalam kehidupannya. Sementara, pada tataran komunitas, dipandang berdaya apabila komunitas tersebut mampu memegang kendali atas urusan-urusannya sendiri dan meningkatkannya inisiatif komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain pendekatan tersebut di atas, dikenal juga pendekatan *Gender Mainstreaming* (GM) yang muncul sebagai strategi alternatif dari strategi-strategi sebelumnya dan merupakan agenda di masyarakat luas. Bila strategi WID menekankan pada peningkatan dan pengintegrasian perempuan dalam pembangunan, GAD berupaya mengintegrasikan gender dalam pembangunan, maka GM lebih memfokuskan pada tataran negara. Oleh karenanya strategi GM lebih menggunakan sarana advokasi, studi dan perencanaan kebijakan. Di samping itu, strategi atau pendekatan GM juga lebih menekankan ada organisasi atau institusi.

Prasyarat penting dalam pemberdayaan perempuan adalah pemahaman mendalam mengenai ketimpangan gender di masyarakat. Oleh karenanya analisis gender diperlukan dalam menelaah atas realitas sosial. Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi dan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan cultural. Menelaah persoalan perempuan dengan menggunakan analisis gender bukanlah upaya mudah karena sering harus berhadapan dengan perlawanan (*resistensi*) yang keras, tidak saja dari kaum laki-laki maupun perempuan, tetapi seringkali juga ditolak oleh mereka yang melakukan kritik terhadap sistem sosial yang dominan (kapitalisme).

Karena analisis ini berupaya melihat secara kritis atas ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam program pembangunan, maka ada beberapa tahapan praktis yang harus dilakukan dalam analisis gender. Pertama, menelaah tujuan kebijakan yang ada saat ini dalam perspektif gender *Existing policy objectives*. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah tidaklah netral gender dan dalam konteks ini, harus dilihat apakah pemerintah memiliki kemauan politik untuk meningkatkan status perempuan dan kemauan tersebut telah terefleksikan dalam tujuan kebijakan. Kedua, memiliki data-data ketimpangan dari kebijakan pembangunan (*eye-opener data*). Data kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk menilai dampak yang berbeda atas kebijakan yang ada terhadap perempuan dan laki-laki, dan pembuat kebijakan memahami pengalaman yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan praktek dan hasil pembangunan. Ketiga, Menelaah faktor yang melahirkan kesenjangan (*gap factors*). Harus ditelaah hal-hal yang menyebabkan gender gap, bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi (*participate*) dalam program pembangunan, apakah perempuan dan laki-laki menikmati akses yang sama atas sumber-sumber pembangunan (kebijakan, program, proyek, legislasi, dan anggaran), siapa yang mengontrol sumber-sumber ini, dan apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan keuntungan yang setara dari program pembangunan. Keempat, mengidentifikasi isu gender (*Gender issues*). Harus dilihat problem apa yang mengandung kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam partisipasi, akses, kontrol, dan mendapatkan keuntungan dari program pembangunan, apa akar penyebab dari problem ini, dan bagaimana problem ini dapat dipecahkan.

Berbicara mengenai partisipasi dalam proyek pembangunan, kita harus sadar bahwa partisipasi penuh oleh kelompok sasaran dalam berbagai tahapan siklus proyek hanya dapat terwujud bila

syarat-syarat tertentu terpenuhi. Tingkat dan bentuk partisipasi tertentu yang dapat dicapai pada setiap tahapan siklus proyek harus dianalisa dalam konteks lingkungan regional dan sektoral. Di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat diperhatikan tentang, ciri-ciri dan syarat-syarat Partisipasi

Hal-hal yang harus diperhatikan :

- Perwakilan dari semua pihak, kelompok sosial, laki-laki dan perempuan secara demokratik.
- Kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mengambil peran dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proyek.
- Semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan input dan manfaat proyek.
- Semua pihak mempunyai kapasitas (waktu, sumberdaya, ketrampilan, kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dll) untuk berpartisipasi dalam proyek.
- Semua pihak menyumbang (gagasan, materil, finansial) sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing.
- Komunikasi yang lancar dan pertukaran informasi secara bebas antara semua aktor.
- Tanggung gugat semua aktor.
- Fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana.
- Kekuasaan untuk menciptakan perubahan.
- dll.

(Kerstan, 1995)

Analisis ini kemudian dijadikan dasar bagi pemberdayaan perempuan. Ada dua langkah yang dilakukan dalam formulasi kebijakan gender, pertama, menetapkan tujuan kebijakan kesetaraan

gender. Dalam konteks ini dirumuskan cara dan strategi memastikan bahwa perempuan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan dan memperoleh keuntungan dari proses itu setara dengan laki-laki, merumuskan ukuran kebutuhan guna menghapuskan ketidaksetaraan posisi perempuan berhadapan dengan laki-laki, dan menetapkan opsi kebijakan yang dapat diidentifikasi mampu menutup kesenjangan. Kedua, merumuskan indikator gender. Dirumuskan indikator gender kualitatif dan kuantitatif guna mengevaluasi kesuksesan implementasi tujuan kebijakan baru kesetaraan gender yang dicanangkan pemerintah, penetapan jenis indikator yang mampu mengukur apakah faktor kesenjangan sudah direduksi atau dieliminasi, dan penetapan ukuran sukses kesetaraan gender.

Dari analisis kebijakan dan formulas kebijakan gender tersebut kemudian dirancang rencana aksi kebijakan gender *Action plan of Gender policy*, yang melingkupi dua langkah : pertama, kegiatan, melingkupi rancangan detail aktivitas yang digunakan untuk mereduksi atau mengeliminasi gender gaps. Seluruh aktivitas paralel dengan tujuan sebagaimana diidentifikasi pada tujuan kebijakan kesetaraan gender. Kedua, target, penetapan target kualitatif dan kuantitatif yang akan diraih bagi setiap aktivitas sebagaimana disebut di atas. Rencana aksi tersebut kemudian diimplementasikan dan dalam prosesnya kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi guna melihat sejauh mana progress dan kendala yang dihadapi dalam program gender mainstreaming.

GM mensyaratkan tingkat kesadaran dan political will para pelaku pembangunan untuk mengarusutamakan gender di setiap level. Persoalan ini tidaklah mudah bahkan menjadi wilayah krusial yang harus diperhatikan. Ada sejumlah kelemahan strategi GM yang berfokus pada negara. Pertama sifat birokrasi yang hierarkis dan paternalistic bertentangan dengan pendekatan GM yang berprinsip

pada kesetaraan dan partisipatoris. Sebagaimana watak inheren birokrasi, keputusan birokrasi adalah hasil dari proses tawar-menawar yang bias kekuasaan, sehingga pengambilan keputusan bukan melalui proses yang partisipatoris dan pada gilirannya program-program yang dicanangkan pun berwatak birokratis, kedua, tingkat kesadaran para perencana dan pelaku pembangunan terhadap gender masih sangat lemah. Kelemahan kesadaran ini tidak saja berakibat pada lemahnya daya gerak GM tetapi lebih dari itu, GM dikhayati sebagai sekedar proyek baru yang tidak perlu membutuhkan komitmen kuat. Menilik kenyataan tersebut, strategi GM yang berfokus pada ranah advokasi dan perubahan organisasi tetap harus didukung proses penyadaran dan pengorganisasian yang solid. Dengan demikian ada 3 ranah pemberdayaan yang perlu dikembangkan advokasi, penyadaran dan pengorganisasian/pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Djiwandi, 1991, *Sosiologi Pertanian*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal : 1-8
2. Ibrahim J. T., 2003, *Sosiologi Pertanian*, UMM, Malang Hal :2-6
3. Khairuddin, 1992, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta. Hal : 1-6
4. Solekhan dan Sutiah, 2003, *Panduan Kerja Badan Perwakilan Desa*, LPKP, Malang. Hal :1 -57
5. Ibrahim J. T., 2003, *Sosiologi Pedesaan*, UMM, Malang. Hal : 163-165
6. Khairuddin, 1992, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta. Hal : 136-180
7. Luthfifatah, 2006, *Pertanian dan Pedesaan*, Pustaka Banua, Banjar Baru. Hal : 51-79
8. Mustofa M. S., 2005, *Kemiskinan Masyarakat Petani Desa Di Jawa*, UNNES PRESS, Semarang. Hal 1-17
9. Simanjuntak, 1992, *Perubahan Sosio Kultural*, Tarsito, Bandung. Hal : 1-18

